

05/V/2016



JURNAL WIDYA PRABHA

**PENGUATAN
POTENSI-MEMBANGUN KUALITAS
MASYARAKAT**



Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktorat Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Daftar Isi

Riset - Aksi Perancangan Dan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Kawasan Cagar Budaya Prambanan	3
Batik Candi Motif Batik Bersumber Pada Unsur Dekoratif Candi dan Arca di Prambanan dan Sekitarnya	24
Dimensi Manusia Dalam Pelestarian Cagar Budaya	45
Konsep Mandala Pada Candi - Candi Buddha Di Jawa Abad IX - X Masehi	60
Beberapa Bangunan Peribadatan Di Kampung Kauman Yogyakarta <i>Several Religious Buildings In Kauman Village, Yogyakarta</i>	74

Redaksi menerima sumbangan/kiriman naskah dari para ahli atau penulis manapun yang berminat pada masalah pelestarian situs/Benda Cagar Budaya dan bidang-bidang ilmu yang relevan serta menjadi kompetensi Jurnal Widya Prabha.

Syarat penulisan naskah :

- Naskah dapat ditulis dengan bahasa Indonesia maupun Inggris.
- Panjang naskah kurang lebih 15 halaman kwarto, dengan spasi 1,1/2
- Naskah yang dikirim harus asli karangan penulis.
- Naskah dikirim ke Redaksi dalam bentuk CD.
- Redaksi berhak menyunting naskah sejauh tidak mengubah atau menyimpang is naskah.
- Pendapat yang dinyatakan dalam tulisan bulletin ini tanggung jawab penulis.

Susunan Redaksi

Pelindung :

Kepala BPCB DIY

Drs. Winston Sam Douglas Mambo.

Penanggung jawab :

Dra. Wahyu Astuti, M.A.

Mitra Bestari :

Prof. Dr. Timbul Haryono, M.Sc.

Pemimpin Redaksi :

Dra. Ari Setyastuti, M.Si.

Anggota Redaksi :

- Drs. Ign. Eka Hadiyanta, M.A.

- Dra. Sri Muryantini Romawati.

- Eny Sukasih, S.S.

Sekretaris :

- Dra. Y. Indarti Nurwidayati

Artistik :

- Jendro Untoro, A.md.

- Dedy Hariansyah, S.Kom.

ISSN 2302 - 8998



COVER

*Penguatan
Potensi-Membangun Kualitas
Masyarakat*



**JURNAL
WIDYA PRABHA**

Penerbit :

Balai Pelestarian Cagar Budaya

Jl. Raya Jogja - Solo Km 15.

Bogem, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlp. (0274) 496019; Email: bp3diy@yahoo.com

www.purbakalayogya.com

Pengantar Redaksi

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan karunia Nya, Jurnal Widya Prabha bisa terbit kembali sesuai dengan rencana. Penerbitan Jurnal Widya Prabha edisi ke-5 ini merupakan salah satu upaya Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I. Yogyakarta dalam mempublikasikan berbagai aspek tentang pelestarian cagar budaya, serta sebagai wujud implementasi program internalisasi cagar budaya kepada masyarakat melalui media cetak.

Pada kesempatan baik ini redaksi menghaturkan terima kasih kepada para kontributor tulisan yang telah bersedia meluangkan waktu dengan menyumbangkan gagasannya untuk diterbitkan dalam jurnal ini. Redaksi juga memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Redaksi yang sudah bekerja keras sehingga jurnal ini bisa diterbitkan. Semoga jurnal ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dan memperkaya pustaka tentang cagar budaya. Redaksi menyadari bahwa jurnal ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu kritik dan saran dari pembaca kami harapkan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penerbitan jurnal yang akan datang. Semoga segala niat baik kita dalam upaya melestarikan cagar budaya beserta nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya diberikan jalan kemudahan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Redaksi

Penguatan Potensi - Membangun Kualitas Masyarakat

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai perwujudan hasil pemikiran dan perilaku kehidupan manusia. Eksistensi cagar budaya terkait langsung dengan akumulasi pengalaman kolektif manusia pendukung budaya pada zamannya. Wujud kebudayaan monumental sebagai hasil pemikiran dan perilaku di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi bagian penting penanda peradaban manusia.

Dalam konteks kehidupan pada masa kini bagaimana manusia mampu memahami, memaknai, dan mengaktualisasikan kekayaan budaya menjadi potensi bagi kehidupannya. Pelestarian cagar budaya bukan hanya terkait dengan dimensi material dan ruang atau objek, tetapi juga manusia sebagai subjek. Dimensi manusia akan memunculkan persepsi bahwa kelestarian cagar budaya selalu terkait dengan pola perilaku manusia untuk membangun etika, menjaga ketertiban, kepastian hukum, keseimbangan hak – kewajiban, asas manfaat, keberlanjutan, dan partisipasi. Orientasi tujuan kedepan adalah kekayaan cagar budaya di samping untuk memajukan kebudayaan nasional, meningkatkan harkat martabat bangsa, memperkuat kepribadian bangsa juga meningkatkan kesejahteraan rakyat lahir dan batin.

Aktualisasi potensi perlu langkah konkret dengan berbagai aksi langsung ke masyarakat secara berkelanjutan. Tujuannya agar masyarakat di kawasan maupun lingkungan cagar budaya tidak sekedar menjadi penonton kemegahan monumen dengan berbagai dinamika pemanfaatannya. Aksi konkret yang dibutuhkan masyarakat adalah peningkatan kualitas untuk membangun kemampuan diri(kapasitas) berupa wawasan manajemen organisasi (desa budaya – desa sadar wisata), komunikasi, keterampilan, dan tata kelola jejaring secara sinergis.

Membangun partisipasi semacam ini tidaklah dapat dilakukan secara instan, tetapi harus dilakukan secara bertahap atau berproses, intensif, dan konsisten. Komitmen pemangku kepentingan, baik pemerintah (pusat – daerah), masyarakat, LSM, akademisi, dan swasta, harus mampu mewujudkan apa yang diamanatkan UURI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu kekayaan cagar budaya untuk sebesar-besarnya kemakmuran bersama. Sudah sepantasnya Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY, mampu menggunakan model birokrasi Hegelian, yaitu harus mampu menjalankan fungsi sebagai katalisator antara kepentingan negara (*state*) dengan *stake holders* dan masyarakat luas. Bahkan kemudian mampu mengartikulasikan kepentingan konkret masyarakat dan dapat mengkorporasikannya di dalam kepentingan negara. Di sisi lain juga harus mampu membangun pendekatan dengan birokrasi humanistik model Fromm, yaitu harus mampu mewujudkan kerja sama, komunikasi secara setara (*equal*), dan pola manajemen pemerintahan yang tidak bersifat *top down* tetapi *bottom up* dengan melibatkan semua pihak terkait serta bergotong royong untuk bertanggungjawab secara bersama-sama. Dengan demikian upaya dinamis pelestarian harus berpijak pada aktualisasi potensi cagar budaya serta membangun kapasitas untuk peningkatan kualitas masyarakat.

Redaksi.

RISET-AKSI PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAWASAN CAGAR BUDAYA PRAMBANAN

Oleh :

Destha Titi Raharjana¹ - Janianton Damanik²

Ari Setyastuti³

ABSTRAK

Artikel ini mengulas proses penelitian perancangan dan pelaksanaan program yang dijalankan secara partisipatoris bersama masyarakat lokal di sekitar cagar budaya Prambanan, Sleman, Yogyakarta. Model riset-aksi (*action-research*) ini dimaksudkan mengetahui potensi dasar terkait dengan sumber daya sekitar kawasan, khususnya di areal cagar budaya berikut penyusunan program pemberdayaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pelibatan sejak awal masyarakat lokal menjadi pertimbangan utama guna menjadikan mereka sebagai subjek program pemberdayaan. Lokasi kajian dilaksanakan di Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman yang dinilai banyak memiliki cagar budaya. Tujuan riset-aksi ini untuk mengetahui beragam bentuk tekanan masyarakat kepada benda cagar budaya sekaligus menyerap aspirasi setempat. Pilihan metode riset-aksi ini menjadi pertimbangan pokok dengan didukung teknik observasi, wawancara mendalam serta melaksanakan *participatory rapid appraisal* (PRA) guna menyusun program pemberdayaan. Riset-aksi ini menghasilkan (a) identifikasi potensi kawasan dan bentuk tekanan yang ditimbulkan oleh masyarakat, (b) identifikasi program pemberdayaan yang dibutuhkan masyarakat sekitar kawasan cagar budaya Prambanan. Selanjutnya hasil riset tersebut menjadi program aksi pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan secara berkesinambungan mulai tahun 2015.

Kata kunci : riset aksi, pemberdayaan masyarakat, cagar budaya, Prambanan

LATAR BELAKANG

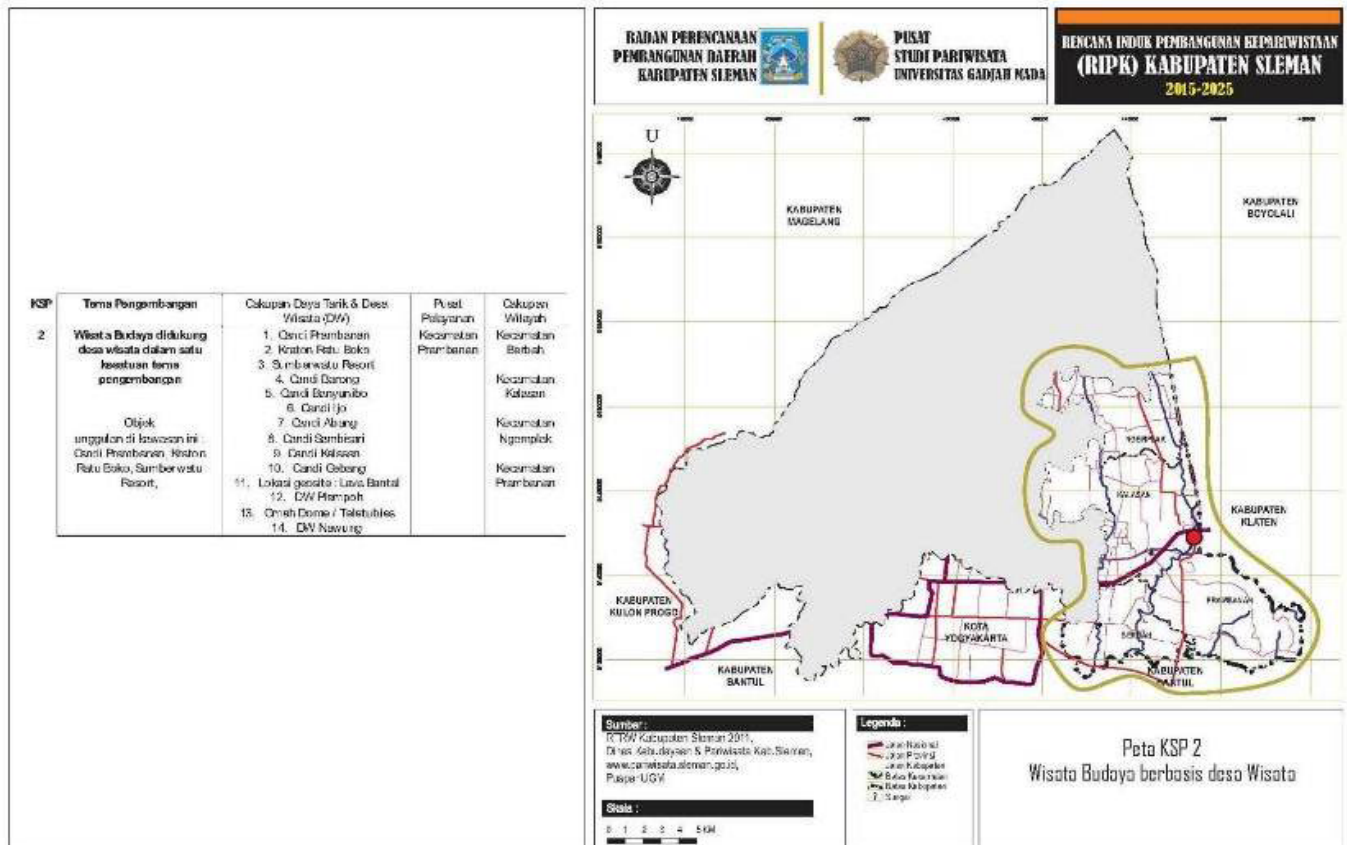
Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPPARDA) DIY yang ditetapkan dalam Perda No. 1/2012 menyebutkan Kawasan Prambanan-Ratu Boko dan sekitarnya sebagai **Kawasan Wisata Purbakala dan Budaya**. Dalam perda tersebut disebutkan strategi pengembangannya yang dilakukan adalah (a) mengembangkan Kawasan Candi Prambanan, Sendratari Ramayana, serta gedung kesenian Trimurti sebagai tempat pertunjukan budaya Jawa; (b) mengembangkan Kawasan Keraton Ratu Boko sebagai wisata candi peninggalan Kerajaan Mataram; dan (c) mengembangkan situs-situs di sekitar Candi Kalasan, Candi Prambanan, dan Keraton Ratu Boko sebagai kawasan wisata berbasis budaya dan religi. Selain itu ditingkat nasional, menetapkan Prambanan – Kalasan dan sekitarnya sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)⁴. Lebih lanjut, dilevel Kabupaten Sleman seperti tercantum di Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Sleman menetapkan Kecamatan Prambanan dan Kalasan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata (KSP) 2, dengan tema pengembangan wisata budaya didukung desa wisata.

¹ Peneliti di Puspar UGM, mahasiswa S3 Kajian Pariwisata Sekolah Pascasarjana UGM.

² Peneliti Senior di Puspar UGM, dosen S2-S3 Kajian Pariwisata Sekolah Pascasarjana UGM.

³ Ka.SubBag Tata UsahaBPCB DIY, Team Leader program Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2015

⁴ KSPN adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata nasional yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. KSPN Prambanan – Kalasan dan sekitarnya ini mencakup segala aspek yang ada di sekitar kawasan tersebut baik itu aspek sosial budaya maupun aspek potensi yang lain dengan tujuan untuk peningkatan atau pertumbuhan ekonomi masyarakat.



Sumber : dokumen RIPK Kabupaten Sleman,2015

Merujuk regulasi di atas, tentunya patut direspon secara positif khususnya bagi masyarakat Prambanan dan sekitarnya yang sudah bergerak di bidang usaha pariwisata, seperti pembuatan produk kerajinan, perdagangan kerajinan, penginapan, hotel, warung makan, ataupun angkutan wisata. Artinya, keberadaan dan pemanfaatan kawasan cagar budaya sebagai basis ekonomi memberikan dampak positif. Aktivitas ekonomi pariwisata yang berkembang pesat secara tidak langsung menciptakan mata rantai kegiatan ekonomi lainnya. Di sisi lain, tanpa bermaksud mengabaikan kepentingan ekonomi lokal, penataan kawasan sekitar cagar budaya mutlak dilakukan untuk melindungi keberadaannya. Sayangnya, masih ditemukannya kegiatan masyarakat yang mengancam kelestarian cagar budaya, seperti halnya penambangan batu, tidak jauh dari Candi Ijo yang telah menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Terjadinya jual beli lahan yang dilakukan kepada investor yang tertarik untuk menanamkan modalnya di kawasan

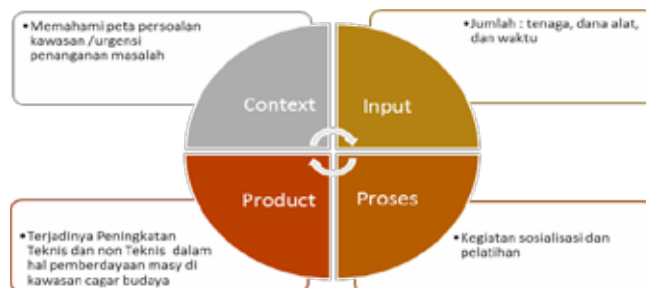
Siwa Plateau. Belum lagi persoalan terkait kesadaran atau masih adanya sikap acuh, masyarakat sekitar akan arti penting warisan budaya. Situasi seperti ini dimungkinkan terjadi karena masyarakat belum menyadari dan mendapatkan manfaat secara langsung keberadaan benda-benda cagar budaya. Secara umum upaya pelestarian warisan cagar budaya sering kali diwarnai konflik. Banyak faktor penyebab munculnya konflik tersebut (Sulistiyanto, 2003).

Artikel ini mengulas riset-aksi dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan di tiga desa yaitu Desa Sambirejo, Desa Bokoharjo, dan Desa Tirtomartani. Ketiga desa yang dijadikan *pilot project* pemberdayaan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) DIY bersama Pusat Studi Pariwisata UGM (2015) menghasilkan identifikasi potensi beserta upaya pengembangan atraksinya termasuk juga bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat yang dibutuhkan. Dalam UU Cagar Budaya No. 11/2010, ditegaskan salah satunya perihal pengamanan situs perlu peran serta

masyarakat. Seiring dengan semangat membangun masyarakat termasuk yang berada di sekitar cagar budaya, partisipasi masyarakat menjadi nilai penting. Dari sudut pandang ekonomi, adanya situs budaya ini seharusnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, salah satunya melalui pengembangan pariwisata. Seperti yang dapat diperhatikan pada kawasan Kompleks Candi Prambanan dan Ratu Boko dengan adanya pembangunan pariwisata sudah mampu mendorong perekonomian warga setempat.

Pendekatan yang dinilai sesuai mensinergikan masyarakat dengan potensi sumber daya adalah *community empowerment*. Pembangunan pariwisata berbasis komunitas (*Community Based Tourism*) menjadi isu penting yang diharapkan mampu mendukung pelestarian. CBT melibatkan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, dan dalam perolehan bagian pendapatan terbesar secara langsung dari kehadiran para wisatawan. Upaya mendorong kemandirian dalam program pemberdayaan masyarakat senada dengan ungkapan “**memberi kail lebih baik dibanding memberikan ikan**”. Ungkapan itu kiranya relevan termasuk yang dijalankan bagi warga sekitar kawasan cagar budaya. Pemikiran ini dilandasi keyakinan bahwa masyarakat setempat mampu didorong untuk mandiri merespon dan mengakses sumber daya. Pihak pemerintah lebih berperan memberikan pendampingan dan pengembangan keterampilan dan untuk selanjutnya pengembangan dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat.

Riset-aksi ini dijalankan dengan pendekatan utama menjadikan masyarakat sebagai subjek sehingga pemberdayaan yang dikerjakan mengikuti kaidah-kaidah antara lain: (a) upaya yang dikerjakan harus terarah, (b) program harus langsung mengikutsertakan masyarakat yang menjadi sasaran, dan (c) menggunakan pendekatan kelompok, sebab bila secara sendiri justru sulit memecahkan masalah yang dihadapinya (Alfitri, 2011). Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien (Santosa, 2014; Suharto, 2005). Guna mempertajam riset-aksi mempergunakan model Evaluasi yang dikembangkan lewat skema CIPP.



Model CIPP yang dipergunakan riset aksi dikerjakan dengan siklus: (1) memahami **context**, berupa memahami peta persoalan dan urgensi penanganan masalah. Tahap ini dilakukan dengan observasi dan melakukan wawancara sambil lalu guna mengetahui potensi, kekuatan beserta kelemahan yang dihadapi masyarakat. Langkah ini penting sebelum menentukan bentuk intervensi serta rumusan program pemberdayaan yang hendak dijalankan. Tindakan ini juga diharapkan mampu merekam situasi lingkungan, mengidentifikasi kebutuhan beserta memahami populasi dan sampel yang hendak dilayani program pemberdayaan; (2) pemberian **Input**. Proses ini dijalankan dengan penyediaan alokasi dana, alat, waktu, beserta tenaga guna mendorong tujuan pemberdayaan masyarakat. Proses dipergunakan untuk menentukan sumber-sumber yang ada, alternatif apa yang diambil, apa rencana beserta strategi untuk mencapai tujuan, dan bagaimana prosedur kerja mencapainya; (3) **Process**. Proses dijalankan dalam bentuk kegiatan aksi (*action*) pada tiga desa terpilih sesuai dengan kebutuhan pemberdayaan. Di tahap ini dijalankan beragam bentuk aksi berupa pelatihan guna mendorong berlangsungnya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan cagar budaya; dan terakhir (4) **Product**. Di tahap terakhir ini dilaksanakan evaluasi produk atas program pemberdayaan yang dijalankan sebelumnya. Baik pemberdayaan teknis ataupun nonteknis. Evaluasi ini membantu dalam mengambil keputusan terkait program pemberdayaan yang sedang terlaksana, apakah program tersebut dilanjutkan, berakhir, ataukah ada keputusan lainnya. Tindakan ini untuk membuat keputusan selanjutnya,

baik mengenai hasil yang telah dicapai maupun yang dilakukan setelah program pemberdayaan berjalan. Sekali lagi pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai pelaku. Masyarakat diajak mulai dari perencanaan kegiatan, pelaksanaan, sampai pemeliharaan dan pelestarian. Lewat model demikian memungkinkan masyarakat memiliki kesempatan belajar lebih banyak untuk menuju kemandirian.

METODE DAN LOKASI KAJIAN

Kajian ini dijalankan dengan model riset-aksi dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran nyata terkait dengan situasi, kondisi wilayah perdesaan berikut kondisi sosial budaya ekonomi masyarakat pada beberapa desa terpilih. Riset-aksi ini kerja bareng Puspar UGM dan BPCB Yogyakarta. Berikut beberapa tahap pengumpulan data dijalankan dengan: (a) **Observasi.** Pada tahap ini dilakukan pengamatan secara langsung pada ketiga desa terpilih. Beberapa aspek yang diamati terkait dengan situasi sosial, ekonomi dan gambaran umum kondisi lingkungan per kawasan, termasuk juga ketersediaan situs. Guna mendapatkan gambaran utuh dalam pengamatan dipergunakan alat rekam, baik rekam suara ataupun gambar. Kelengkapan informasi tentang objek ataupun perilaku masyarakat dilengkapi dengan wawancara yang dijalankan bersamaan dengan saat melakukan observasi. (b) **Wawancara mendalam** (*indepth interview*). Guna mendapatkan lingkup makro terkait dengan kawasan cagar budaya di wilayah Prambanan juga dilakukan wawancara mendalam. Pelaksanaan kegiatan wawancara mendalam dilakukan kepada tokoh-tokoh kunci, seperti aparat desa, tokoh masyarakat, pihak pengelola cagar budaya dan pengelola wisata ataupun kebudayaan. (c) **Focus Group Discussion.** Pelaksanaan FGD dilakukan untuk menjaring data dan informasi yang lebih spesifik tentang kebutuhan program pemberdayaan. Metode ini juga digunakan untuk melakukan pemeriksaan silang dan penajaman akurasi informasi tentang kebutuhan pelatihan. Pelaksanaan

FGD diikuti orang beberapa pihak terpilih dimasing-masing desa, dan dilaksanakan dalam durasi maksimal 3 jam.

Riset aksi ini dijalankan pada tiga desa yaitu Desa Bokoharjo, Desa Sambirejo, keduanya berada di Kecamatan Prambanan, dan Desa Tirtomartani di wilayah Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Pertimbangannya karena terdapat sumber daya budaya serta potensi-potensi pengembangan ke depan pada ketiga desa terpilih menjadi justifikasi yang utama dalam pemilihannya.

PROFIL WILAYAH KAJIAN

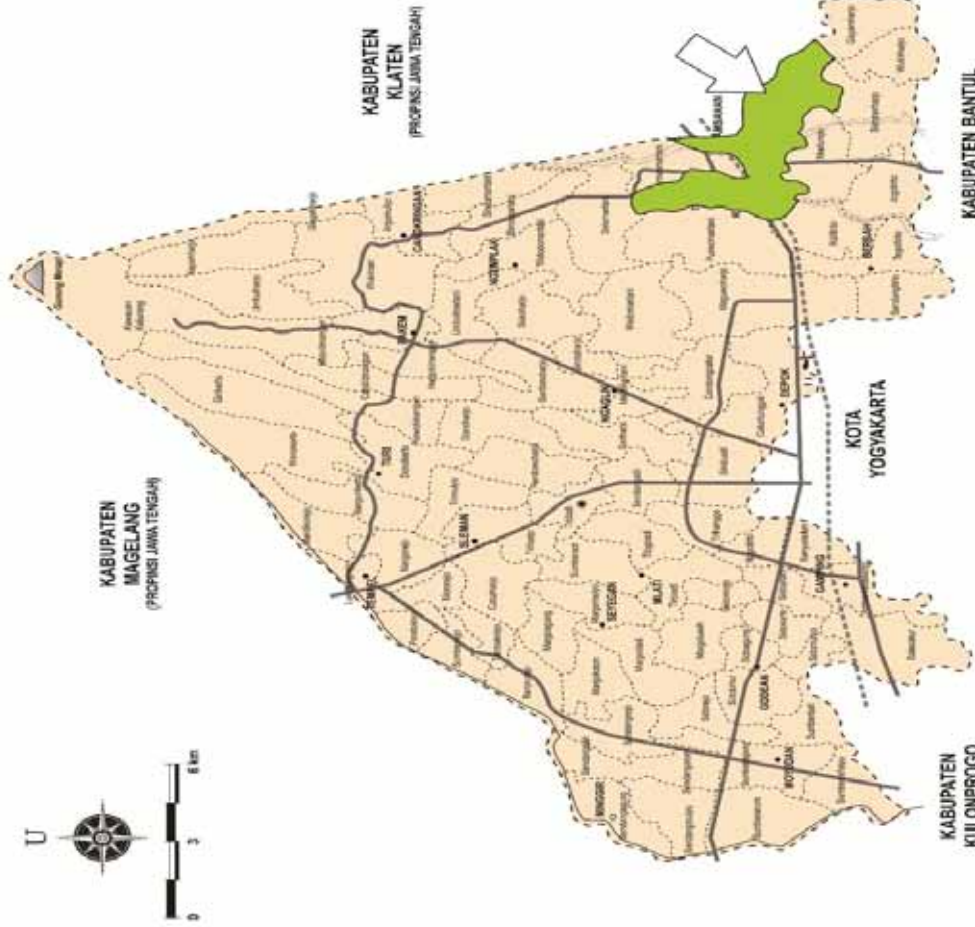
Tiga desa yang dijadikan *pilot project* pemberdayaan masyarakat di kawasan cagar budaya ini. Desa Bokoharjo, terletak di Kecamatan Prambanan. Daya tarik cagar budaya yang utama adalah Candi Prambanan Keraton Ratu Boko, dan Candi Banyunibo. Nama besar kedua cagar budaya sudah dikenal luas wisatawan dan telah menjadikan masyarakat menjadi bagian dari industri pariwisata. Masyarakat Desa Bokoharjo bermatapencaharian sebagai petani, peternak, pegawai negeri, pedagang, dan ada pula yang bertugas di BPCB DIY. Seperti yang diamati di Keraton Ratu Boko, masyarakat membuka usaha dalam bidang perniagaan seperti menjadi pedagang kaki lima, membuka toko di sekitar areal Ratu Boko. Aneka usaha seperti menjual souvenir, makanan, dan minuman. Akomodasi juga sudah berkembang di sekitar objek. Penyedia jasa transportasi pun mendapatkan keuntungan. Di Bokoharjo ada satu desa yang dikenal dengan desa wisata Plempoh. Desa wisata menyediakan fasilitas bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan dari suasana pedesaan. Di sana tersedia *homestay* yang dimanfaatkan sebagai tempat tinggal sementara selama wisatawan *live in* di desa wisata.

Program Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Direktoral Jenderal Kebudayaan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta



Penelitian Studi Partisipasi
Universitas Gadjah Mada

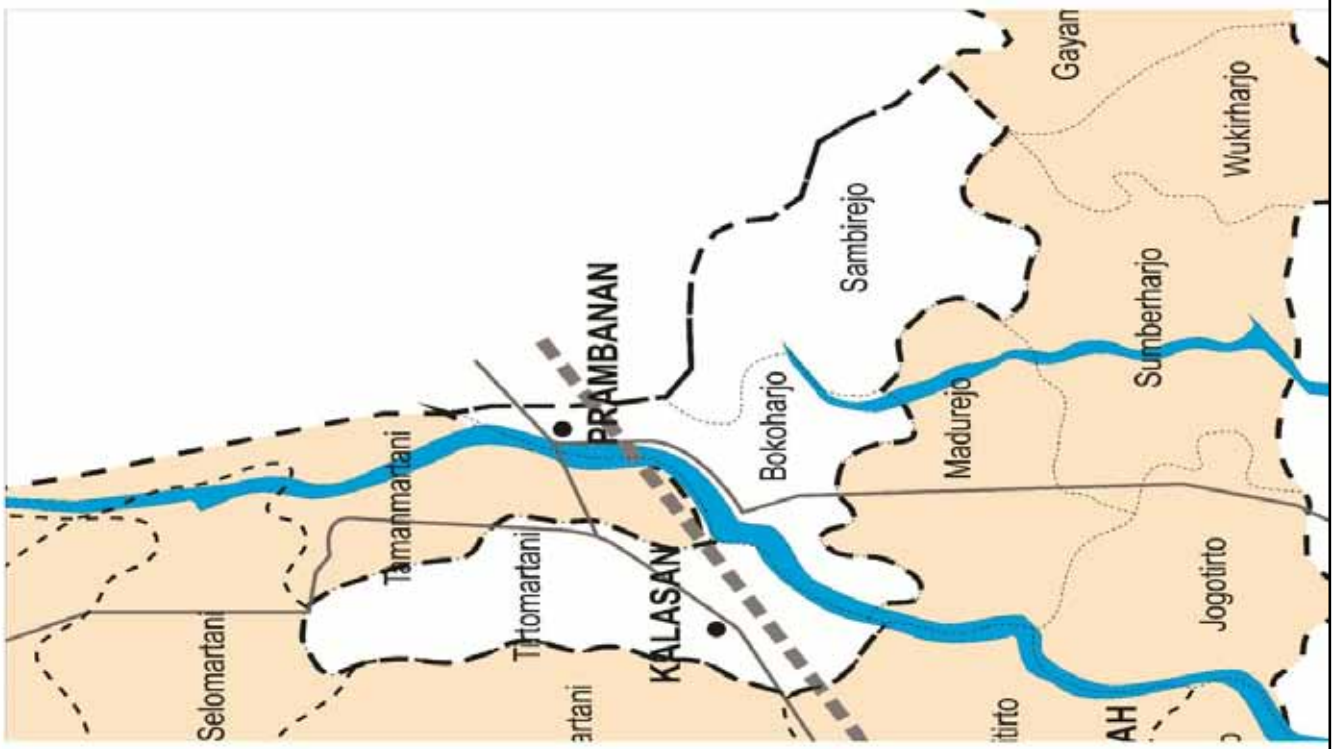


Legenda :



Sumber :
RTRW Kabupaten Sleman 2011,
Dinas Kebudayaan & Pariwisata Kab Sleman,
www.pariwisata.sleman.go.id,
Puspar UGM

PETA LOKASI STUDI



Tabel. 1
Potensi Cagar Budaya di Wilayah Kajian

Desa Tirtomartani	Desa Sambirejo	Desa Bokoharjo
Candi Kalasan Candi Kedulan Candi Sari	Candi Ijo Candi Barong Candi Dawangsari Situs Arca Gupolo	Kompleks Candi Prambanan Kompleks Kraton Ratu Boko Candi Banyunibo Candi Keblak Candi Watu Gudik

Sumber : diolah dari Laporan

Untuk Desa Sambirejo juga berada di Kecamatan Prambanan. Penduduk Desa Sambirejo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, swasta, PNS, buruh dan lainnya. Terdapat cagar budaya berupa Candi Ijo, Candi Barong, dan Candi Dawangsari yang masih terus dilakukan pemugaran oleh pihak Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Yogyakarta. Penataan dan pemugaran yang terus dilakukan tidak menyurut minat pengunjung ke Candi Ijo, terlebih tidak jauh lokasi candi ini terdapat lokasi penambangan batu Breksi. Namun, saat ini lokasi penambangan tersebut telah ditetapkan sebagai kawasan *geoheritage*, oleh Badan Geologi, Bandung. Pemerintah DIY melalui Dinas Pariwisata bahkan terus melakukan upaya pembangunan dan penataan areal tambang Breksi menjadi objek wisata yang lebih dikenal Taman Breksi. Akibatnya, pemerintah desa setempat mulai menghentikan upaya penambangannya dan sebagian penambang mulai dialihkan usaha ekonomi produktifnya ke sektor jasa pariwisata.

Desa ketiga adalah Desa Tirtomartani, yang berada di wilayah Kecamatan Kalasan, Sleman, Yogyakarta. Di desa ini terdapat tiga cagar budaya utama yaitu Candi Sari, Candi Kalasan dan Candi Kedulan. Penduduk di Desa Tirtomartani sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani, swasta, buruh tani, PNS, dan lainnya. Di sini terdapat industri rumah tangga yang berkembang yaitu ayam goreng khas Kalasan terletak di Dusun Bendan, tidak jauh dari Candi Sari.

Tabel 2
Potensi Non BCB di Wilayah Kajian

Jenis Potensi	Desa Tirtomartani	Desa Sambirejo	Desa Bokoharjo
Seni	Jathilan Wayang Orang Wayang Kulit	Wayang Kulit Jathilan Krawitan	Jathilan Wayang Kulit
Tradisi / Event	Merti Desa Gerobak Sapi	Ruwahan	
Krajinan	Ayam Goreng	Kripik Sayur Minuman Segar Batik Jumput	

ISU-ISU STRATEGIS : TEKANAN MASYARAKAT TERHADAP CAGAR BUDAYA

Pembahasan berikut mengulas fakta berupa bentuk tekanan yang dilakukan di sekitar situs. Kondisi itu terjadi tidak lain karena tuntutan untuk tetap *survive* dalam kehidupan. Tekanan ekonomi sering kali dijadikan sebagai kambing hitam untuk dijadikan alasan melegalkan tindakan yang berkontribusi mencederai lingkungan. Gambaran seperti ini masih banyak ditemukan termasuk di areal kawasan cagar budaya. Terjadinya tekanan lingkungan terhadap pelestarian cagar budaya itu muncul akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitarnya. Gejala tersebut diidentifikasi disebabkan oleh dua faktor di antaranya ulah manusia (*human error*), namun dapat

pula terjadi akibat proses alam. Seperti misalnya proses alam, berupa banjir atau tanah longsor, dapat saja bermula dari tindakan-tindakan manusia yang mengakibatkan hilangnya keseimbangan lingkungan sehingga proses alam seperti itu dapat terjadi.

Desa Sambirejo menjadi bagian Kawasan Strategis Nasional Prambanan dan sekitarnya. Aset peninggalan sejarah yang terdapat di Desa Sambirejo adalah Candi Ijo. Selain itu, terdapat pula Candi Miri, Sumur Bandung yang kesemuanya menjadi satu kesatuan sebagai sebuah cerita utuh atas sebuah kehidupan di masa lampau. Keberadaan aset *heritage* tersebut berpotensi untuk dikembangkan sebagai koridor wisata budaya dan minat khusus dalam wujud wisata edukasi arkeologi beserta jelajah perdesaan. Warisan budaya lainnya yang ada di Desa Sambirejo adalah Situs Dawangsari. Situs ini potensial dikembangkan sebagai koridor wisata budaya bersama Candi Barong ataupun dalam bentuk kegiatan wisata minat khusus pedesaan. Terdapat pula Situs Sumberwatu yang saat ini berada di dalam kawasan *Abhayagiri Villa and Resort*. Candi Ijo berada pada ketinggian 375 mdpl, sehingga pantas disebut sebagai candi tertinggi di Yogyakarta. Candi ini berada di Dusun Groyokan, Desa Sambirejo berlokasi di lereng barat sebuah bukit yang berada di selatan kawasan Ratu Boko, Sleman. Sampai saat ini areal dan kompleks Candi Ijo masih dalam tahap pemugaran. Atraksi yang diperoleh wisatawan saat bertandang ke Candi Ijo adalah menikmati keindahan arkeologis dari reruntuhan kompleks "situs permukiman" selain juga menikmati *saujana* wilayah Yogyakarta-Klaten yang penuh pesona dilihat dari perbukitan.

Hidup di dataran tinggi yang kekurangan air dan tandus tidaklah mudah, seperti Desa Sambirejo di pengunungan Batur Agung. Di saat musim kemarau desa ini selalu mengalami kekeringan khususnya bagi tanah pertanian. Lapisan tanah di Desa Sambirejo sangat tipis, didominasi batuan kapur, sehingga penduduk mengidentifikasi desa mereka sebagai "batu bertanah". Desa ini memiliki luas 839.637 ha tanah desa hanya 171.270 ha atau kurang dari 20 %

yang dapat diolah menjadi lahan pertanian pangan. Pada bagian puncak desa yakni kompleks Candi Ijo, daerah ini lebih banyak ditanami pepohonan. Wilayah Sambirejo ini dikenal sebagai daerah penghasil batu putih yang biasa disebut dengan istilah Breksi. Ratusan warga terserap di sektor ini dalam profesi yang berbeda-beda; sebagai penambang, buruh bongkar muat, sopir truk, penggergajian, dan pemahat batu. Aktivitas penambangan warga ini sudah beroperasi sejak tahun 1980. Lokasi penambangan tradisional ini berada di areal tanah kas desa. Penambangan batu breksi ini berlokasi tidak jauh dari situs kompleks Candi Ijo, Prambanan. Ancaman ke depan yang diperkirakan muncul adalah dari kegiatan pariwisata. Pemerintah Desa Sambirejo mulai merencanakan mengelola areal bekas tambang Breksi untuk menjadi objek wisata. Kondisi saat ini sudah banyak wisatawan yang berkunjung ke kompleks Candi Ijo beserta situs di sekitarnya, termasuk bekas penambangan. Ancaman ke depan yang dipandang terjadi di antaranya percepatan pertambahan penduduk dan munculnya permukiman. Situasi seperti ini berpeluang melahirkan alih fungsi lahan. Mengingat daerah ini berada pada sebuah bukit dengan lereng-lereng yang relatif curam, potensi hilangnya keseimbangan lingkungan yang dikhawatirkan berdampak pada kerusakan cagar budaya.

Situs Keraton Ratu Boko terletak di atas sebuah bukit dengan ketinggian sekitar 195.97 mdpal. Dengan ketinggian tersebut, memudahkan wisatawan melihat indahnya bentang alam Kota Yogyakarta serta eksotisnya Gunung Merapi. Situs lainnya ada terdapat di sekitar Keraton Ratu Boko adalah Candi Banyunibo. Objek ini dikelola Pemkab Sleman dan BPCB DIY mulai dikunjungi wisatawan, terutama karena letaknya tidak jauh dari Ratu Boko dan Candi Ijo. Lingkungan pedesaan yang mengitarinya juga dapat menjadi satu potensi sebagai wisata minat khusus dan pedesaan. Terdapat juga Candi Watugudig yang potensial dikembangkan sebagai atraksi budaya minat khusus pedesaan dalam kegiatan *trekking* pegunungan. Bentuk tekanan masyarakat terhadap situs Ratu Boko

di antaranya belum selesainya pemugaran situs ini karena masih terdapat batu lepas yang belum diketahui keberadaannya. Diduga masih banyak batu-batu candi yang sebagian dipergunakan untuk pondasi rumah ataupun untuk memasang tiang penyangga rumah. Kedekatan masyarakat dengan situs Ratu Boko tampak dari mudahnya warga sekitar keluar masuk melewati jalan-jalan yang belum ditutup pagar oleh pihak BPCB. Permukiman sekitar tidak dibatasi secara tegas dengan pagar atau tembok melainkan hanya dengan bebatuan atau gundukan tanah.

Adanya gunung Merapi di Yogyakarta yang juga dikenal gunung api aktif diperkirakan meletus ratusan kali. Letusan itu kadang kecil dan kadang besar. Salah satu letusan besar diperkirakan sesudah abad IX ketika Candi Prambanan telah berdiri. Akibat letusan besar terjadi "pralaya" membuat Kerajaan Mataram Hindu berpindah ke Jawa Timur. Wilayah Prambanan, yang ketika itu sudah termasuk ramai dengan keberadaan kerajaan dan banyaknya candi-candi yang terhampar di berbagai tempat, menjadi porak-poranda. Salah satu candi yang kemudian ditemukan pada tahun 1993 adalah Candi Kedulan yang berlokasi di sebelah barat Candi Prambanan, tepatnya di Dusun Kedulan, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman. Candi Kedulan yang saat ini masih dalam proses ekskavasi diproyeksikan menjadi pusat studi Volcano Arkeologi. Sampai saat ini masih ada beberapa persoalan terkait dengan pembebasan lahan milik masyarakat. Kondisi di lapangan, di sekitar kawasan situs masih ada kandang ayam milik warga, juga jalan setapak yang dijadikan lalu lalang para warga melintas. Bukan itu saja, untuk wilayah di sekitar Candi Kalasan, wujud tekanan yang ada tampak dari tata ruang permukiman saat ini sudah mendesak situs. Dinding bagian belakang beberapa rumah penduduk bahkan berbatasan langsung pagar kawat sisi selatan yang dibuat BPCB DIY. Candi Sari sebagai sebuah situs yang diperkirakan berdiri sejak abad ke-8. Candi Sari ditemukan pertama kali pada tahun 1929 dengan kondisinya yang rusak berat. Upaya pemugaran pun dilakukan dari tahun 1929 - 1930, namun ternyata

candi ini dinilai belum direstorasi sempurna. Belum utuhnya bentuk asli candi ini karena banyak bagian candi yang hilang dan dimakan usia, apalagi beberapa bagian yang bukan berasal dari batu. Khusus di wilayah sekitar Candi Sari banyak dijumpai sentra usaha "ayam goreng Kalasan" yang berpeluang diangkat sebagai *branding* untuk wilayah tersebut. Secara umum, dari Peta Zonasi Candi Kalasan, Candi Sari dan Candi Kedulan, dapat dilihat bahwa rumah-rumah penduduk masih banyak menempati tidak hanya Zona II atau Zona Penunjang, tetapi bahkan di wilayah yang termasuk Zona I.

TAHAPAN RISET-AKSI PERANCANGAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Di bagian ini dijelaskan tahapan riset aksi yang diawali dengan : (a) tahap identifikasi potensi beserta kendala yang dihadapi, (b) peluang pengembangan sumber daya, serta (c) perencanaan program pemberdayaan di setiap desa yang disepakati. Secara rinci tahapan riset aksi dan hasilnya disajikan pada penjelasan berikut terbagi dalam tiga desa sesuai lokasi *pilot project* pemberdayaan yang dijalankan.

A. Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan

1. Tahap Identifikasi Potensi dan Kendala Pengembangan

Di tahap ini kegiatan dilaksanakan dengan cara rembuk warga. Pelaksanaan rembuk warga di Balai Desa Sambirejo, Prambanan. Perwakilan peserta rembuk warga yang hadir terdiri atas : ibu-ibu kelompok usaha (KUBE), perwakilan penambang batu breksi, perwakilan Kelompok Sadar Wisata, para kepala dusun yang berlokasi dekat dengan situs Candi Ijo dan sekitarnya, perwakilan Karang Taruna, kepala dan sekretaris desa Sambirejo. Bapak Mujimin, selaku kepala desa dalam sambutannya menyatakan terdapat potensi wisata di Sambirejo, selain Candi Ijo yang sudah ada sejak lama. Potensi belum lama ini muncul dan mulai ramai karena sudah dikunjungi

pengunjung. Keberadaan “Taman Breksi” sebutan objek baru yang ada di Sambirejo tersebut dahulunya adalah areal yang ditambang warga untuk mengais rejeki. Lokasi tersebut adalah tanah bengkok kepala desa. Namun semenjak ditetapkan pihak Kementerian Sumber daya Alam dan Mineral kawasan tersebut sebagai salah satu cagar geologi, maka secara perlahan pengusahaan tambang tradisional tersebut mulai dihentikan. Sebagai konsekuensinya sebagian warga penambang yang bergantung hidupnya dari areal baru breksi tersebut akan coba dilibatkan dalam kegiatan pariwisata dan di pihak lain pengembangan potensi lainnya di Desa Sambirejo juga diharapkan dapat diolah untuk mendukung magnet wisata lainnya di Sambirejo, selain Candi Ijo dan taman breksi tersebut.

Para peserta rembug warga menyebutkan bila di desa mereka memiliki banyak potensi namun masih terpencar dan belum dikelola secara optimal. Beberapa kegiatan pelatihan dan pemberdayaan bagi warga juga pernah diberikan oleh pihak lain, namun tidak semuanya dapat diteruskan oleh masyarakat dikarenakan satu dan lain hal. Gambaran potensi dan kendala yang dijumpai di wilayah Desa Sambirejo, secara ringkas dapat dicermati pada tabel berikut.

Tabel. 3
Identifikasi Potensi dan Kendala Desa Sambirejo

Potensi	Jenis Potensi	Fakta Kondisi Eksisting
Alam	Landscape kawasan Siwa Plateau	Jalan (akses) ke objek di beberapa bagian rusak dan terjal Kendala air bersih jika musim kemarau Secara umum daerahnya gersang dan panas di musim kemarau
	Taman Breksi	Sebagai “objek” baru, belum ada penataan areal objek Belum tersedia kelengkapan pendukung wisata Aspek keamanan di objek yang belum diantisipasi Masih terdapat kegiatan penambang di areal yang sudah ditetapkan
Budaya (tangible/ intangible)	Candi Ijo	Objeknya belum dikenal luas oleh publik, akses ke objek rusak dan terjal
	Candi Barong	Belum diolah/dikemas dalam paket dengan candi-candi lain di sekitarnya
Kesenian	Seni tradisional : wayang, kethoprak	Ada potensi, namun kelengkapan serta sarana pendukung kegiatan perlu ditingkatkan, termasuk peluang untuk pentas di sekitar objek
Kerajinan	Seni Pahat Batu	Produksi hiasan batu hitam/putih belum dikembangkan sebagai Suvenir khas Sambirejo
	Seni Batik Jumput	Sudah mendapatkan pelatihan dari pihak lain (UNESCO) dan tinggal untuk pengembangan lebih lanjut
	Kuliner : - Makanan : Keripik berbahan Sayur	Memproduksi untuk dijual ke pasar tradisional ataupun di ambil pengumpul. Belum ada kemasan untuk oleh-oleh khas Sambirejo
	- Minuman segar berbahan empon-empon	Belum dikembangkan secara massal dan serius, hanya menerima pesanan. Tidak banyak warga yang meneruskan usaha ini meski sudah pernah diberi pelatihan.

Sumber : diolah dari rembug warga, 2015

2. Peluang Pengembangan Potensi di Desa Sambirejo

Dari hasil pertemuan bersama warga Sambirejo, tampak ada semangat dan motivasi dalam rangka pengembangan objek baru yaitu “Taman Breksi”. Motivasi itu mendorong warga desa untuk mengupayakan segenap potensi yang sebelumnya pernah dimiliki atau yang saat ini sudah dikembangkan untuk dapat lebih ditingkatkan. Mulai dari potensi seni budaya tradisional yang masih dijalani warga juga kegiatan ekonomi kreatif yang sehari-hari dijadikan sebagai sumber penghidupan. Sektor pariwisata dinilai strategis untuk memicu peluang bagi pemberdayaan yang kelak dapat dimanfaatkan masyarakat Desa Sambirejo, khususnya kalangan generasi muda agar mereka tidak meninggalkan desa untuk bekerja di daerah lainnya. Dari pertemuan bersama warga juga dapat diperoleh gambaran peluang pengembangan menurut warga setempat terkait dengan potensi yang tersedia dan kemungkinan pengembangan ke depan yang diharapkan dapat diwujudkan.

Tabel 4
Peluang Pengembangan Potensi Desa Sambirejo

Potensial Atraksi / Objek	Peluang Pengembangan
Landscape Alam dan Taman Breksi & kaitannya dengan situs cagar budaya lainnya	- Penataan kawasan, khususnya di areal kedatangan, parkir, MCK, musala, dan warung - Penataan jalur naik turun ke tebing Breksi dengan mempertimbangkan aspek keamanan yang tinggi - Penambahan rambu informasi di bagian puncak Breksi, khususnya pada lokasi-lokasi yang dipandang mudah longsor - Penambahan fasilitas minimal (peneduh, tempat duduk) di puncak Breksi untuk menambah nyaman pengunjung - Pengemasan paket <i>one day tour</i> ataupun paket <i>live in</i> di Desa Sambirejo dengan mengemas aset yang tersedia
Seni tradisional : wayang, kethoprak	- Formalisasi lembaga kesenian untuk memperoleh Nomor Induk Kesenian (NIK) guna memudahkan mendapatkan pembinaan dari dinas terkait. - Mendorong kesempatan untuk tampil dan pentas di objek khususnya saat Sabtu dan Minggu atau sesuai kebutuhan.
Seni Batik Jumput	- Pengembangan motif Batik Jumput sesuai karakter lokal - Pengembangan desain produk batik Jumput yang dapat dijangkau pengunjung sebagai souvenir khas Sambirejo
Kuliner : Makanan : Keripik berbahan Sayur	- Pengemasan keripik berbahan sayur dalam kemasan yang menarik dan dapat diangkat sebagai oleh-oleh khas Sambirejo - Pembangunan/pendirian kios makanan di sekitar objek yang menampung olahan produk warga Sambirejo
Minuman segar empon-empon	- Penyediaan fasilitas agar pengunjung dapat membeli minuman segar - Pengemasan dalam bentuk <i>sachet</i> untuk buah tangan pengunjung yang memerlukannya - Mendorong produk lokal mendapatkan label halal dan ijin Balai POM

Sumber : diolah dari hasil rembug warga, 2015

3. Perancangan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sambirejo

Berpijak dari potensi serta peluang pengembangan yang sangat mungkin dikembangkan di Desa Sambirejo, selanjutnya secara partisipatif, tim bersama masyarakat berhasil menyusun rancangan program pemberdayaan masyarakat Desa Sambirejo, seperti yang diperlihatkan di tabel berikut.

Tabel 5
Rancangan Program Pemberdayaan di Desa Sambirejo

Bidang	Sasaran	Detail Kegiatan Pemberdayaan	Pihak Terkait
Hukum	Masyarakat Desa Sambirejo	Pelatihan peningkatan kapasitas masyarakat tentang cagar budaya (sosialisasi UU dan pemanfaatan potensi BCB untuk wisata)	Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
Kelembagaan	Wakil masy dan calon Pokdarwis	Bimtek kelembagaan POKDARWIS (materi POKDARWIS dan dasar SADAR WISATA) dan aspek Kebudayaan	Puspar UGM
Kepariwisata	Pelaku Wisata, Pokdarwis Aparat Desa	1. Bimtek pengemasan wisata minat khusus Geologi dan Heritage 2. Bimtek pengelolaan kawasan wisata (pembuatan paket, manajemen destinasi, dll) 3. Bimtek Pemanduan dan SAR 4. Pelatihan Bahasa Inggris 5. Pelatihan pengelolaan <i>homestay</i> 6. Bimtek Pemasaran Pariwisata Desa	Dinas ESDM DIY, Kab Sleman dan Praktisi Pemandu Puspar UGM Praktisi SAR Puspar UGM Puspar UGM Puspar UGM
Ekonomi Kreatif	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Masyarakat Desa	1. Pelatihan Suvenir (bahan limbah batu) 2. Pelatihan Suvenir (bahan kain batik jumpit) 3. Pelatihan Kuliner (produksi dan pengemasan produk) 4. Pelatihan Batik	Praktisi / Seniman Praktisi batik Jumpit Praktisi Kuliner
Seni Budaya	Pelaku Kesenian Pelaku Wisata	1. Pengembangan Kelompok Kesenian 2. Bimtek Manajemen Event	Dinas Kebudayaan DIY Bidang Kesenian Kab Sleman
Kewirausahaan	Pelaku Wisata Pelaku Usaha	1. Pelatihan Kewirausahaan 2. Pelatihan Pelayanan Prima (warung, rumah makan, <i>homestay</i>, area parkir, dan pemandu wisata)	Praktisi Wirausaha Pelaku Usaha

Sumber : analisis studio, diolah dari rembug warga, 2015

B. Desa Bokoharjo, Kecamatan Prambanan

1. Tahap Identifikasi Potensi dan Kendala Pengembangan

Rembug warga Desa Bokoharjo dilaksanakan di Balai Desa Bokoharjo, Prambanan. Kegiatan diikuti perwakilan peserta yang terdiri atas : perwakilan desa wisata Plempoh, perwakilan warga dari 3 dusun (Dusun Gatak, Dusun Cepit dan Dusun Dawung), Pelaku kesenian dan perangkat desa. Pertemuan dibuka PLH Kepala Desa Bokoharjo. Pada kesempatan tersebut Kepala Desa Bokoharjo menyampaikan keinginan pengembangan pariwisata di lingkungan sekitar Ratu Boko untuk dapat lebih ditingkatkan sebagai salah satu peluang ekonomi bagi masyarakat, mengingat selama ini pariwisata belum dirasakan secara langsung masyarakat sekitar. Keberadaan situs Ratu Boko sebagai salah satu warisan bersejarah menjadi salah satu *ikon* bagi wilayah Sleman khususnya dan bagi DIY pada umumnya, namun seperti yang diungkapkan sebagian warga bahwa pengelolaan candi yang dilakukan PT Taman Wisata Prambanan Ratu Boko, menurut mereka belum banyak memberikan dampak dan pelibatan masyarakat. Namun demikian hal itu juga diakui sebagai akibat dari adanya minimnya keterampilan warga. Selama ini warga masyarakat di sekitar kawasan memang banyak memiliki keterampilan dalam mengolah

berbagai macam sumber daya alam yang dimiliki, seperti buah mangga, ubi, gadung dan lain lain. Untuk itu peningkatan SDM dalam hal ini pelatihan keterampilan sangat dibutuhkan masyarakat sekitar.

Peserta rembug warga menyadari bahwa sebenarnya potensi yang dimiliki Desa Bokoharjo tidak kalah dengan daerah lain seperti halnya dengan kesenian, salah satu contohnya adalah kesenian Srandul. Kesenian ini termasuk jenis drama tari, yang menampilkan ceritera rakyat yang tidak terbatas pada kisah tokoh tokoh tertentu saja. Untuk mementaskan pertunjukan Srandul dibutuhkan pendukung sebanyak kurang lebih 15 orang, yaitu 6 orang untuk menjadi pemusik dan 9 orang menjadi pemain. Di samping potensi kesenian, sumber daya pendukung lainnya yang belum diolah warga Bokoharjo, seperti halnya kerajinan diharapkan dapat diolah agar mampu diangkat menjadi salah satu souvenir khas Bokoharjo. Seperti halnya upaya salah seorang warga Bokoharjo yang hendak mengolah limbah kayu ataupun limbah batu andesit yang berasal dari tetangga desa untuk dirubah menjadi sebuah produk kerajinan. Berikut diberikan hasil identifikasi potensi dan kendala menurut warga setempat, seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 6
Identifikasi Potensi dan Kendala Pengembangan Desa Bokoharjo

Potensi	Jenis Potensi	Fakta Kondisi Eksisting
Alam	Landscap kawasan Ratu Boko	Jalan (akses) ke objek di beberapa bagian rusak dan terjal
Budaya (tangible/ intangible)	Kompleks Keraton Ratu Boko Candi Banyunibo	Kompleks Keraton Ratu Boko saat ini dikelola Taman Wisata Candi Banyunibo merupakan candi yang terletak di tengah hamparan sawah dan terletak di Dusun Cepit.
Kesenian	Seni tradisional : srandul, campursari	Ada potensi, bahkan gamelan juga sudah ada tetapi dari sisi kelembagaan perlu ditingkatkan. Bahkan beberapa kali sudah di tampilkan di objek wisata.
Kerajinan	Bahan limbah kayu, batuan andesit	Belum ada yang mengembangkan baik itu kuliner maupun benda kerajinan.

Sumber : diolah dari rembug warga Desa Bokoharjo, 2015

2. Peluang Pengembangan Potensi di Desa Bokoharjo

Ketersediaan kompleks Ratu Boko, semestinya mampu memberikan peluang sekaligus tantangan bagi warga Bokoharjo agar dapat lebih berdaya di wilayah mereka sendiri. Keberdayaan ini mestinya harus tumbuh dengan dorongan dan semangat untuk maju dan berubah. Upaya untuk meraih hal tersebut memerlukan kejelian dalam melihat peluang yang dapat dikembangkan ke depan. Berdasarkan rembug warga desa, diperoleh beberapa gagasan peluang pengembangan yang sekiranya dapat dikerjakan warga Bokoharjo.

Tabel 7
Peluang Pengembangan Potensi Desa Bokoharjo

Potensial Atraksi / Objek	Peluang Pengembangan Potensi
Kawasan perdesaan sekitar Ratu Boko	- Pengemasan paket <i>one day tour</i> & paket <i>live in</i> di Desa Bokoharjo dengan mengemas aset yang tersedia
Seni tradisional	- Formalisasi lembaga kesenian untuk memperoleh Nomer Induk Kesenian (NIK) guna memudahkan mendapatkan pembinaan dari Dinas terkait. - Mendorong kesempatan untuk tampil dan pentas di objek khususnya saat Sabtu dan Minggu atau sesuai kebutuhan.
Kuliner khas	- Pengembangan olahan makanan dan minuman khas Bokoharjo untuk dapat ditawarkan di sekitar objek wisata

Sumber: diolah dari hasil rembug warga, 2015

3. Perancangan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Bokoharjo

Berpijak dari potensi serta peluang pengembangan yang sangat mungkin dikembangkan di desa Bokoharjo, selanjutnya secara partisipatif, tim bersama masyarakat berhasil menyusun rancangan program pemberdayaan masyarakat Desa Bokoharjo, seperti yang diperlihatkan di tabel berikut.

Tabel 8
Rancangan Program Pemberdayaan di Desa Bokoharjo

Bidang	Sasaran	Detail Kegiatan Pemberdayaan	Pihak Terkait
Hukum	Masyarakat desa	1. Pelatihan pengembangan wisata berbasis cagar budaya (sosialisasi UU dan pemanfaatan potensi BCB untuk wisata) 2. Bimtek Pengetahuan atas Benda Cagar Budaya kawasan Ratu Boko dan sekitarnya	Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
Kepariwisata	Pengelola Desa Wisata Aparat Desa	1. Bimtek kelembagaan POKDARWIS (materi POKDARWIS dan dasar SADAR WISATA) 2. Bimtek Penyusunan Paket Wisata 3. Bimtek Kepemanduan 4. Pelatihan Bahasa Inggris Pariwisata 5. Bimtek Pemasaran Pariwisata Desa	Puspar UGM Praktisi Pemandu Puspar UGM
Ekonomi Kreatif	Ibu-Ibu Kelompok Perajin / Kuliner	1. Pelatihan Suvenir (berbahan limbah batu) 2. Pelatihan Kuliner (produksi dan pengemasan produk) 3. Pelatihan Batik	Praktisi kerajinan
Seni Budaya	Pelaku Kesenian Pelaku Wisata	1. Pengembangan Kelompok Kesenian 2. Bimtek Manajemen Event	Praktisi Event
Kewirausahaan	Ibu-Ibu Kelompok Perajin / Kuliner Pelaku Wisata, Pelaku Kesenian	1. Pelatihan Kewirausahaan 2. Pelatihan Pelayanan Prima	Praktisi Wirausaha

Sumber: diolah dari hasil rembug warga, 2015

C. Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan

1. Tahap Identifikasi Potensi dan Kendala Pengembangan

Rembug warga Desa Tirtomartani dilaksanakan di sebelah timur Candi Sari. Hadir pada kesempatan itu perwakilan dari 3 Dusun (Dusun Kedulan, Dusun Kalibening, Dusun Bendan), pelaku kesenian dan perangkat desa (Kepala Desa dan Sekretaris Desa Tirtomartani). Diketahui bersama bila Keberadaan Desa Tirtomartani dengan segita tiga “pusaka” nya memang mampu menarik minat wisatawan. Ketiga “pusaka” tersebut yakni Candi Kalasan, Candi Kedulan, dan Candi Sari dengan segala pesona dan cerita yang terkandung di dalamnya. Masih ada potensi lainnya di Tirtomartani yang berpeluang dikembangkan sebagai pendukung cagar budaya tersebut. Beragam jenis dan potensi yang dapat dikemas seperti kesenian, kerajinan, maupun kegiatan kemasyarakatan untuk menjadikan Desa Tirtomartani sebagai salah satu daya tarik wisata.

Namun demikian, masih terdapat kendala yang dirasakan dan dihadapi warga desa dalam mengembangkan aneka ragam potensi. Lebih lanjut tentunya peluang apa saja yang dapat dikembangkan atas potensi yang telah tersedia. Bagaimana caranya menahan wisatawan yang sudah bersedia datang ke Tirtomartani? Termasuk bagaimana halnya dengan pengemasan paket wisata? Atraksi apa saja yang ada sehingga mampu dimasukkan dalam paket wisata? Ini merupakan peluang bagi masyarakat Tirtomartani yang

kaitannya dengan cagar budaya karena letaknya yang strategis sehingga memudahkan wisatawan untuk berkunjung di ketiga “pusaka” tersebut. Dari hasil rembug warga, kesadaran potensi tampaknya sudah dimiliki sebagian warga, dan bahkan sudah ada yang menjadi pelaku wisata, meskipun belum memberikan dampak pada tetangga kanan kirinya. Berikut secara detail hasil identifikasi potensi dan kendala yang dirasakan warga Tirtomartani, Kalasan.

Tabel 9
Identifikasi Potensi dan Kendala Desa Tirtomartani

Potensi	Jenis Potensi	Fakta Kondisi Eksisting
Alam	Sendang Ayu	Sedang Ayu merupakan sumber air yang ada di Dusun Bendan dan sudah banyak dikenal oleh masyarakat luas. Di setiap Selasa dan Jumat Kliwon banyak warga luar daerah yang melakukan ritual di sendang. Sampai saat ini potensi ini belum dikembangkan sebagai salah satu daya tarik wisata.
Budaya (tangible/ intangible)	Candi Kedulan	Belum dioleh/dikemas dalam paket dengan candi-candi lain di sekitarnya.
	Candi Kalasan	Sudah ada wisatawan yang secara regules mengunjungi Candi Kalasan dan Candi Sari
	Candi Sari	<i>Event</i> budaya “grebeg ayam goreng” sudah menjadi <i>event</i> tahunan dan antusias warga sangat tinggi. Biasanya pada <i>event</i> ini potensi seni setiap padukuhan ditampilkan.
	Ritual Grebeg Ayam Goreng	
Kesenian	Tari tarian Karawitan Jathilan Ketoprak Bergodo	Di dusun Bendan terdapat sanggar tari. Potensi kerajinan hamper di setiap dusun ada tetapi belum dibuat atau dikemas menjadi sebuah pertunjukan yang layak di tampilkan dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana.
Kerajinan	Kerajinan	Belum ada yang mengembangkan produk kerajinan
	Kuliner : (ayam goreng)	Belum ada kemasan oleh-oleh khas Tirtomartani, selain Ayam Goreng

Sumber : diolah dari rembug warga, 2015

2. Peluang Pengembangan Potensi di Desa Tirtomartani

Rencana pemerintah DIY melakukan pengembangan wilayah Kalasan khususnya sekitar Candi Kedulan untuk dijadikan museum *archo volcanoes* merupakan hal yang strategis. Sementara untuk wilayah Candi Kalasan dilakukan penataan dengan cara memindahkan beberapa pemukiman yang saat ini menutup wajah candi dari depan. Hal itu di tempuh untuk memperlihatkan candi dari jalan raya. Upaya awal yang dijalankan lewat rembug warga dimaksudkan untuk menyadarkan sekaligus mengajak masyarakat Tirtomartani untuk mengolah potensi serta menangkap peluang yang berdampak positif . Berikut peluang ke depan yang memungkinkan dikembangkan di wilayah Tirtomartani.

Tabel 10
Peluang Pengembangan Potensi Desa Tritomartani

Potensial Atraksi / Objek	Peluang Pengembangan Potensi
Situs cagar budaya : Candi Kalasan, Candi Kedulan Candi Sari	- Penataan kawasan, khususnya di areal kedatangan, parkir, MCK, musala, dan warung. - Penambahan rambu informasi wisata di tiga kawasan pusaka. - Penambahan fasilitas minimal guna menambah kenyamanan pengunjung. - Pengemasan paket <i>one day tour</i> & paket <i>live in</i> di Desa Tritomartani dengan mengolah aset yang tersedia.
Seni tradisional	- Formalisasi lembaga kesenian untuk memperoleh Nomor Induk Kesenian (NIK) guna memudahkan mendapatkan pembinaan dari dinas terkait. - Mendorong kesempatan untuk tampil dan pentas di objek khususnya saat Sabtu dan Minggu atau sesuai kebutuhan.
Atraksi Budaya	- Menjadikan grebeg Ayam Goreng sebagai acara tahunan desa yang didukung seluruh pedukuhan dan pemerintah serta swasta. - Menjadikan festival Gerobag Sapi sebagai salah satu alternatif daya tarik penunjang di kawasan Tirtomartani.
Kuliner : Makanan & Minuman Khas	- Pembangunan/pendirian kios makanan di sekitar objek yang menampung olahan produk warga Tirtomartani. - Penyediaan fasilitas penunjang makan dan minum yang nyaman, aman bagi wisatawan. - Pengembangan produk lokal untuk mendapatkan label halal dan izin dari Balai POM.

Sumber : diolah dari hasil rembug warga, 2015



Bimbingan teknis di Desa Tirtomartani

3. Perancangan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Tirtomartani

Berpijak dari potensi serta peluang pengembangan yang sangat mungkin dikembangkan di Desa Tirtomartani, selanjutnya secara partisipatif, tim bersama masyarakat berhasil menyusun rancangan program pemberdayaan masyarakat Desa Tirtomartani, seperti yang diperlihatkan di tabel berikut.

Tabel 11
Rancangan Program Pemberdayaan di Desa Tirtomartani

Bidang	Sasaran	Detail Kegiatan Pemberdayaan	Pihak Terkait
Hukum	Masyarakat desa	1. Pelatihan pengembangan wisata berbasis cagar budaya (sosialisasi UU dan pemanfaatan potensi BCB untuk wisata) 2. Bimtek Pengetahuan atas Benda Cagar Budaya kawasan Candi Kedulan, Candi Sari dan Candi Kalasan	Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta
Kepariwisata	Pengelola Wisata Aparat Desa	1. Bimtek kelembagaan POKDARWIS (materi POKDARWIS dan dasar SADAR WISATA) 2. Bimtek Kepariwisata Dasar 3. Bimtek Penyusunan Paket Wisata 4. Bimtek Kepemanduan 5. Bimtek pengelolaan <i>homestay</i> 6. Pelatihan Bahasa Inggris Pariwisata	Puspar UGM Praktisi Pemandu
Ekonomi Kreatif	Kelompok Kuliner	1. Pelatihan Kuliner (Pengemasan) 2. Pelatihan Suvenir 3. Pelatihan Batik	Praktisi Kuliner
Seni Budaya	Pelaku Kesenian Pelaku Wisata	1. Pengembangan Kelompok Kesenian 2. Bimtek Manajemen <i>Event</i>	Praktisi <i>Event</i>
Kewirausahaan	Ibu-Ibu Kelompok Perajin / Kuliner Pelaku Wisata, Pelaku Kesenian	1. Pelatihan Kewirausahaan 2. Pelatihan Pelayanan Prima	Praktisi Wirausaha

Sumber : diolah dari hasil rembug warga, 2015

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Kajian yang dilakukan BPCB DIY bekerja sama dengan Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada merupakan dasar utama dalam menentukan program-program untuk masyarakat di ketiga desa. Kajian tersebut mencerminkan proses pemberdayaan masyarakat yang mengadopsi *konsep community based development* dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Proses tersebut bersifat *bottom-up* dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dan permasalahan yang dihadapi masyarakat terkait dengan keberadaan cagar budaya. Dengan demikian, penyusunan program dilakukan atas inisiatif dan kepentingan masyarakat.

Tiga aspek utama yang dikembangkan secara bertahap dipilih berdasarkan kajian tersebut. Pertama adalah persoalan pemahaman masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pemahaman ini penting mengingat dasar hukum semua aktivitas yang terkait dengan cagar budaya telah diatur dalam undang-undang tersebut. Aspek pelestarian ini diberi judul: **Bimbingan Teknis Apresiasi dan Interpretasi Kawasan Cagar Budaya**. Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangun peran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya yang sesuai dengan amanah Undang - Undang No.11 Th. 2010 tentang Cagar Budaya. Kedua adalah persoalan pemahaman masyarakat mengenai peran penting kelembagaan dan aspek-aspek kepariwisataan. Program yang diselenggarakan adalah pendampingan dalam pembentukan lembaga berbadan hukum agar dapat memperkuat posisi mereka dalam pengembangan potensi cagar budaya dan lingkungannya sebagai objek pariwisata budaya. Aspek kepariwisataan ini diberi judul: **Bimbingan Teknis Kelembagaan dan Kepariwisataan**. Tujuannya adalah untuk mendorong kesadaran masyarakat mengenai pentingnya aspek kelembagaan dan kepariwisataan

terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya dan potensi budaya yang ada, sehingga secara politik masyarakat mempunyai kapasitas dalam menentukan hak dan kewajibannya dalam pengelolaan cagar budaya. Ketiga adalah pemberian bekal kepada masyarakat berupa keahlian dan keterampilan tertentu yang akan dimanfaatkan untuk terlibat dalam usaha-usaha perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Tujuannya adalah memberi bekal keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan masyarakat sebagai modal utama dalam memanfaatkan pengembangan pariwisata budaya. Jenis pelatihan teknis dapat dikategorikan ke dalam empat jenis pelatihan: **Pelatihan Membatik, Pelatihan Membuat Suvenir, Pelatihan Kuliner, dan Pelatihan Pemandu Wisata dan Pengembangan Usaha Perjalanan Pariwisata Budaya**. Ketiga sasaran di atas dapat disederhanakan dalam bagan berikut, yang juga mencerminkan tahapan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ini:



Untuk menjalankan program-program tersebut, kerja sama dengan tokoh utama dalam masyarakat di ketiga desa, termasuk perangkat desa dan dusun, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, dan juga tokoh-tokoh perempuan perlu dilaksanakan. Untuk kegiatan yang sifatnya sosialisasi atau transfer pengetahuan dan pemahaman tentang implementasi undang-undang tentang cagar budaya, kelembagaan dan kepariwisataan, tokoh-tokoh desa ini dilibatkan dan dijadikan peserta utama. Sementara untuk kegiatan-kegiatan pelatihan, tokoh-tokoh desa tersebut melalui Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang telah terbentuk seiring dengan proses kajian

dan sosialisasi berlangsung diminta pertimbangannya dalam menentukan orang-orang di ketiga desa yang dianggap potensial untuk berkembang apabila diberikan pelatihan-pelatihan teknis untuk mengembangkan keahlian dan keterampilan. Tentu saja, kriteria umumnya tetap ditentukan oleh fasilitator, yaitu sebagai berikut:

1. Pelatihan membatik dengan motif-motif khas candi dan pengembangan kuliner berbasis potensi bahan lokal diprioritaskan untuk perempuan yang dianggap telah memiliki potensi pada bidang keahlian dan keterampilan ini. Namun laki-laki yang tertarik dapat diikutsertakan.
2. Pelatihan membuat souvenir diprioritaskan untuk laki-laki, khususnya anak-anak muda. Namun pokdarwis di ketiga desa disarankan tetap menyertakan peserta perempuan apabila ada yang tertarik untuk mengikuti pelatihan ini.
3. Pelatihan menjadi pemandu wisata dan pembuatan paket-paket wisata disarankan memprioritaskan peserta-peserta yang masih berusia muda, baik laki-laki maupun perempuan.



Kegiatan pelatihan batik

Pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan selalu melibatkan ahli-ahli yang kompeten di bidangnya masing-masing dan melibatkan juga institusi-institusi terkait, antara lain:

1. Pada kegiatan sosialisasi undang-undang cagar budaya, untuk mendorong apresiasi dan interpretasi peserta terhadap cagar budaya, narasumber yang memberikan materi adalah arkeolog dari Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY.
2. Pada pelatihan tentang kelembagaan dan kepariwisataan, narasumbernya adalah ahli pariwisata dari Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada.
3. Pada pelatihan membatik tingkat dasar, kerja sama dilakukan dengan ahli batik dari Institut Seni Indonesia (ISI) Yogyakarta. Ahli dari ISI Yogyakarta ini telah melakukan penelitian dan pengembangan motif batik dari motif-motif yang terdapat pada beberapa candi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sementara untuk pelatihan membatik tingkat lanjut, dilakukan kerja sama dengan Balai Besar Batik Yogyakarta dan kelompok perajin batik Kebon Indah di Klaten, Jawa Tengah.
4. Pelatihan membuat cetakan souvenir melibatkan salah satu praktisi di bidang ini, yaitu Bapak Lukito, seorang konservator pensiunan pegawai negeri sipil di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY yang kemudian menggeluti dunia usaha pembuatan souvenir, sedangkan pelatihan membuat master souvenir melibatkan dosen dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
5. Pelatihan kuliner bekerja sama dengan Jurusan Tata Boga Universitas Negeri Yogyakarta untuk memberikan pelatihan kepada peserta, untuk mengolah makanan tradisional sesuai dengan potensi bahan lokal.
6. Pelatihan pemandu dan pembuatan paket-paket wisata, narasumber yang dilibatkan adalah guide senior dari organisasi Himpunan Pemandu Indonesia (HPI) Yogyakarta.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan cagar budaya merupakan kegiatan yang berkelanjutan dan akan terus diperluas mencakup pelbagai daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki potensi cagar budaya. Sebagai tahap awal pada tahun 2015, kegiatan ini melibatkan tiga desa di dua kecamatan di dalam Kawasan Strategis Nasional Candi Prambanannya itu Desa Sambirejo dan Desa Bokoharjo di Kecamatan Prambanan yaitu Desa Tirtomartani di Kecamatan Kalasan. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di ketiga desa ini baru dilakukan pertama kali dan diharapkan sebagai *pilot project* yang modelnya akan diterapkan pada desa-desa lainnya. Tinggalan – tinggalan yang

ada dari diketiga desa ini berpotensi dikembangkan sebagai objek wisata budaya alternatif. Di samping itu, masyarakatnya memiliki cukup banyak tradisi, keunikan dan potensi budaya yang dapat diintegrasikan dengan pengembangan cagar budaya sebagai objek wisata budaya.

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di ketiga desa tersebut merupakan tahap awal yang akan terus dievaluasi, kemudian dilanjutkan dan diperbaiki pada tahun-tahun berikutnya. Dalam menjalankan program-program tersebut, dialog dan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di ketiga desa terus dilaksanakan agar diperoleh hasil yang optimal dan tepat sasaran.



Kegiatan pelatihan batik



Kegiatan pelatihan batik jumputan



Kegiatan pelatihan batik



Kegiatan pelatihan kuliner



Kegiatan pelatihan membuat suvenir

PENUTUP

Pilot project pada tiga desa di sekitar Prambanan dan Kalasan Yogyakarta telah mampu menghasilkan rancangan program pemberdayaan. Meminjam kutipan berikut, *"Kita harus melestarikan sumber daya itu jika kita ingin mengambil manfaat darinya, kita harus mempelajarinya jika ingin memahami manfaat yang dapat kita peroleh dan kita harus menerjemahkan pengetahuan yang kita peroleh untuk masyarakat. Jadi, dari masyarakatlah proses pelestarian ini berawal dan kepada merekalah semua harus diserahkan"*, demikian disampaikan Dickens dan Hill (Tanudirdjo, 2003) dalam rangka pengelolaan benda cagar budaya, memberikan pemahaman bahwa menempatkan masyarakat sekitar situs dalam kerangka penyusunan perencanaan adalah suatu keharusan. Tekanan masyarakat yang dilakukan disekitar kawasan cagar budaya harus dikurangi dengan cara mengalihkan kepada ekonomi produktif lainnya.

Melalui riset-aksi yang dilaksanakan bersama masyarakat, kajian ini telah menghasilkan (i) identifikasi potensi kawasan dan bentuk tekanan yang ditimbulkan oleh masyarakat, (ii) identifikasi program pemberdayaan yang dibutuhkan masyarakat sekitar kawasan cagar budaya Prambanan. Sebagai tindak lanjutnya, program pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan BPCB DIY mulai tahun 2015. Pada tahun 2016 program pemberdayaan masih dilanjutkan dengan beberapa kegiatan sesuai dengan rekomendasi

hasil pemberdayaan tahap pertama. Beberapa kegiatan lanjutan yang direkomendasikan dilaksanakan adalah : (a) Peningkatan kapasitas pemanduan bagi guide lokal, (b) Penguatan organisasi pengelola wisata budaya yang berbadan hukum, (c) Peningkatan keterampilan dalam pengemasan produk kuliner, (d) Peningkatan keterampilan perajin batik alam bermotif candi, (e) Pengembangan materi promosi wisata budaya, serta (f) Peningkatan kapasitas melalui studi banding di Candi Sukuh Karanganyar, Jawa Tengah. Pada tahap berikutnya program masih terus dilanjutkan sampai masyarakat mampu secara politik ekonomi sosial budaya dalam pengelolaan cagar budaya sesuai amanat Undang-Undang Cagar Budaya

DAFTAR PUSTAKA

- Alfitri. 2011. *Community Development : Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Santosa, Imam., 2014. *Pengembangan Masyarakat berbasis Sumber Daya Lokal*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama : Bandung.
- Sulstyanto, Bambang. 2003. *Balung Buto : Warisan Budaya Dunia dalam Perspektif Masyarakat Sangiran*. Kunci Ilmu : Yogyakarta.
- Tanudirdjo, Daud. 1998. " Cultural Resource Management as Conflict Management", *Artefak Magazine* No. 19, pp : 14-18.
- Mardikanto, Totok dan Poerwoko Soebiato.2013. *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung.

BATIK CANDI

Motif Batik Bersumber Pada Unsur Dekoratif Candi dan Arca di Prambanan dan Sekitarnya¹

Oleh :
Sugeng Riyanto*

1. PENDAHULUAN

Makalah ini didasarkan pada hasil penelitian aplikatif arkeologi dengan menempatkan ragam hias pada bangunan candi dan arca di Prambanan dan sekitarnya sebagai data untuk digali menjadi potensi dekoratif dalam kerajinan batik. Unsur dekoratif yang dimaksud di sini adalah relief yang dipahat pada bagian-bagian tertentu sebagai elemen penghias bangunan candi yang terbagi menjadi relief cerita (naratif) dan relief noncerita (Istari, 2015: 3-4). Bagian-bagian bangunan yang biasanya dipahat untuk keperluan itu adalah pelipit, panil, dan pilaster. Pelipit berbentuk bingkai-bingkai horizontal yang mengelilingi candi baik pada kaki, tubuh, maupun atap (Dumarcay, 2007: 92). Panil atau juga disebut bidang hias merupakan media utama dalam pahatan relief, biasanya berupa hiasan geometris, sulur, daun, bunga, atau adegan dalam cerita tertentu (Ayatrohaedi, et al., 1981: 15-16). Pilaster sebenarnya cenderung memiliki aspek teknis, yaitu sebagai penopang bangunan dan biasanya ada di sudut-sudut candi, namun sering kali juga ada pilaster yang menempel pada bagian luar dinding candi yang hanya memiliki sisi estetika saja (Ayatrohaedi, et al., 1981: 18). Unsur dekoratif pada arca antara lain terdapat pada sandaran, lapik, mahkota, pakaian, dan

aksesoris. Candi-candi dan arca di Prambanan dan sekitarnya adalah buah karya peradaban Mataram Kuno yang berlangsung sekurang-kurangnya dari abad VIII hingga abad X terkait dengan Dinasti Syailendra dengan Dapunta Selendra sebagai cikal bakalanya (Sedyawati dkk., 2012: 172-177). Dengan konteks peradaban dan rentang kronologis seperti itu maka seharusnya potensi estetika yang ada pada candi dan arca memiliki nilai lebih, tidak sekedar seni dan keindahan tetapi juga ada benang merah dengan peradaban leluhur, termasuk jika diaplikasikan pada pola batik.

Walaupun asalnya tidak jelas, riwayatnya juga masih kabur, tetapi seni batik sangat erat hubungannya dengan masyarakat Indonesia. Contoh “batik” pada masa Hindu-Buddha di Jawa antara lain terlihat pada “kain yang dikenakan” pada arca Ganesha dari Blitar yang berasal dari tahun 1239 M, yaitu kain bermotif *kawung* dan arca Prajnaparamita yang mengenakan “kain” bermotif *klamprang* (Soedarso, 1998: 8). Pengertian batik dapat didefinisikan sebagai gambar pada kain dasar mori, sutra, atau lainnya dengan menggunakan lilin sebagai bahan pencegah masuknya warna, dilukis dengan alat *canting*, kuas, atau sejenisnya yang kemudian diberi warna serta akhirnya dilakukan proses penghilangan lilin (Suyanto, 1998: 91). Dengan pengertian itu maka batik tergolong dalam seni kriya yang mudah beralih menjadi barang ekonomis karena memiliki kecenderungan sebagai komoditi, bukan seni murni. Suyanto kemudian menjelaskan bahwa

¹ Penghargaan untuk (Alm) Bapak Hadi Sunaryo, staf Pemetaan-Penggambaran Balai Arkeologi DIY atas jasa-jasanya dalam proses konversi dari foto ragam hias menjadi gambar dan kombinasi ornamen untuk rancangan motif batik. Gambar-gambar yang ditampilkan dalam makalah ini adalah karya beliau tahun 2011

di kalangan masyarakat Jawa, batik memiliki makna khusus, sebagai sesuatu yang diagungkan karena mencerminkan pandangan hidup yang spesifik dan kompleks, mengandung makna simbolis yang dapat memberikan semangat dalam meraih kebahagiaan di masa datang (1998: 94). Dengan pandangan seperti itu maka tidak berlebihan jika batik Indonesia, sebagai keseluruhan proses “pembatikan” termasuk teknik serta keragaman motif dan aspek-aspek budaya yang terkait. Batik ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan untuk Budaya Lisan dan Nonbendawi (*Masterpieces of the Oral and Intangible Heritage of Humanity*) sejak 2 Oktober 2009 oleh UNESCO.

Ketersediaan relief penghias bangunan candi dan pahatan ornamental pada arca di Prambanan dan sekitarnya yang melimpah, dapat dijadikan sebagai bahan inspirasi untuk mengembangkan ragam motif batik, baik sebagai seni kriya maupun seni murni yang berakar pada peradaban luhur Mataram Kuno. Dalam penelitian telah terjaring 161 ragam hias pada 11 bangunan candi dan 68 ornamen dari 23 arca.

2. LATAR BELAKANG DAN PERMASALAHAN

Sebagai *heritage* yang harus dilestarikan dan dipromosikan untuk berbagai kepentingan, bangunan candi menyimpan berbagai makna luhur yang antara lain tercermin pada kemegahan arsitektural, teknologi pembangunan, maupun filosofi desainnya. Namun dibalik itu, sebagai buah karya adiluhung masa Hindu-Buddha, bangunan candi ternyata juga memiliki kekayaan estetika sebagaimana tergambar pada aspek dekoratif berupa pahatan-pahatan relief maupun unsur-unsur dekoratif pada arca yang biasanya menyertai bangunan candi.

Setidaknya ada tiga kategori aspek dekoratif berupa relief yang dipahatkan pada bangunan candi, berikut: 1) relief cerita, adalah visualisasi cerita berdasarkan kitab keagamaan masa itu maupun visualisasi cerita bertema pendidikan; 2) relief tanpa cerita, adalah relief yang tidak menggambarkan alur cerita tertentu, biasanya berupa bentuk-bentuk

hiasan atau simbol-simbol mitologi-religius; 3) relief candrasengkala, adalah relief yang menggambarkan figur (manusia, hewan, atau makhluk mitologis) yang dapat diartikan sebagai sebuah kalimat. Kalimat ini selanjutnya dapat diterjemahkan sebagai angka yang menunjuk pada tahun tertentu.

Sementara itu, aspek dekoratif pada arca dapat dibedakan menjadi hiasan yang digambarkan pada pakaian yang dikenakan, aksesoris yang biasanya juga melengkapi wujud sebuah arca, seperti gelang kaki, kalung, gelang lengan, dan mahkota; hiasan yang dipahatkan pada tempat duduk dan sandaran arca.

Salah satu kawasan yang memiliki banyak bangunan candi adalah kawasan Prambanan yang meliputi wilayah Kabupaten Sleman di Yogyakarta dan Kabupaten Klaten di Jawa Tengah. Prambanan tidak sekedar ditempatkan sebagai nama sebuah candi atau nama sebuah lokasi, akan tetapi ditempatkan sebagai sebuah kawasan yang memiliki kekhasan budaya yang unik, baik sebagai objek arkeologis, objek wisata, maupun wilayah permukiman. Seluruh potensi ini dianggap sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pusat wisata budaya yang mampu memberdayakan masyarakat setempat tanpa harus kehilangan identitasnya sejalan dengan modernisasi yang tengah dan terus berlangsung (Suryo, et.al., 1999: xii).

C.A. Lons, seorang pegawai VOC di Semarang, pada tahun 1733 berkesempatan mengunjungi Candi Prambanan, selalu disebut sebagai “orang pertama” yang menemukan Candi Prambanan (Soejono, 1990: 353; Santiko, 1992: 2;). Sejak itu, berbagai penelitian di situs ini terus berlangsung yang dimulai pada tahun 1805 oleh H.C. Cornelis dengan pengukuran yang sistematis (Santiko, 1992: 2). Tahun 1952, Candi Siwa, salah satu bangunan utama di kompleks Candi Prambanan, selesai dipugar dan diresmikan dengan ditandai upacara selamat sederhana (Kempers, 1985: 30). Sejak itu, telah dihasilkan berbagai kajian tentang situs dan bangunan ini, antara lain meliputi seni arca, arsitektur, keagamaan, dan sejarah politik Jawa Kuna. Bukan hanya itu, penelitian dan pemugaran

juga meluas keseluruh kawasan Prambanan, seperti Candi Sewu, Candi Kalasan, Candi Plaosan, Candi Ijo, serta candi-candi lainnya.

Di sisi lain, beberapa ahli telah sepakat bahwa warisan budaya adalah milik masyarakat luas; dan sebagai konsekuensinya, semua kegiatan yang berkaitan dengan warisan budaya, baik berupa penelitian, penyelamatan, pengelolaan dan pemanfaatannya harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat luas (Tanudirjo, et.al., 1993/1994: 5). Sementara itu, berkaitan dengan pemanfaatan, Cleere (1989: 9-10) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya arkeologi memiliki tiga tumpuan pemanfaatan, yaitu: *ideologi* yang terkait erat dengan pendidikan (edukasional) antara lain untuk mewujudkan "*cultural identity*"; *ekonomi* yaitu keuntungan ekonomi misalnya melalui kepariwisataan maupun pengembangan industri kreatif; dan *akademik*, yaitu hasil penelitian yang dimanfaatkan untuk kegiatan ilmiah lainnya maupun pengembangan ilmu.

Prambanan adalah salah satu kawasan potensial sebagai kawasan pengembangan penelitian arkeologi, sejarah, dan kebudayaan, dengan *point of interest* berupa situs-situs candi. Wilayah ini tidak hanya kaya akan jumlah candi, tetapi juga keragamannya, yang antara lain meliputi candi Hindu dan candi Buddha, candi dalam wujud kompleks maupun tunggal, serta keragaman berdasarkan ukurannya. Aspek dekoratif pada bangunan candi-candi tersebut tidak seragam, dilihat dari aspek jenis, bentuk, kuantitas, maupun penempatannya. Tidak berlebihan rasanya jika dikatakan bahwa ragam hias pada bangunan candi dan arca di Prambanan dan sekitarnya sangat kaya dan belum tergali melalui penelitian dan pendokumentasian yang komprehensif.

Oleh karena itu, menjadi penting artinya untuk melestarikan dan mempromosikan kekayaan estetik *heritages* ini melalui pengembangan dokumen digital interaktif. Sementara itu, khusus untuk pengemasan berbasis digital, Ian Hodder (1999: 183-184) telah menyarankan pemanfaatannya untuk digunakan dalam presentasi arkeologi. Hodder antara lain

mengemukakan kelebihan teknologi digital dalam interpretasi, seperti berikut ini.

- (1) Teknologi digital antara lain untuk *virtuality* dan *nonlinearity*.
- (2) *Virtuality* berupa multimedia, *reconstruction on screen (the new technologies produce digital information represented on screen)*; "*virtual archaeology*" *reconstruction*.
- (3) *Nonlinear* meliputi *links, network, paths, weaving, hypertext, menu* (website dan CD-I)

Kemasan dokumen digital interaktif yang ditunjang dengan kemasan cetak berupa katalog, bukan hanya ditujukan untuk mendukung pelestarian *heritages*, namun juga digunakan sebagai bahan promosi untuk berbagai kepentingan dan pemanfaatan. Salah satu manfaat tersebut adalah sebagai sumber pengembangan pola Batik.

Melalui penelitian dan pendokumentasian aspek dekoratif pada candi dan arca di Prambanan dan sekitarnya, salah satu keluarannya adalah hasil analisis berupa pemilahan bentuk-bentuk hiasan yang dapat konversi menjadi pola batik. Keunggulan pola batik hasil konversi ini antara lain adalah: 1) kedekatan lokasi perajin batik dengan sumber inspirasi dekoratif; 2) bentuk dan varian hiasan tersedia dalam jumlah besar; 3) terkait langsung dengan *heritages* yang sudah dikenal luas; 4) tidak sekedar gambaran estetis, namun memiliki makna yang sejajar dengan makna yang terkandung pada sumber dekorasinya; 5) dapat dipromosikan secara terpadu dan resiprokal, antara kawasan Prambanan sebagai kawasan wisata berbasis arkeologi dan pengembangan batik khususnya di Yogyakarta.

Berdasarkan uraian kerangka di atas maka setidaknya ada tiga aspek yang menonjol sebagai rumusan masalah sekaligus menjadi isu yang harus didekati dan diberikan penjelasan untuk serta pemecahannya. Ketiga aspek tersebut adalah 1) gambaran populasi, keragaman, serta varian hiasan pada candi-candi dan arca di Prambanan dan sekitarnya; 2) bentuk kemasan yang paling

sesuai atas dokumentasi ragam hias candi-candi dan arca di Prambanan dan sekitarnya sebagai bahan pengembangan ilimiah, pendidikan, dan promosi; dan 3) Bahan-bahan grafis yang mungkin dapat disediakan untuk mendukung pengembangan motif batik

3. TUJUAN DAN MANFAAT

3.1 Tujuan

Tujuan utama penelitian ini adalah mendapatkan gambaran populasi, keragaman bentuk hiasan, dan varian ragam hias yang terdapat pada candi dan arca di Prambanan dan sekitarnya sebagai bahan grafis untuk mendukung pengembangan motif "Batik Candi". Bahan grafis tersebut bersumber dari ragam hias yang terdapat pada bangunan candi dan arca di kawasan Prambanan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya penelitian ini memiliki sasaran objektif yaitu candi dan arca di kawasan Prambanan untuk mendapatkan dokumen ragam dan motif hias dari masa Mataram Kuna.

3.2 Manfaat

Penelitian arkeologi aplikatif atas keberadaan ragam hias pada candi dan arca di Prambanan dan sekitarnya antara lain dapat menggambarkan bentuk, keragaman, dan varian hiasan yang sangat mungkin banyak di antaranya dapat dikonversi sebagai pola batik. Dengan menyusun dokumen grafis atas ragam hias pada candi dan arca di Prambanan dan sekitarnya, dalam bentuk katalog dan media interaktif, maka akan tersedia sumber acuan untuk mengembangkan pola batik, untuk pengembangan industri kerajinan batik. Di sisi lain, katalog dan media interaktif ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pengembangan penelitian, pendidikan, dan promosi atas keberadaan "Batik Candi" maupun aspek estetika ragam hias pada candi dan arca di Prambanan dan sekitarnya.

Batik kini sudah sah sebagai karya bangsa Indonesia, UNESCO pun secara resmi mengakuinya, meskipun secara fakta memang Indonesia adalah pemilik karya adiluhung ini. Nyaris berbareng dengan hal itu, masyarakat Indonesia semakin bangga dengan karya batik, bukan hanya sebagai bahan busana, tetapi sudah dikreasi untuk komoditi lainnya. Salah satu dampak dari hal-hal tersebut adalah kenyataan adanya lonjakan permintaan akan kain batik yang secara nyaris spontan telah disikapi oleh banyak pengusaha besar maupun kecil dengan memproduksi melalui berbagai inovasi yang tergolong sangat positif.

Pasar memang semakin luas, di dalam dan di luar negeri, inovasi karya dan kreativitas untuk mengembangkan karya batik antara lain juga meliputi tuntutan akan diversifikasi corak dan estetika. Namun di balik itu, sesungguhnya termuat tuntutan diselipkannya makna kultural sebagai "roh" atas pengembangan karya dan diversifikasi corak dan pola batik. Artinya, sesungguhnya dibutuhkan tercerminnya jati diri di dalam karya batik sebagai salah satu jawaban atas tuntutan tersebut.

4. METODOLOGI

4.1 Metode

Berdasarkan permasalahan, tujuan, dan sasaran penelitian yang diajukan, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis. Danim (2002: 41) menggambarkan bahwa penelitian deskriptif (*descriptive research*) dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat. Pengertian yang sama mengenai penelitian deskriptif antara lain juga dikemukakan oleh Azwar (1998: 5) dan Haryono (1993: 10) yang pada intinya mengemukakan bahwa penelitian jenis ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau bidang tertentu, dalam hal ini adalah ragam hias pada candi dan arca.

Sementara itu, menurut Sumanto (1995: 77) penelitian deskriptif analitis berusaha mendeskripsi dan menginterpretasi apa yang ada; dapat mengenai kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat atau efek yang terjadi, atau kecenderungan yang tengah berkembang. Dalam hal ini, biasanya data dikumpulkan melalui survei angket, wawancara, atau observasi sebagai fakta empiris.

Fakta empiris yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara pemilahan fakta berdasarkan kategori-kategori tertentu. Hasil pemilahan ini diharapkan memberi gambaran mengenai kondisi tertentu, sesuai dengan permasalahan dan tujuan penelitian. Gambaran tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan atau menjawab permasalahan yang diajukan.

4.2 Mekanisme

Mekanisme dalam melakukan penelitian ini di antaranya berikut ini.

- 1) *Plotting*, yaitu perekaman data lokasi astronomis setiap sasaran, baik situs candi maupun lokasi arca. Perekaman data ini dilakukan dengan menggunakan alat *global positioning system* (GPS) untuk mendapatkan data lokasi astronomis berupa angka koordinat lintang dan bujur. Data hasil perekaman selanjutnya diolah dalam peta tertentu untuk mendapatkan gambaran sebaran lokasional setiap sasaran penelitian.
- 2) Deskripsi, yaitu uraian verbal atas data yang direkam dalam survei. Alat utama dalam pendeskripsian sasaran penelitian adalah format-format data yang telah disusun dan disiapkan dalam perekaman data. Ada dua formulir yang disiapkan,

yaitu formulir survei ragam hias pada candi, dan formulir ragam hias pada arca.

- 3) Tabulasi, yaitu peringkasan data primer dari formulir-formulir isian dalam bentuk tabel. Tabel-tabel yang dibuat untuk meringkas dan merekapitulasi data formulir tersebut.
- 4) Dokumentasi, yaitu perekaman secara visual sasaran dan objek-objek survei, yang meliputi pemotretan dan perekaman video. Khusus untuk dokumen foto ragam hias, dokumen digital ini selanjutnya dikelompokkan berdasarkan objek utama diolah untuk keperluan pemilahan dan konversi menjadi motif batik.

5. RAGAM HIAS DAN APLIKASI BATIK CANDI

5.1 Ragam Hias pada Candi dan Arca

Sasaran survei pada penelitian ini meliputi 11 situs candi yang berada di wilayah Kabupaten Sleman, Yogyakarta maupun situs candi di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Dari 11 situs candi, berhasil direkam sejumlah 161 hiasan dengan berbagai kategori dan bentuk dasar, bahkan beberapa di antaranya memiliki kesamaan atau kemiripan. Secara umum, dari 161 hiasan yang didata dapat dikatakan lengkap, setidaknya berdasarkan kategori, yaitu geometris, flora, fauna, antropomorfik, serta kombinasi. Rangkuman dan rekapitulasi hasil survei ragam hias pada 11 bangunan tersebut tertuang dalam Tabel 1.

Tabel 1. Rekapitulasi Ornamen pada Bangunan Candi

Nama Candi	Agama	Nama Bangunan	Letak Hiasan	Kode	Nama Ornamen
Barong	Hindu	Candi Induk	kaki	BAR01	Tumpal dan suluran
Barong	Hindu	Candi Induk	tubuh	BAR02	Bujur sangkar
Barong	Hindu	Candi Induk	tubuh	BAR03	Sulur gelung vertikal
Barong	Hindu	Candi Induk	tubuh	BAR04	Sangkha bersayap
Barong	Hindu	Candi Induk	tubuh	BAR05	Umpak
Barong	Hindu	Candi Induk	tubuh	BAR06	Tirai dan bunga matahari
Barong	Hindu	Candi Induk	pagar langkan pusat	BAR07	Makara, burung, dan untai mutiara
Barong	Hindu	Candi Induk	pagar langkan pusat	BAR08	Ceplok bunga dan sulur
Ijo	Hindu	Candi Induk	atap	IJO01	Antefiks dengan hiasan kepala manusia
Ijo	Hindu	Candi Induk	tubuh	IJO02	Persegi dan lingkaran
Ijo	Hindu	Candi Induk	tubuh	IJO03	Tirai dan gana
Ijo	Hindu	Candi Induk	tubuh	IJO04	Kala dan makara
Ijo	Hindu	Candi Induk	tubuh	IJO05	Kombinasi flora dan geometris
Ijo	Hindu	Candi Induk	tubuh	IJO06	Sulur gelung
Ijo	Hindu	Candi Induk	tubuh	IJO07	Belah ketupat dan bunga
Ijo	Hindu	Candi Induk	tubuh	IJO08	Sangkha bersayap
Ijo	Hindu	Candi Induk	tubuh	IJO09	Bunga dan geometris (karangbhoma)
Ijo	Hindu	Candi Perwara	tubuh	IJO10	Sangkha bersayap
Ijo	Hindu	Candi Perwara	tubuh	IJO11	Belah ketupat dan ceplok bunga
Ijo	Hindu	Candi Perwara	tubuh	IJO12	Kertas tempel
Ijo	Hindu	Candi Perwara	tubuh	IJO13	Persegi
Kalasan	Buddha	Candi Induk	atap	KAL01	Persegi
Kalasan	Buddha	Candi Induk	atap	KAL02	Kala sudut
Kalasan	Buddha	Candi Induk	tubuh	KAL03	Sulur gelung vertikal
Kalasan	Buddha	Candi Induk	tubuh	KAL04	Purnakalasa dan suluran
Kalasan	Buddha	Candi Induk	tubuh	KAL05	Kala makara
Kalasan	Buddha	Candi Induk	tubuh	KAL06	Gana dan tirai
Kalasan	Buddha	Candi Induk	tubuh	KAL07	Relief bangunan candi
Kalasan	Buddha	Candi Induk	tubuh	KAL08	Tumpal dan suluran
Kalasan	Buddha	Candi Induk	runtuhan	KAL09	Ceplok bunga dan untai mutiara

Kalasan	Buddha	Candi Induk	runtuhan	KAL10	Bunga melati dan segiempat
Kedulan	Hindu	Candi Induk	atap	KED01	Suluran
Kedulan	Hindu	Candi Induk	tubuh	KED02	Kala semu
Kedulan	Hindu	Candi Induk	tubuh	KED03	Makara
Kedulan	Hindu	Candi Induk	tubuh	KED04	Makara semu
Kedulan	Hindu	Candi Induk	tubuh	KED05	Tirai dan gana
Kedulan	Hindu	Candi Induk	tubuh	KED06	Sulur gelung
Kedulan	Hindu	Candi Induk	pagar langkan	KED07	Kertas tempel pita dan bunga
Kedulan	Hindu	Candi Induk	pagar langkan	KED08	Tirai dan bunga
Kedulan	Hindu	Candi Induk	pagar langkan	KED09	Sulur gelung
Plaosan Kidul	Buddha	Candi Perwara	tubuh	PLK01	Belah ketupat dan bunga
Plaosan Kidul	Buddha	Candi Perwara	tubuh	PLK02	Ceplok bunga, mutiara, dan burung
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	kaki	PLL01	Purnakalasa
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	kaki	PLL02	Kertas tempel tirai
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	kaki	PLL03	Suluran dan sangkha bersayap (bagian depan dan belakang)
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	kaki	PLL04	Kertas tempel ceplok bunga dan belah ketupat
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	tubuh	PLL05	Ceplok bunga
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	tubuh	PLL06	Oval dan persegi
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	tubuh	PLL07	Kudu (kepala manusia dan flora - bagian belakang)
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	tubuh	PLL08	Kala dengan rahang bawah dan makara (bagian belakang)
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	tubuh	PLL09	Ceplok bunga dan belah ketupat
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	tubuh	PLL10	Lonceng – tirai bentuk makara
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	tubuh	PLL11	Suluran dan singa
Plaosan Lor	Buddha	Candi Induk - Selatan	Lepas	PLL12	Suluran

Prambanan	Hindu	Candi Siwa	tubuh - pagar langkan	PRA01	Makara
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	tubuh - pagar langkan	PRA02	Tumbuhan
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	kaki	PRA03	Kalpataru - kinara dan kinari
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	pipi tangga	PRA04	Sulur gelung
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	kaki	PRA05	Tirai dan bunga
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	kaki	PRA06	Tirai dan burung
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	tubuh - gapura pagar langkan	PRA07	Bunga dalam lingkaran
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	atap	PRA08	belah ketupat dan bunga
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	tubuh - gapura pagar langkan	PRA09	Kala, makara, gana
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	tubuh - pagar langkan	PRA10	Kala, makara, singa
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	kaki	PRA11	Persegi
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	pipi tangga	PRA12	Makara di mulut dua singa
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	kaki	PRA13	Mahkota
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	kaki	PRA14	Mahkota
Prambanan	Hindu	Candi Siwa	pipi tangga	PRA15	kala makara
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	tubuh - pagar langkan	PRA16	Makara
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	tubuh - pagar langkan	PRA17	Suluran
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	kaki	PRA18	Kalpataru - kinara dan kinari
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	pipi tangga	PRA19	Sulur gelung dan singa
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	kaki	PRA20	Tirai dan bunga
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	kaki	PRA21	Tirai dan burung

Prambanan	Hindu	Candi Brahma	tubuh - gapura pagar langkan	PRA22	Bunga dalam lingkaran
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	atap	PRA23	Belah ketupat dan bunga
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	tubuh - pagar langkan	PRA24	Kala, makara, gana
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	kaki	PRA25	Ceplok bunga
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	pipi tangga	PRA26	Makara di mulut dua singa
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	kaki	PRA27	Mahkota
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	kaki	PRA28	Mahkota
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	kaki	PRA29	Ceplok bunga
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	tubuh - gapura pagar langkan	PRA30	Padma
Prambanan	Hindu	Candi Brahma	kaki	PRA31	Kala makara
Prambanan	Hindu	Candi Wisnu	tubuh - pagar langkan	PRA32	Makara
Prambanan	Hindu	Candi Wisnu	tubuh - pagar langkan	PRA33	Kala
Prambanan	Hindu	Candi Wisnu	kaki	PRA34	Kalpataru - kinara dan kinari
Prambanan	Hindu	Candi Wisnu	kaki	PRA35	Tirai dan bunga
Prambanan	Hindu	Candi Wisnu	kaki	PRA36	Tirai dan burung
Prambanan	Hindu	Candi Wisnu	tubuh - gapura pagar langkan	PRA37	Bunga dalam lingkaran
Prambanan	Hindu	Candi Wisnu	atap	PRA38	Belah ketupat dan bunga
Prambanan	Hindu	Candi Wisnu	tubuh - pagar langkan	PRA39	Kala, makara, gana
Prambanan	Hindu	Candi Wisnu	tubuh - pagar langkan	PRA40	Kala, makara, singa
Prambanan	Hindu	Candi Wisnu	kaki	PRA41	Persegi

Prambanan	Hindu	Candi Apit Utara	pipi tangga	PRA42	Sulur gelung dan singa
Prambanan	Hindu	Candi Apit Selatan	tubuh - pagar langkan	PRA43	Kala, makara, singa
Prambanan	Hindu	Candi Apit Selatan	kaki	PRA44	Sulur dan persegi
Prambanan	Hindu	Candi Apit Selatan	kaki	PRA45	Sangkha bersayap dan flora
Prambanan	Hindu	Candi Apit Selatan	tubuh	PRA46	Belah ketupat dan padma
Prambanan	Hindu	Candi Apit Selatan	atap	PRA47	Kala sudut
Prambanan	Hindu	Candi Apit Utara	tubuh	PRA48	Purnakalasa
Ratu Boko	Hindu dan Buddha	Gapura	pilar	RBK01	Tumpal pada pilar
Ratu Boko	Hindu dan Buddha	Gapura	tangga	RBK02	Ceplok bunga di bawah singa pipi tangga
Ratu Boko	Hindu dan Buddha	Gapura	tubuh	RBK03	Suluran
Ratu Boko	Hindu dan Buddha	pendopo	pagar langkan	RBK04	Jaladwara (makara) dan tempat air Jaladwara (makara semu)
Ratu Boko	Hindu dan Buddha	Keputren	gapura	RBK05	Tirai pita dan ceplok bunga
Ratu Boko	Hindu dan Buddha	Keputren	gapura	RBK06	Ceplok bunga di bawah makara
Sari	Buddha	Candi Induk	atap	SAR01	Relief manusia dan 2 ekor ular saling berbelit
Sari	Buddha	Candi Induk	tubuh	SAR02	Sangkha dan suluran
Sari	Buddha	Candi Induk	tubuh	SAR03	Gajah dan manusia
Sari	Buddha	Candi Induk	tubuh	SAR04	Tirai
Sari	Buddha	Candi Induk	tubuh	SAR05	Purnakalasa
Sari	Buddha	Candi Induk	tubuh	SAR06	Persegi
Sari	Buddha	Candi Induk	tubuh	SAR07	Suluran
Sari	Buddha	Candi Induk	tubuh	SAR08	Kala
Sari	Buddha	Candi Induk	tubuh	SAR09	Makara dan sulur
Sari	Buddha	Candi Induk	runtuhan	SAR10	Kala dan sulur
Sewu	Buddha	Candi Induk	atap	SEW01	Antefiks
Sewu	Buddha	Candi Induk	atap	SEW02	Kertas tempel pita
Sewu	Buddha	Candi Induk	atap	SEW03	Tirai pita dan burung

Sewu	Buddha	Candi Induk	atap	SEW04	Gana
Sewu	Buddha	Candi Induk	atap	SEW05	Belah ketupat
Sewu	Buddha	Candi Induk	atap	SEW06	Kala dan untaian mutiara
Sewu	Buddha	Candi Induk	atap	SEW07	Persegi
Sewu	Buddha	Candi Induk	tubuh	SEW08	Kertas tempel pita
Sewu	Buddha	Candi Induk	tubuh	SEW09	Kertas tempel bentuk lingkaran dengan isian flora atau fauna
Sewu	Buddha	Candi Induk	tubuh	SEW10	Tirai pita dan burung
Sewu	Buddha	Candi Induk	tubuh	SEW11	Gana
Sewu	Buddha	Candi Induk	tubuh	SEW12	Jaladwara dengan tokoh manusia,
Sewu	Buddha	Candi Induk	tubuh	SEW13	Singa
Sewu	Buddha	Candi Induk	kaki	SEW14	Purnakalasa dengan burung
Sewu	Buddha	Candi Induk	kaki	SEW15	Tirai pita dan ceplok bunga
Sewu	Buddha	Candi Perwara No 72	atap	SEW16	Antefiks
Sewu	Buddha	Candi Perwara No 72	atap	SEW17	Bulat – persegi (stupa atap)
Sewu	Buddha	Candi Perwara No 72	tubuh	SEW18	Purnakalasa
Sewu	Buddha	Candi Perwara No 72	tubuh	SEW19	Sulur gelung
Sewu	Buddha	Candi Perwara No 72	tubuh	SEW20	Ceplok bunga
Sewu	Buddha	Candi Perwara No 72	tubuh	SEW21	Kala dan pita
Sewu	Buddha	Candi Perwara No 72	tubuh	SEW22	Sulur gelung vertikal
Sewu	Buddha	Candi Perwara No 72	tubuh	SEW23	Kala
Sewu	Buddha	Candi Apit No 8	atap	SEW24	Tirai
Sewu	Buddha	Candi Apit No 8	atap	SEW25	Bulat - persegi
Sewu	Buddha	Candi Apit No 8	tubuh	SEW26	Kertas tempel
Sewu	Buddha	Candi Apit No 8	tubuh	SEW27	Sulur gelung vertikal
Sewu	Buddha	Candi Apit No 8	tubuh	SEW28	Gana

Sewu	Buddha	Candi Apit No 8	tubuh	SEW29	Garuda
Sewu	Buddha	Candi Apit No 8	kaki	SEW30	Tirai
Sewu	Buddha	Candi Perwara	tubuh	SEW31	Lampu dengan lidah api, padma, kala makara, relief candi
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	atap	SOJ01	Tirai dan ceplik bunga
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	atap	SOJ02	Persegi (stupa atap)
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	tubuh	SOJ03	Ceplok bunga dan oval
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	tubuh	SOJ04	Tirai dan burung, gana (pintu masuk bilik candi)
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	tubuh	SOJ05	Tumpal
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	Tubuh - Gapura Pagar Langkan	SOJ06	Belah ketupat dan ceplik bunga
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	Tubuh - Gapura Pagar Langkan	SOJ07	Bunga matahari
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	Tubuh - Gapura Pagar Langkan	SOJ08	Makara dan lidah api
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	Tubuh - Gapura Pagar Langkan	SOJ09	Suluran
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	kaki	SOJ10	Sulur gelung dan fabel
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	kaki	SOJ11	belah ketupat dan ceplik bunga
Sojiwan	Buddha	Candi Induk	kaki	SOJ12	Tirai dan flora

Survei ragam hias pada arca meliputi 23 arca yang disimpan di Kantor Unit BPCB DI Yogyakarta di Candi Pambanan, Kantor Unit BPCB Jawa Tengah di Candi Sewu, dan arca yang berada di Candi Plaosan Lor. Dari 23 buah arca yang menjadi sasaran penelitian, diperoleh 68 hiasan. Hiasan yang didata adalah hiasan pada arca yang dipahat di bagian lapik, tempat duduk, sandaran, pakaian, serta aksesoris yang dikenakan. Koding untuk ragam hias pada arca dalam

hal ini difokuskan pada pemberian kode pada entitas ornamen. Kode ornamen atau hiasan terdiri atas tiga bagian, yaitu LOKASI / NAMA ARCA / NOMOR HIASAN. Kode lokasi merupakan lokasi arca pada saat survei dilakukan, yaitu **JAT** (Kantor Unit **BPCB Jawa Tengah** di Candi Sewu), **YOG** (Kantor Unit **BPCB Yogyakarta** di Candi Prambanan), dan **PLL** (situs Candi Plaosan Lor). Rangkuman dan rekapitulasi hasil survei ragam hias pada arca tertuang Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Rekapitulasi Ornamen pada Arca

Nama Arca	Agama	Letak Hiasan	Kode Ornamen	Nama Ornamen
Tokoh Dewa 1	Hindu	pakaian	JAT/TOK01/01	Bunga matahari dan ceplok bunga dalam bentuk panjang
Tokoh Dewa 1	Hindu	pakaian - celana	JAT/TOK01/02	Tumpal dan lingkaran garis ganda sejajar
Manjusri	Buddha	Kalung / Hara	JAT/MAN/01	Ceplok bunga dan lingkaran
Manjusri	Buddha	Upawita	JAT/MAN/02	Ceplok bunga di tengah bentuk persegi panjang
Manjusri	Buddha	Sandaran	JAT/MAN/03	Lidah api
Manjusri	Buddha	Lapik	JAT/MAN/04	Heksagonal
Manjusri	Buddha	Lapik	JAT/MAN/05	Padma
Dhyani Buddha	Buddha	Lapik	JAT/DHY/01	Relief flora dan burung,
Dhyani Buddha	Buddha	Lapik	JAT/DHY/02	Heksagonal
Dhyani Buddha	Buddha	Lapik	JAT/DHY/03	Padma
Jambhala (1)	Buddha	bantal duduk	JAT/JAM01/01	Ceplok bunga
Jambhala (1)	Buddha	udarabandha	JAT/JAM01/02	Untaian mutiara
Jambhala (1)	Buddha	kalung	JAT/JAM01/03	Ceplok bunga
Jambhala (2)	Buddha	bantal duduk	JAT/JAM02	Ceplok bunga
Jambhala (3)	Buddha	Kalung	JAT/JAM03/01	Untaian mutiara dengan hiasan tumpal
Jambhala (3)	Buddha	Udarabandha	JAT/JAM03/02	Hiasan geometris dan bunga
Jambhala (3)	Buddha	Kelat bahu	JAT/JAM03/03	Ttumpal dan ceplok bunga
Jambhala (3)	Buddha	Bantal duduk	JAT/JAM03/04	Ceplok bunga 4 kelopak

Kuwera	Hindu	Kalung	JAT/KUW/01	Untaian mutiara dengan hiasan tumpal
Kuwera	Hindu	Udarabandha	JAT/KUW/02	Hiasan geometris dan bunga
Kuwera	Hindu	Kelat bahu	JAT/KUW/03	Tumpal dan ceplok bunga
Kuwera	Hindu	Bantal duduk	JAT/KUW/04	Ceplok bunga 8 kelopak
Ganesha	Hindu	Pakaian	JAT/GAN/01	Ceplok bunga
Ganesha	Hindu	Lapik	JAT/GAN/02	Heksagonal
Ganesha	Hindu	Lapik	JAT/GAN/03	Padma
Ganesha	Hindu	Sandaran	JAT/GAN/04	Lidah api
Tokoh Dewa 1 nomor arca BG 289	Hindu	Mahkota	YOG/TOK01/01	Untaian mutiara ceplok bunga berbentuk tumpal
Tokoh Dewa 1 nomor arca BG 289	Hindu	Kalung	YOG/TOK01/02	Dua susun yaitu untaian mutiara polos dan untaian mutiara ceplok bunga berbentuk tumpal
Tokoh Dewa 1 nomor arca BG 289	Hindu	Kelat bahu	YOG/TOK01/03	Untaian mutiara ceplok bunga berbentuk tumpal
Tokoh Dewa 1 nomor arca BG 289	Hindu	Uncal	YOG/TOK01/04	Untaian mutiara ceplok bunga berbentuk tumpal
Siwa Mahadewa	Hindu	mahkota,	YOG/CMD/01	Tumpal dan untaian pita
Siwa Mahadewa	Hindu	kalung / hara	YOG/CMD/02	Tumpal dan untaian pita
Wisnu	Hindu	kelat bahu/ keyura	YOG/WIS/01	Untaian mutiara berbentuk tumpal
Wisnu	Hindu	ikat pinggang/ katibandha	YOG/WIS/02	Geometris
Wisnu	Hindu	Sandaran	YOG/WIS/03	Sangkha
Durga Mahisasuramardini	Hindu	mahkota	YOG/DUR/01	Ceplok bunga
Durga Mahisasuramardini	Hindu	anting-anting / kundala	YOG/DUR/02	Ceplok bunga
Durga Mahisasuramardini	Hindu	kelat bahu / keyura	YOG/DUR/03	Ceplok bunga
Mahakala	Hindu	kelat bahu / keyura	YOG/MKL/01	Ceplok bunga
Mahakala	Hindu	Kalung / Hara	YOG/MKL/02	Untaian mutiara

Tokoh Dewa 2	Hindu	Lapik	YOG/TOK02/01	Geometris (bagian depan); sulur gelung dan sayap (bagian samping kiri – kanan)
Tokoh Dewa 2	Hindu	Asana	YOG/TOK02/02	Padma dan heksagonal
Siwa	Hindu	Kalung / Hara	YOG/CIW/01	Bunga dan pita
Siwa	Hindu	kelat bahu / keyura	YOG/CIW/02	Tumpal dan ceplik bunga
Siwa	Hindu	Gesper	YOG/CIW/03	Ceplok bunga dan pita
Siwa	Hindu	Pijakan Kaki	YOG/CIW/04	Padma, pita, dan hiasan heksagonal
Tokoh Dewa 3	Hindu	Sandaran	YOG/TOK03/01	Teratai dengan kuncup berbentuk mahkota
Tokoh Dewa 4	Hindu	Sandaran	YOG/TOK04/01	Teratai
Tokoh Dewi dengan nomor arca BG 274	Buddha	Sandaran	YOG/DWI/01	Teratai dengan tokoh Amitabha di bagian kuncupnya
Tokoh Dewi dengan nomor arca BG 275	Buddha	Asana	YOG/DWI/02	Hiasan heksagonal
Jambhala	Buddha	Pundi-pundi	PLL/JAM/01	Untaian mutiara
Jambhala	Buddha	Sandaran	PLL/JAM/02	Hiasan geometris dan lidah api
Manjusri	Buddha	Kalung / Hara	PLL/MJS/01	Untaian mutiara berbentuk tumpal - kalung
Manjusri	Buddha	ikat perut	PLL/MJS/02	Berbentuk X di bagian tengah terdapat segi empat dengan motif hias bunga
Manjusri	Buddha	Sandaran	PLL/MJS/03	Ardhacandra / bulan sabit bagian tepi dihiasi mutiara
Sarvanivaranawis-kambhin	Buddha	Sandaran	PLL/SAR/01	Kumuda
Vajrapani	Buddha	mahkota	PLL/VAJ/01	Kiritamukuta
Vajrapani	Buddha	kelat bahu / keyura	PLL/VAJ/02	Dua susun; geometris (bawah) dan geometris dengan ceplik bunga berbentuk tumpal (atas)
Vajrapani	Buddha	Sandaran	PLL/VAJ/03	Kumuda dan lidah api
Dwarapala	Buddha	mahkota / jamang	PLL/DWA/01	Ceplok bunga dan antefik / tumpal
Dwarapala	Buddha	anting-anting / kundala	PLL/DWA/02	Ceplok bunga dan mutiara
Dwarapala	Buddha	kalung / hara	PLL/DWA/03	Untaian mutiara dan flora/suluran

Dwarapala	Buddha	kelat bahu / keyura	PLL/DWA/04	Tumpal
Dwarapala	Buddha	upawita / tali kasta	PLL/DWA/05	Untaian mutiara dan flora/suluran
Dwarapala	Buddha	gelang / kankana	PLL/DWA/06	Untaian mutiara dan flora/suluran
Dwarapala	Buddha	uncal	PLL/DWA/07	Tumpal
Dwarapala	Buddha	ikat pinggang / katibandha	PLL/DWA/08	Untaian rantai
Dwarapala	Buddha	belati / katri	PLL/DWA/09	Suluran (sarung belati); ceplok bunga dan mutiara (gagang belati)

5.3 Batik Candi

Ragam hias hasil survei di atas menjadi *database* sekaligus dokumen primer yang di antaranya dapat dipilih sebagai sumber pengembangan motif batik. Pemilihan ragam hias dilakukan dengan mencermati seluruh dokumen foto setiap ornamen, yaitu 161 ragam hias pada candi dan 68 ragam hias pada arca. Foto ornamen yang terpilih kemudian dikonversi menjadi gambar untuk mendapatkan motif. Gambar-gambar hasil konversi selanjutnya menjadi bahan dasar grafis untuk motif batik dengan menyusun dan mengombinasikan hingga menjadi motif-motif batik yang secara teknis siap *dipres* (digambar sebagai pola pada kain). Dalam proses penyusunan, satu motif Batik Candi tidak dibatasi jumlah dan jenis ornamennya, artinya sebuah motif dapat terdiri atas:

- (1) Ornamen utama (+) ornamen *pinggiran* (+) ornamen *isen-isen*
- (2) Beberapa ornamen utama (+) ornamen *isen-isen*
- (3) Beberapa ornamen utama (+) ornamen *pinggiran*
- (4) Beberapa ornamen utama

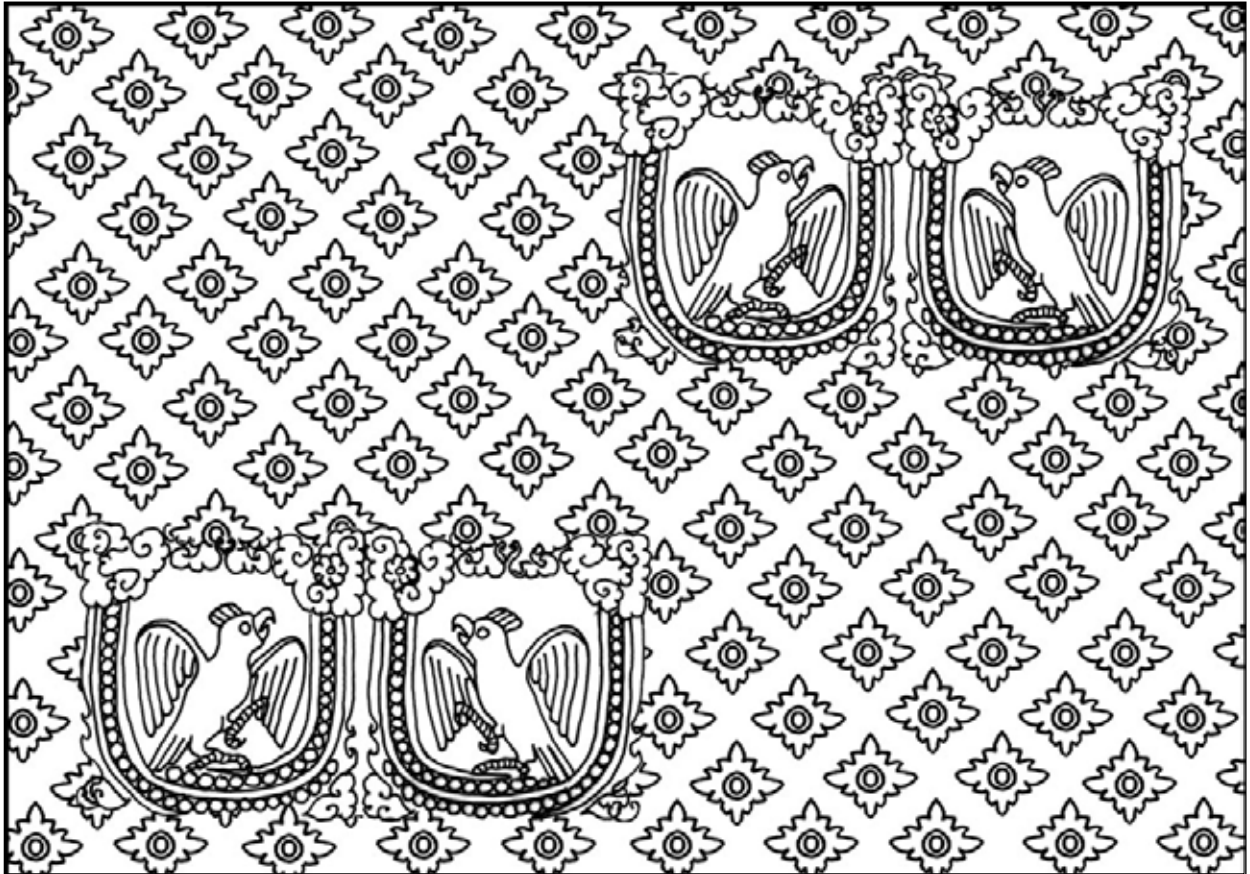
Berikut ini adalah beberapa contoh motif batik hasil penyusunan dan kombinasi ornamen atau ragam hias yang sudah dikonversi. Ada lima motif yang dihasilkan dari proses penggalian ragam hias pada candi dan arca di Prambanan

dan sekitarnya, sebagaimana disajikan dalam Tabel 3 dan gambar-gambar motif di bawah ini.

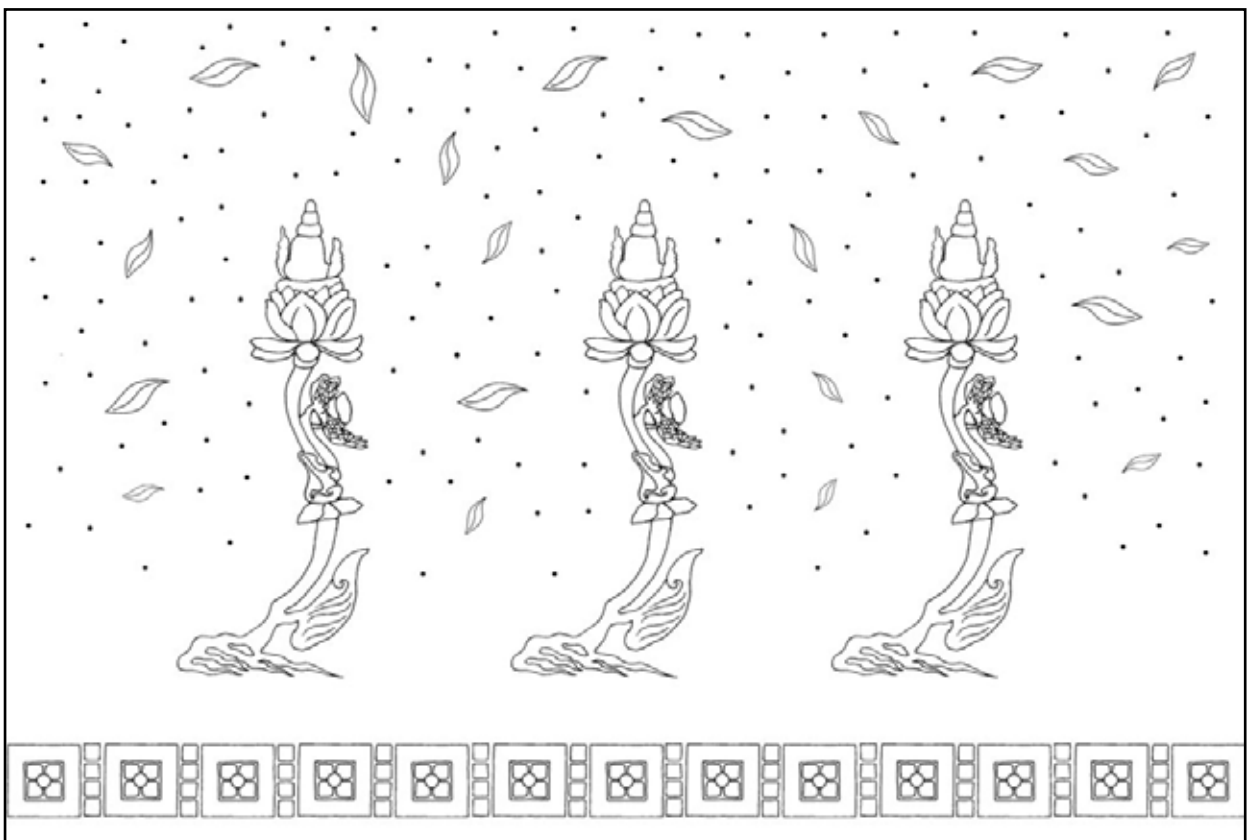
Tabel 3. Contoh Kombinasi Ornamen Pada Candi dan Arca sebagai Motif Batik

MOTIF	ORNAMEN UTAMA	ISEN – ISEN	PINGGIRAN
1	PRA 36	PRA 08	menyesuaikan
2	YOG/ TOK03/01	menyesuaikan	BAR02
3	PLL03	menyesuaikan	KAL03
4	PRA 08	-	menyesuaikan
5	PRA 34	BAR02, KAL10, PRA 38	menyesuaikan
Catatan: Untuk mengetahui bentuk ornamen, lihat kode-kodenya pada Tabel 1 dan Tabel 2			

Berdasarkan kombinasi-kombinasi tersebut, kemudian dibuat rancangan motif “Batik Candi” pada lembar kertas yang ukurannya disesuaikan dengan ukuran rancangan kain batik. Berikut ini disajikan lima rancangan “Batik Candi” hasil pengolahan dan aplikasi ornamen candi dan arca di sekitar Prambanan.



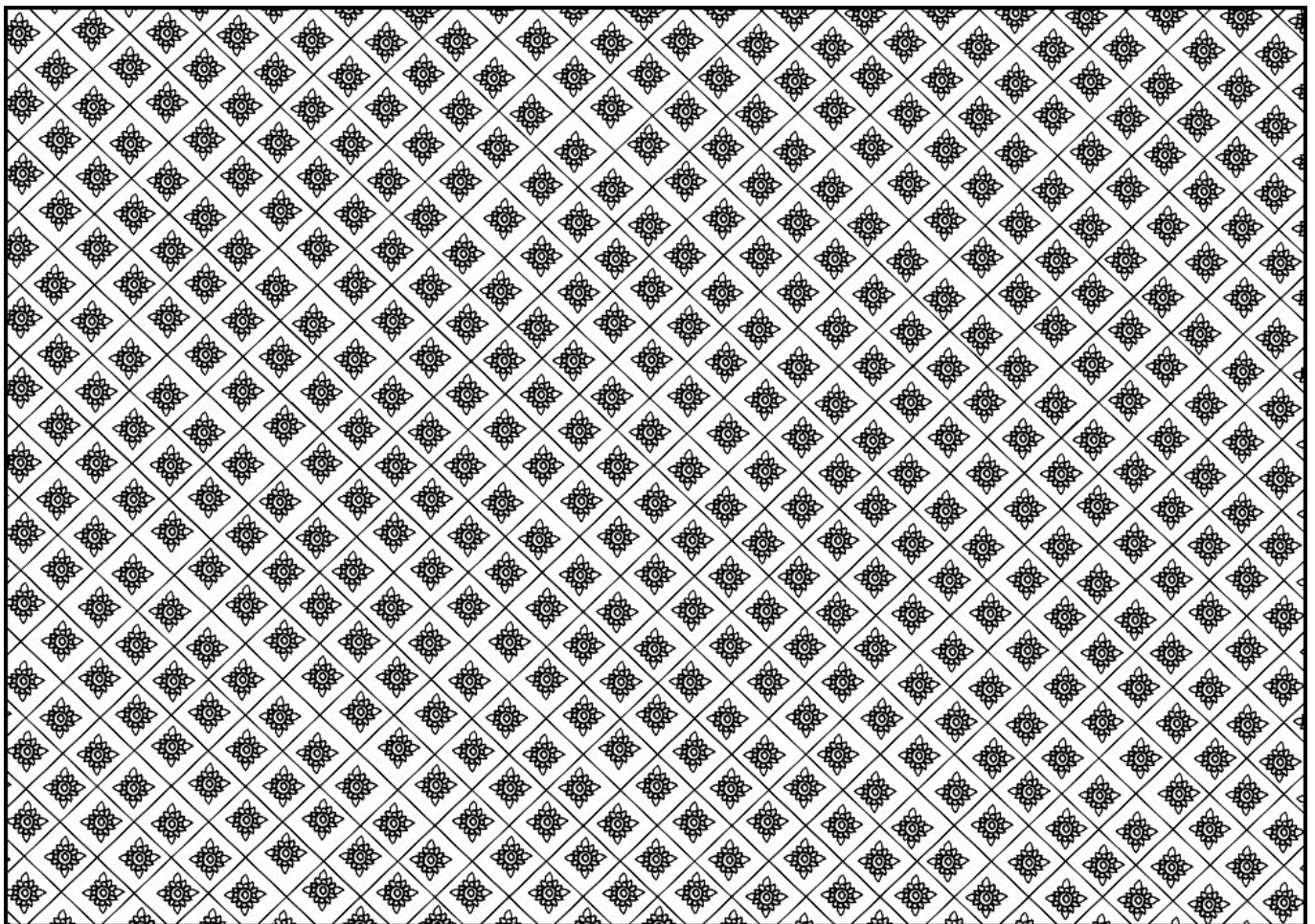
Motif 1: Gabungan antara ragam hias di Candi Prambanan PRA36 dan PRA08 (Gambar: Hadi Sunaryo)



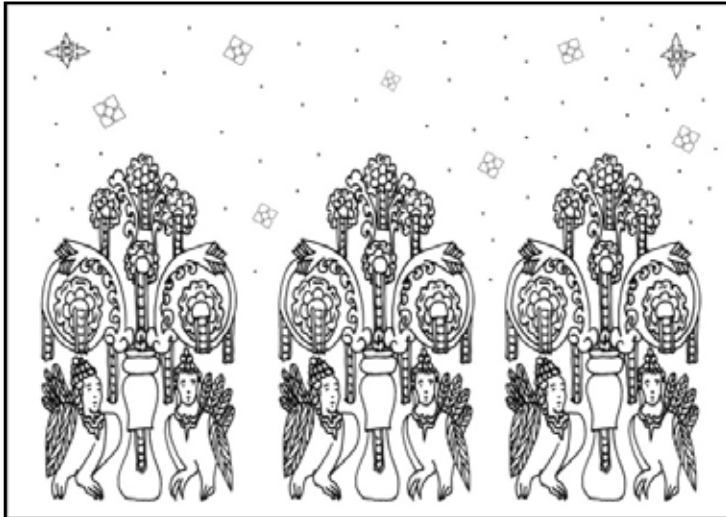
Motif 2: Gabungan antara ragam hias pada arca di BPCB Yogyakarta YOG/TOK03/01 dan ragam hias pada Candi Barong BAR02 (Gambar: Hadi Sunaryo)



Motif 3: gabungan antara ragam hias di Candi Plaosan Lor PLL03 dan Candi Kalasan KAL03 (Gambar: Hadi Sunaryo)



Motif 4: Ragam hias di Candi Prambanan PRA08 (Gambar: Hadi Sunaryo)



Motif 5: Gabungan antara ragam hias di Candi Prambanan PRA34 sebagai ornamen utama ditambah isen-isen dari Candi Barong BAR02, Candi Kalasan KAL10, dan ornamen lain dari Candi Prambanan PRA 38 (Gambar: Hadi Sunaryo). Foto kanan adalah contoh produk kain Batik Candi Motif 5 yang diproduksi oleh perajin batik di Bayat, Klaten, Jawa Tengah

6. PENUTUP

Hasil penelitian secara umum menggambarkan tiga simpulan, yaitu simpulan berkenaan dengan ragam hias pada candi dan arca, simpulan yang berkaitan dengan batik, dan simpulan yang berkenaan dengan konversi ragam hias pada candi dan arca sebagai motif dan pola batik. Simpulan-simpulan tersebut adalah sebagai berikut.

- (1) Secara umum bangunan candi sebagai *heritage* harus dilestarikan dan dimanfaatkan karena memiliki keragaman dan kekayaan ornamen yang secara estetik maupun teknik dapat dikembangkan sebagai sumber inspirasi untuk pengembangan bahan grafis, termasuk kerajinan batik.
- (2) Pengelompokan ragam hias pada candi terdiri atas 14 kelompok yang tersebar di 11 situs candi, yaitu kelompok antefiks, belah ketupat, geometris, bunga, antropomorfik dan fauna, bangunan, kala, tumbuhan dan sulur, kertas tempel, benda, makara, sangkha, tirai, dan kelompok tumpal.
- (3) Ragam hias pada arca meliputi 7 kelompok, yaitu kelompok ikonografis, geometris, bunga, sulur dan tumbuhan, teratai, tumpal, untaian mutiara dan kelompok rantai.

- (4) Berdasarkan kesesuaian sebagai motif batik, ragam hias pada candi dan arca dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu ornamen utama, *pinggiran*, dan *isen-isen*.
- (5) Sebagai buah karya peradaban yang tinggi masa Mataram Kuna, nilai estetik dan nilai kultural ragam hias melekat pada nilai luhur yang terkandung pada bangunan candi dan arca. Oleh karena itu, ragam hias tersebut tidak semata-mata sebagai ornamen namun di dalamnya tertanam “roh” sebuah peradaban adiluhung yang berkembang maju sekitar abad VIII – X Masehi.
- (6) Sebagai bahan dasar grafis (melalui konversi) kerajinan batik, data ornamen pada candi dan arca dikemas dalam dua media, yaitu media digital berupa CD-Interaktif dan media tulis-cetak berupa kumpulan ornamen atau ragam hias pada candi dan arca. Hasil pengemasan diarahkan untuk dapat menjadi sumber inspirasi bagi diversifikasi motif batik. Untuk mendukung konsep ini maka hasil dari konversi juga diimplementasikan dalam wujud contoh produk “batik candi”, serta mempromosikan data dan dokumen ragam hias pada candi dan arca sebagai sebuah *webblog* dengan nama www.batikcandi.blogspot.com.

- (7) Salah satu aspek yang dapat dikembangkan adalah diversifikasi motif, yang saat ini menjadi tuntutan tersendiri oleh konsumen. Berkaitan dengan hal itu, konversi ragam hias pada candi dan arca di Prambanan menjadi pilihan diversifikasi motif batik yang secara kultural memiliki nilai khusus karena merupakan buah karya peradaban Mataram Kuna.
- (8) Dokumen digital yang telah diolah dalam bentuk CD-Interaktif, naskah katalog, dan *webblog* perlu dimanfaatkan sebagai bahan untuk kegiatan sosialisasi dan promosi, berkaitan dengan batik candi. Kegiatan tersebut dapat dilakukan antara lain melalui pembukaan “stand batik candi” di area Taman Wisata, atau lokasi lain yang dengan mudah dapat dikunjungi oleh wisatawan

DAFTAR PUSTAKA

- Adrisijanti, Inajati dan Jazi Eko Istiyanto. 2000. “Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengelolaan Warisan Budaya dalam Pengembangan Pariwisata”. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Terbatas Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pengelolaan Warisan Budaya dan Pengembangan Pariwisata, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1 April 2000.
- Ayatrohaedi, et. al. 1991. *Kamus Istilah Arkeologi I*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Childs, S. Terry. 2002. “The Web of Archaeology” dalam *Public Benefit of Archaeology*. Barbara J. Little (ed.). Florida: University Press of Florida, pp. 228-238.
- Cleere, Henry. 1989. “Introduction: The Rationale of Archaeological Heritage Management”. Henry F. Cleere (ed.) *Archaeological Heritage Management in the Modern World*. London: Unwin Hyman. pp. 1-19.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dumarcay, Jacques. 2007. *Candi Sewu dan Arsitektur Bangunan Agama Buddha di Jawa Tengah*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Haryono, Timbul. 1993. “Metodologi dan Aplikasinya dalam Penelitian Arkeologi” *Artefak* No. 13 Agustus 1993, pp. 9-14.
- Hodder, Ian. 1999. *The Archaeological Process An Introduction*. Oxford: Blackwell Publisher Ltd.

*Penulis adalah staff Balai Arkeologi Yogyakarta

-
- Hoop, A.N.J.Th. a Th. Van Der. 1949. *Indonesische Siermotieven*. Batavia: Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen.
- Istari, TM Rita. 2015. *Ragam Hias Candi-candi di Jawa*. Yogyakarta: Kepel Press.
- Kempers, A.J. Bernet. 1985. "Pembinaan Kembali Candi Prambanan, Menyambut Tercapainya Puncak Candi Prambanan". *Amerta*, No. 1, cetakan ke-2. Jakarta: Proyek Penelitian Purbakala Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, pp. 30-37.
- Nuryanti, Wiendu. 1996. "Introduction". Wiendu Nuryanti (ed.) *Tourism and Culture Global Civilization in Change?*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. pp. 1-10.
- Prawoto, Wahyoe dan Adhi Rachdian. 2004. "Database dan Sistem Informasi Arkeologi". Makalah disampaikan dalam Lokakarya Penyusunan Kebijakan Penelitian Arkeologi, Cisarua, 23-27 Agustus 2004.
- Santiko, Hariani. 1992. "*Candi Prambanan: Deskripsi, Latar Belakang Agama dan Masa Pendidirannya*". Laporan Penelitian. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Sedyawati, Edi et.al. 2012. "Dinasti, Agama, dan Moumen". *Indonesia dalam Arus Sejarah, Kerajaan Hindu-Buddha*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve. Pp. 171-203.
- Soejono, R. P. 1990. "Arkeologi di Indonesia in Vogelvlucht". Dalam *Monumen*. Seri Penerbitan Ilmiah No. 11 Edisi Khusus. Depok: F. Sastra UI.
- Soedarso. 1990. "Seni Lukis Batik, Riwayat Sebuah Transfer Fungsi yang Berhasil" dalam *Seni Lukis Batik Indonesia*. Yogyakarta: Taman Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta – IKIP Negeri Yogyakarta. Pp 7 – 30.
- Sudjiono, Suhartinah. 2006. "Pasang Surut Batik Tulis Bantul: Studi Kasus Batik Tulis Imogiri Tahun 1970-1998" dalam *Patra Widya Vol. 7 No. 3 September 2006*. Yogyakarta: BPSNT Yogyakarta.
- Sunaryo, Aryo. 2009. *Ornamen Nusantara: Kajian Khusus tentang Ornamen Indonesia*. Jakarta: Dahara Prize.
- Suryo, Djoko, et.al. 1999. *Dasar Pemikiran untuk Pengembangan Kawasan Prambanan Menuju Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pusat Studi Jepang Universitas Gadjah Mada & Pusat Penelitian dan Pengembangan Pariwisata Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Suyanto, A.N. 1990. "Batik dan Seni Kriya (Craft) ke Seni Murni (Fine Art), Pendekatan Dari Aspek Teknik". Dalam *Seni Lukis Batik Indonesia*. Yogyakarta: Taman Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta – IKIP Negeri Yogyakarta. Pp 89 – 98.
- Tanudirjo, Daud Aris, et. al., 1993/1994. "*Laporan Penelitian Kualitas Penyajian Warisan Budaya Kepada Masyarakat: Studi Kasus Manajemen Sumberdaya Budaya Candi Borobudur*". Yogyakarta: PAU-SS Universitas Gadjah Mada. Tidak terbit.
- Toekio M, Soegeng. 2000. *Mengenal Rragam Hias Indonesia*. Bandung: Angkasa.

DIMENSI MANUSIA DALAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

**Oleh :
Ign. Eka Hadiyanta***

I. Pendahuluan

Pada prinsipnya proses pembangunan bangsa hakikatnya tidak bisa hanya menekankan aspek fisik saja, tetapi harus mencakup aspek sosial, ekonomi, teknologi, dan budaya. Terlebih secara khusus dalam pembangunan yang terkait dengan konteks lingkungan budaya cq kawasan cagar budaya harus dilakukan secara komprehensif. Konsep itu bermaksud menjadikan manusia yang berinteraksi di dalamnya tidak hanya memantapkan eksistensi, tetapi juga esensinya sehingga dapat merealisasikan berbagai aspirasinya (Kartodirdjo, 1990: 15). Eksistensi manusia dan esensinya harus ditekankan untuk menjadikan keberadaan manusia dalam berbagai dimensinya menjadi semakin manusiawi (Sartre, 2002: 35). Oleh karena itu, konteks pembangunannya harus berkoherensi dengan kondisi dinamis yang terus berproses dalam ranah ruang, waktu, kausalitas, struktur sosial, kelembagaan, partisipasi, dan orientasi tujuan.

Upaya pelestarian cagar budaya secara luas merupakan bagian dari dinamika pembangunan nasional yang berkelanjutan. Mengingat cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud hasil pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang berperadaban tinggi. Berbagai potensi cagar budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), tersebar luas baik di kota maupun kabupaten. Dalam tataran pengaturan

yuridis formal Undang-undang RI (UU RI) No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pengertian cagar budaya adalah warisan budaya yang bersifat kebendaan, baik benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan dengan prosedur proses penetapan. Pelestarian cagar budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya melalui kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Subjek upaya dinamis dalam mempertahankan keberadaan cagar budaya adalah manusia. Di sisi lain upaya pelestarian itu sendiri harus mempunyai orientasi tujuan untuk menyejahterakan dan mengangkat harkat martabatnya.

Dalam era pengaturan UU RI No. 11 Tahun 2010 secara tegas menempatkan manusia dan masyarakat umumnya sebagai bagian dari subjek yang diberi peluang untuk menjadikan cagar budaya tetap terlindungi serta dapat dikembangkan dan dimanfaatkan. Pertanyaannya apakah dengan adanya perubahan visi itu menjadikan masyarakat benar-benar menjadi aktor dan subjek utama pelestarian? Apakah dimensi manusia benar-benar mendapatkan peluang menjadi urgensi sentral di dalam upaya mewujudkan asas dan tujuan pelestarian cagar budaya? Apakah peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama pemangku kepentingan terkait (*stakeholder*) di dalam usaha mewujudkan pelestarian yang berkeimbangan dengan usaha pemenuhan hak-hak serta

kewajiban masyarakat luas benar-benar menjadi urgensi utama. Di sisi lain bagaimana dapat mengupayakan “apa yang seharusnya” dalam mewujudkan pelestarian menjadi “sesuatu yang konkret terwujud” yaitu upaya pelestarian benar-benar menyejahterakan.

Manusia pada prinsipnya adalah makhluk yang multidimensi, baik dari sisi psikologis bersikap, berperilaku (*behavioral*), maupun potensi diri dalam menjalankan segala sesuatunya. Oleh karena itu, dimensi manusia dalam bidang pelestarian cagar budaya mempunyai beberapa perspektif, yaitu perspektif etik, aktor pelestari, masyarakat, partisipasi, pelaksanaan kebijakan pelestarian, dan institusi pemanfaatan. Melalui potensi diri, peran lembaga, dan kebijakan pada dasarnya manusia sebagai subjek dapat mengaktualisasikan diri tentang berbagai tujuan yang baik secara konkret dan utuh (Setiawan, 2014: 192). Dengan demikian, pelestarian yang menekankan peran penting manusia melalui aktualisasi diri serta pola proses interaksi antara subjek sebagai pelaku pelestarian dengan objek cagar budaya dalam berbagai perspektifnya.

II. Aspek Normatif dan Aktualisasi dalam Pelestarian

Aktualisasi pelestarian cagar budaya pada dasarnya tidak hanya terfokus bagaimana melakukan tata kelola warisan budaya material saja, tetapi juga ditujukan kepada manusia sebagai sumber daya manusia pelestari. Kualitas tindakan perlu diekstrapolasikan sebagai wujud rasa bertanggung jawab dan rasa berkewajiban dalam pelestarian cagar budaya, yang didasarkan pada aspek etika, asas tujuan, dan hak kewajiban. Eksistensi sebagai pelaku pelestarian cagar budaya ditentukan oleh kualitas interaksi, tindakan, proses internalisasi, dan pembudayaan

nilai penting cagar budaya, serta terbangunnya sikap partisipatif masyarakat. Oleh karena itu, aktualisasi etika dalam pelestarian cagar budaya *inheren* dengan upaya membangun eksistensi manusia secara lahir dan batin, baik dalam konteks kebangsaan, kepribadian budaya bangsa, berkeadilan, kepastian hukum, berkelanjutan, partisipatoris, pemenuhan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, pemenuhan hak – kewajiban dan pemenuhan akuntabilitas kebijakannya. Aspek-aspek normatif pada dasarnya dapat menjadi panduan adanya kebijakan formal yang dapat diaktualisasikan secara konkret yang menguntungkan subjek dan objek cagar budayanya.

A. Memahami Asas dan Tujuan Pelestarian Cagar Budaya

Eksistensi cagar budaya sebagaimana diatur di dalam konsideran Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui berbagai upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Aspek pelestarian cagar budaya berorientasi kepada asas-asas sebagai landasan dasar. Menurut pengertiannya, asas adalah dasar cita-cita yang menjadi tumpuan berpikir atau pun bertindak. Pelestarian cagar budaya sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan (UU RI No. 11/2010 Pasal 2) yaitu berdasarkan asas-asas yang menjadi landasan dapat diidentifikasi dalam beberapa aspek berikut.

1. Aspek ideologis (Pancasila, Kebhinekaan, dan kenusantaraan)
2. Aspek interaksi sosial (keadilan)
3. Aspek yuridis (ketertiban dan kepastian hukum)

4. Aspek fungsional (kemanfaatan, keberlanjutan, dan partisipasi)
5. Aspek kredibilitas (transparansi dan akuntabilitas).

Asas-asas dalam UU RI No. 11 Tahun 2010, prinsipnya merupakan bagian penting perspektif pelestarian yang harus menjadi pedoman pelaku pelestari. Dalam dimensi manusia maka menjadi asas dalam menjalankan perannya untuk berinteraksi dengan potensi cagar budaya yang akan diaktualisasikan dalam dinamika kehidupan di tengah masyarakat. Aktualisasi pelestarian cagar budaya berlandaskan rumusan-rumusan yang akan menjadi tujuan bersama dituangkan dalam cita-cita yang harus diwujudkan.

Tujuan bersama dalam pelestarian merupakan arah atau haluan yang akan dituju atau *goal orientation*. Koherensi dengan dimensi manusia sebagai subjek pelestari, maka beberapa haluan yang menjadi tujuan dalam pelestarian (Pasal 3) adalah sebagai berikut.

1. Melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia.
2. Meningkatkan harkat dan martabat bangsa.
3. Memperkuat kepribadian bangsa.
4. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
5. Menyebarluaskan informasi cagar budaya.

Orientasi beberapa tujuan tersebut didedikasikan untuk memajukan kebudayaan nasional dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Beberapa tujuan pelestarian secara substansi meliputi aspek

ideasional dan fungsional. Aspek ideasional diwujudkan dengan upaya melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat bangsa serta memperkuat kepribadian bangsa. Aspek fungsional diwujudkan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mempromosikan kepada masyarakat internasional.

Beberapa tujuan tersebut di atas juga sinkron dengan beberapa pokok pikiran dalam Nawacita terutama pada butir 5, 6, 8 dan 9 berikut.

1. Meningkatkan kualitas hidup manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan.
2. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
3. Melakukan revolusi karakter bangsa.
4. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinekaan dan menciptakan ruang dialog antara warga secara berkeseimbangan.

B. Memahami Pandangan Etika

Pengertian etika telah banyak dikemukakan oleh para ahli di antaranya Frans Magnis Suseno (1984: 13); Keraf (2002: 5), dan Haryatmoko (2004: 1987). Magnis mengemukakan bahwa pada dasarnya etika merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mampu menjawab pertanyaan mendasar, yakni tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak. Walaupun

mempunyai pengertian yang hampir sama, tentu etika berbeda dengan ajaran moral, karena rujukan disiplin etika adalah mempelajari nilai-nilai hidup dan aspek-aspek pola perilaku yang menjadi pedoman. Bagi Haryatmoko (2004: 187) etika adalah seni hidup yang mengarah kepada kebahagiaan untuk mencapai kebijakan. Dengan demikian, etika lebih mengarah pada bagaimana hidup yang baik, sehingga merupakan wacana normatif tetapi bukan berarti imperatif sebagaimana ajaran moral yang lebih bersifat mutlak dan transenden (Winarno, 2013: 20). Tidak jauh berbeda dengan dua ahli filsafat sebelumnya, menurut Keraf etika adalah kebiasaan hidup yang baik untuk diri sendiri dan masyarakat. Kebiasaan baik itu kemudian disosialisasikan kepada satu generasi ke generasi berikutnya sehingga terlembagakan atau mengalami institusionalisasi dalam masyarakat. Kebiasaan-kebiasaan baik harus dilakukan, sedangkan yang tidak baik harus ditinggalkan.

Suatu kebijakan pada dasarnya tidak hanya cukup dilandasi aspek normatif, yakni sebuah tindakan itu sesuai dengan panduan etika ataukah melanggar etika. Persoalan yang muncul mengapa suatu pelanggaran selalu terjadi dan dalam hal apa pelanggaran itu memiliki alasan pembenaran. Hal itu jarang menjadi pembahasan mendalam. Oleh karena itu, permasalahan etika sering dimaknai sebagai persoalan norma, moralitas, dan formalitas. Persoalan etika akan lebih bermakna apabila ditinjau dari filsafat praktis, sehingga telaah reflektif akan mampu menjelaskan dilema yang muncul secara mendalam. Terutama apabila persoalan itu secara kritis memahami kompleksitas persoalan upaya pelestarian cagar budaya.

Persoalan etika dari sisi praktis dapat merujuk dari etika deontologi dan etika utilitarisme (Berten, 1993: 242-254; Magnis, 1997). Etika deontologi dari Immanuel Kant, menekankan pentingnya kewajiban dijalankan. Baik dan buruknya tindakan tidak diukur dari tujuan atau konsekuensi yang ditimbulkan tetapi dari tindakannya itu sendiri. Wujud tindakan yang wajib dilaksanakan, tetapi ada tindakan yang terlarang atau tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, setiap perbuatan dan sikap sudah memiliki kualitas moral secara intrinsik (Magnis, 1997). Dengan demikian, fungsi etika ini menilai baik dan buruk secara “mutlak”. Kant mencontohkan bahwa dalam konsep kewajiban bersikap adil tidak didasarkan oleh pertimbangan manfaat yang diharapkan, akan tetapi didasarkan pemenuhan siapapun yang mempunyai hak mendapatkannya tanpa pertimbangan apakah pemenuhan hak itu akan dapat membahagiakan ataukah tidak. Etika deontologi Kant menegaskan bahwa hendaknya keadilan harus diwujudkan, karena etika dan kebaikan moral ada pada suatu kehendak dan bukan terletak pada apa yang tercapai melalui kehendak itu.

Etika utilitarisme menegaskan bahwa kita harus berbuat dan bertindak dengan kebaikan-kebaikan. Dampak kebaikan hendaknya lebih besar daripada dampak keburukannya. Etika utilitarisme sebelumnya dirintis oleh Jeremy Bentham (1748-1842) kemudian lebih dikaji secara komprehensif oleh filosof abad ke-19 yaitu John Stuart Mill (1806-1873). Etika utilitarisme bersifat konsekuensial dan universal. Hal ini terkait dengan akibat-akibat dari setiap perbuatan, baik individu maupun semua orang. Bersifat universal karena yang diperhitungkan tidak hanya sebatas individu saja, tetapi lebih

ditekankan kepada untuk umum atau semua orang (Berten, 1993: 247).

Di dalam upaya pelestarian cagar budaya, persoalan etika deontologi dan utilitarisme menjadi relevan, dengan catatan menjadi satu kesatuan secara komprehensif dengan aspek-aspek asas tujuan, prinsip-prinsip autentisitas, tugas, dan wewenang yang harus dilaksanakan oleh jajaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Etika deontologi dan utilitarisme merupakan suatu dasar etik bahwa segala sesuatu harus dijalankan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dan mewujudkan kebaikan untuk semua orang. Untuk mewujudkan panduan etik itu harus dijalankan secara berkeadilan. Dengan demikian, pemenuhan antara hak dan kewajiban sebagaimana yang diatur di dalam peraturan perundangan yang berlaku harus didasarkan asas dan tujuan pelestarian, juga harus selaras dengan panduan etiknya. Artinya, upaya pelestarian harus dipandu dengan etika pelestarian yang ada dan harus diperjuangkan untuk implementasinya. Subjek di ranah pemangku kepentingan harus mampu bersinergi dan berinteraksi dengan pelaku pelestari aktif secara arif, sehingga mereka tidak menjadi penonton atau objek kebijakan yang tidak berkeadilan.

C. Etika Pelestarian Cagar Budaya

Pemerintah dan Pemerintah Daerah berwenang menentukan etika pelestarian cagar budaya (Pasal 96 ayat 1). Mengacu kepada peraturan perundangan UU RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya, khususnya koherensi dengan asas, tujuan, tugas, dan wewenang bahwa etika pelestarian dapat dirumuskan sebagai berikut.

1. Menjamin terselenggaranya upaya pelestarian dengan cara perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan secara berkelanjutan.
2. Berlaku jujur dalam menentukan status cagar budaya dan menentukan kondisi cagar budaya terutama terkait dengan penentuan nilai penting, kriteria, keaslian, kelangkaan, dan/atau keutuhan cagar budaya.
3. Bersikap adil kepada pemilik, penemu, pelestari aktif, dan masyarakat pada umumnya yang menguasai cagar budaya.
4. Mengupayakan ketertiban dan kepastian hukum cagar budaya.
5. Pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya harus dapat menjamin kualitas nilai penting dan eksistensi cagar budaya secara maksimal.
6. Menjunjung tinggi partisipasi dan apresiasi masyarakat yang berkontribusi dalam pelestarian cagar budaya.
7. Mengedepankan sikap transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pelestarian cagar budaya.
8. Mengutamakan upaya pelestarian bagi peningkatan harkat martabat dan kepribadian bangsa.
9. Mengedepankan kepentingan masyarakat, terutama pelestarian untuk peningkatan kualitas hidup yaitu kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.
10. Memperhatikan kualitas standar atau baku mutu terhadap penelitian sesuai bidang kajian, dan upaya pelestarian

cagar budaya secara multidimensional dan interdisipliner.

Etika pelestarian tersebut di atas pada prinsipnya merupakan modalitas etik atau kerangka normatif untuk membangun integritas publik dalam “apa yang seharusnya” diimplementasikan kepada publik. Di sisi lain, menjadi kerangka refleksi tentang “apa yang telah dilakukan” dalam implementasi pelestarian cagar budaya. Di tingkat daerah DIY, etika pelestarian sudah tercantum di dalam Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang cagar budaya, contohnya Perda No. 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Pasal 11 (2). Secara substansial etika pelestarian tersebut didedikasikan untuk perangkat normatif bagaimana manusia bahkan institusi harus bertindak dan diwujudkan ke dalam langkah konkret upaya pelestarian cagar budaya.

Dalam ranah atau domain membangun akuntabilitas kebijakan maka harus ditinjau dari koherensi yang terintegrasi antara subjek dan manajemen organisasi atau institusi pelestarian. Oleh karena itu, bagaimana subjek dan manajemen organisasi sebuah institusi harus dapat melakukan tata kelola objek cagar budaya secara baik dan berkelanjutan. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut. *Pertama*, manusia atau subjek sebagai aktor pelestari aktif maupun yang berkoherensi dalam proses dinamika pelestarian harus dapat memperhitungkan kualitas tindakannya. *Kedua*, manajemen institusi harus mampu mengintegrasikan standar etika di dalam proses berputarnya roda organisasi yang dilakukan akan menjadikan layanan publik berkualitas dan relevan dimata masyarakat. *Ketiga*, kualitas pelaku atau subjek pelaksana kebijakan harus mempertimbangkan aspek-aspek transparansi, akuntabilitas, dan keadilan.

Hal itu menjadikan aspek menentukan sebagai tolok ukur integritas pelaku dan lembaganya (Haryatmoko, 2015: 253).

Dimensi manusia menjadi faktor signifikan dalam pertautan pelestarian yang berpijak pada aspek “upaya dinamis mempertahankan eksistensi cagar budaya”. Dalam aspek-aspek penyelenggaraan pelestarian umumnya, dan khususnya dalam hal momentum penemuan, penghargaan, kajian, membangun ketertiban, kepastian hukum, pengembangan, dan pemanfaatan tentu aspek dimensi manusia harus menjadi pertimbangan utama. Manusia sebagai subjek pelestarian harus menjadi fokus yang diperhitungkan dalam dinamika pelestarian. Terutama dalam hal implementasi kompensasi, insentif, membangun partisipasi, kesejahteraan, kemakmuran harus berasaskan keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam tata kelola pelestarian pada prinsipnya ada hubungan yang integral antara subjek – objek – peraturan (kepastian hukum) dan interaksi antara tiga aspek itu dilandasi dengan etika sebagai panduan etik ataupun normatif. Urgensi dalam pertautan itu dapat dirumuskan ke dalam aspek asas tujuan pelestarian cagar budaya serta hak-hak yang harus didapatkan subjek setelah menjalankan berbagai kewajiban hukumnya dalam pelestarian cagar budaya.

D. Hak – Kewajiban dan Akuntabilitas Kebijakan

Apa itu hak dan kewajiban? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu menurut hukum yang berlaku. Kewajiban adalah pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakan berdasarkan aturan atau

hukum yang berlaku (Sugono, 2014: 474, 1553). Hak-hak sebagai bagian konsekuensi dari adanya pengaturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah disebut sebagai hak legal. Terkait dengan UU RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai konsekuensi formal dan logis memberikan *reward* berupa hak kompensasi dan insentif bagi warga masyarakat yang telah aktif memberikan support dalam menjalankan kewajiban berperan serta dalam pelestarian cagar budaya. Kompensasi dapat diberikan kepada warga ataupun setiap orang, sedangkan insentif berupa dukungan advokasi, perbantuan lain yang bersifat nondana, serta pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik, terutama apabila telah melakukan kewajibannya melindungi cagar budaya sesuai ketentuan yang berlaku.

Di dalam etika utilitarisme bahwa kewajiban pada dasarnya mempunyai hubungan timbal balik atau korelasi positif dengan hak-hak yang ada. Terutama hal itu terkait dengan hak legal yang disandangnya. Contoh bahwa hak-hak legal yang muncul akibat konsekuensi pengaturan di dalam perundangan (UU No. 11/2010) akan disertai dengan adanya kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakannya. Dalam kasus temuan benda yang diduga cagar budaya oleh masyarakat, bahwa sebagai penemu mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan menyerahkan hasil temuannya untuk dilakukan kajian. Apabila ternyata benda itu memenuhi kriteria sebagai cagar budaya dan dimiliki negara, maka penemu akan mendapatkan hak kompensasi dari Pemerintah ataupun

Pemerintah Daerah. Terkait dengan pemilikan cagar budaya oleh masyarakat yang telah ditetapkan, maka pemiliknya pada dasarnya berhak untuk mendapatkan hak kompensasi dan insentif yang dapat berupa bantuan terkait dengan pemeliharaan dan pemugaran, bahkan dapat berupa pengurangan pajak dari pemerintah (Pasal 33 ayat 3).

Misi konkret yang hendak dicapai *reward* adalah pelestarian cagar budaya harus berdasarkan kepada aspek keadilan, ketertiban, keberlanjutan, partisipasi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Artinya warga yang telah mengapresiasi dan tertib melakukan upaya menjaga kelestarian cagar budaya secara mandiri harus diperlakukan dengan adil akan hak-haknya serta mendapatkan *reward* yang pantas, baik dalam bentuk kompensasi maupun insentif. Mengingat partisipasi merupakan bagian penting dari proses kesadaran yang dapat disinergikan dengan paradigma pembangunan berkelanjutan, sehingga cagar budaya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan secara komprehensif. Akhirnya, hal ini dapat digunakan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat luas. Momentum penghargaan dan memperhatikan hak-hak pelaku pelestari aktif dapat menjadi sumber inspirasi, bahwa berpartisipasi dalam pelestarian cagar budaya harus menjadi komitmen, kesadaran, dan kebanggaan warga masyarakat. Hak dan kewajiban tentu harus diletakkan pada momentum menempatkan manusia sebagai subjek yang apresiatif terhadap objek cagar budaya. Oleh karena itu, subjek pelaku pelestari merupakan modal sosial dan kultural dalam pelaksanaan pelestarian yang partisipatoris dan harus menjadi mitra strategis bagi subjek pemangku kepentingan dalam bidang pelestarian cagar budaya.

Institusi yang bertanggung jawab di dalam pelestarian cagar budaya tentu harus mengimplementasikan kebijakan ini secara transparan dan akuntabel. Aspek itu menjadi bagian penting di dalam prinsip akuntabilitas kebijakan publik yang harus dilaksanakan secara konkret. Dalam berbagai hal seperti yang telah dilakukan di BPCB DIY maupun pemerintah daerah, prinsip tersebut telah dijalankan sebagaimana hal berikut.

1. Kompensasi di dalam proses penghargaan temuan benda yang diduga cagar budaya.
2. Kompensasi penghargaan pelestari cagar budaya.
3. Kompensasi dan insentif pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya.
4. Membangun partisipasi dengan melakukan pelatihan dalam pemberdayaan kepada pemilik cagar budaya, pelajar, dan masyarakat sekitar situs cagar budaya.
5. Melaksanakan internalisasi kepada masyarakat untuk membangun kesadaran tentang arti penting cagar budaya.

Berbagai hal tersebut mengindikasikan adanya proses upaya membangun pemenuhan aspek hak-hak masyarakat yang terkait dengan asas dan tujuan pelestarian terutama dalam aspek fungsional dan ideologis. Peta permasalahan yang menonjol adalah hak-hak kompensasi dan insentif pemeliharaan–pemugaran bangunan milik masyarakat, baik yang dilakukan di BPCB DIY dan Pemerintah DIY telah dilakukan secara berkelanjutan namun belum maksimal dan intensif untuk menjangkau seluruh potensi. Pemberian

kompensasi kepada pemilik cagar budaya yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 (3) belum sepenuhnya menjadi urgensi kebijakan di Daerah Istimewa Yogyakarta. Terutama dengan cara pengurangan langsung pajak bumi dan bangunan (PBB). Pemda Kota Yogyakarta pada tahun 2010 secara insidental pernah melakukan pemberian bantuan pembayaran PBB, tetapi bukan pengurangan PBB secara sistemik. Bahkan pelaksanaan program pelatihan dalam rangka pemberdayaan masyarakat yang dilakukan BPCB DIY belum menjangkau keseluruhan masyarakat, karena masih terbatas di Desa Tamanmartani (Kecamatan Kalasan), Desa Bokoharjo dan Desa Sambirejo (Kecamatan Prambanan). Orientasi tujuan membangun kesejahteraan masyarakat terutama di sekitar situs cagar budaya belum signifikan dirasakan, sehingga masih perlu dilakukan upaya kerja keras untuk mewujudkannya. Mewujudkan akuntabilitas dan kepercayaan publik dalam pelestarian cagar budaya tentu berkoherensi dengan aspek-aspek bagaimana mengimplementasikan aspek-aspek normatif, ideologis, dan fungsional sehingga dapat tercapai tujuan pelestarian.

III. Membangun Kualitas Kehidupan dalam Pelestarian Cagar Budaya

A. Kebijakan Pelestarian : Perubahan dan Keberlanjutan

Secara umum kebijakan kebudayaan khususnya di bidang pelestarian terus mengalami pergeseran atau dinamika perubahan. Pada saat sekarang, terlepas kondisi rasionalitas pemerintahan di dalam era masyarakat modern, menurut Foucault masih melihat negara menjadi faktor dan entitas yang penting pada saat sekarang (Jones, 2015: 22). Dalam hal paradigma

pelestarian cagar budaya apabila kita cermati sejak era Hindia Belanda sampai dengan Kemerdekaan RI (awal kemerdekaan, orde baru, dan reformasi) bersifat dinamis dan terus mengikuti perkembangan zaman. Artinya, secara substansial asas tujuan dan kebijakan pelestariannya selaras atau kontekstual dengan visi kekuasaan pemerintahan yang berlangsung.

Dasar kebijakan pelestarian di Indonesia mengalami berbagai dinamika perubahan dalam orientasi kebijakannya (Hadiyanta, 2013: 45). Pada era Hindia Belanda (1913) dasar hukum pelestarian yaitu *Monumenten Ordonantie* 1931 dengan orientasi kebijakan pelestarian antara lain: pengembangan ilmu pengetahuan; berorientasi kepada objek benda; peran dominan oleh pecinta benda purbakala (antikuarian), dan untuk kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Masa orde baru dengan dasar hukum UU RI No. 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, mempunyai orientasi kebijakan pelestarian antara lain, pengembangan ilmu pengetahuan; perlindungan, dan penyelamatan; aspek ideologi untuk penguatan kepribadian bangsa; kebijakan sentralistik; tidak maksimal melibatkan masyarakat; objek pelestarian berorientasi pada situs dan benda. Pada era reformasi dengan dasar hukum UU RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya mempunyai orientasi kebijakan pelestarian antara lain, penekanan untuk peningkatan harkat martabat bangsa dan kesejahteraan masyarakat; pelestarian bersifat dinamis dan prinsip pengembangan dengan pendekatan kajian, revitalisasi, dan adaptasi; membagi kewenangan dengan daerah atau pendekatan desentralisasi; menekankan model partisipasi dan keberkelanjutan; objek pelestarian tidak hanya benda tetapi juga bangunan, struktur,

situs, dan kawasan (*cultural landscape*); subjek pelestarian sangat kompleks yaitu pemerintah, masyarakat, swasta, akademisi, lembaga adat, lembaga swadaya, dan berbagai unsur mitra pelestarian. Kepentingan publik atau masyarakat dalam upaya pelestarian yang bersifat dinamis tersebut mendapatkan ruang untuk berpartisipasi secara berkelanjutan.

Apabila dicermati maka sejak era Hindia Belanda, awal kemerdekaan, orde baru, sampai reformasi terdapat dinamika perubahan orientasi secara signifikan. Terutama dalam hal sifat dan subjek pelestarian, yaitu dari bersifat statis ke dinamis; sentralistik ke desentralistik, dan kepentingan Pemerintah maupun Pemerintah Daerah kepada kepentingan manusia sebagai anggota masyarakat yang berkoherensi dengan cagar budaya. Tentu pemerintah melalui berbagai lembaga masih menempatkan diri menjadi regulator yang rasional, yakni sebagai pengemban dan penegak peraturan perundangan. Terutama dalam menjalankan perannya sebagai bagian pelaksanaan peraturan dan penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap pelanggaran pidana cagar budaya.

Dinamika perubahan paradigma pelestarian itu koherensi dengan momentum dan implikasi proses demokratisasi politik pemerintahan pada era reformasi. Sebagai penanda yaitu adanya penguatan peran individu dalam kerangka demokrasi politik, bahkan cenderung menekankan proses yang liberalistik. Sistem ini menjamin peran dan hak-hak individual secara lebih kuat, bahkan lepas dari kooptasi peran sentral pemerintahan. Model itu lazim dalam pemerintahan otoritarian dengan arah pembangunan yang mengejar pertumbuhan semata sebagaimana era orde baru (Jones, 2015: 22-23). Dengan demikian, berbagai tata kelola pelestarian

cagar budaya—terutama dalam pengembangan dan pemanfaatan – yang masih dengan dasar hukum MO maupun UU RI No. 5 tahun 1992 pada masa orde baru tentu harus disesuaikan dan dilakukan evaluasi kritis. Suatu contoh orientasi tata kelola pengembangan dan pemanfaatan kawasan candi di Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko yang dilakukan PT. Taman Wisata Candi (TWC) secara substansial juga harus disesuaikan dan dimaksimalkan dengan model pariwisata berkelanjutan dan terpadu (Setyastuti, 2005). Model pariwisata berkelanjutan dan terpadu tentu secara komprehensif mempunyai koherensi dengan asas, tujuan, nilai penting, serta prinsip-prinsip pelestarian cagar budaya yang diatur dalam UU RI No. 11 tahun 2010 yakni, bermanfaat bagi masyarakat luas dengan tetap menjaga eksistensi dan esensi cagar budayanya secara konkret dan bijaksana.

B. Membangun Partisipasi dan Masa Depan Pelestarian

Partisipasi pada prinsipnya membangun peran dan keikutsertaan di dalam suatu dinamika kehidupan. Hal ini tidak dapat hadir dengan sendirinya tetapi harus dilakukan dengan proses panjang. Membangun partisipasi dan kerangka keberlanjutan harus dilakukan dengan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan secara sistemik, intensif, serta berdaya guna. Keikutsertaan masyarakat dapat dimaknai sebagai bagian tak terpisahkan dari sikap dan kepribadian manusia sebagai anggota masyarakat yang telah sadar mau berinteraksi, mempunyai pemahaman, dan mampu menginternalisasikan berbagai nilai penting serta asas tujuan pelestarian cagar budaya. Tingkat kesadaran tertentu masyarakat berkoherensi dengan apresiasi yang pada akhirnya mempunyai kemampuan

untuk mengambil peran dalam bidang pelestarian secara partisipatoris. Pemahaman kesadaran tentang harapan masa depan dan partisipasi pada prinsipnya dapat diposisikan ke dalam kerangka aktualisasi potensi diri yang baik. Menurut Maslow bahwa aktualisasi potensi diri harus dikendalikan dengan sistem nilai sebagai penuntun dan dilaksanakan dengan penuh komitmen (Setiawan, 2014: 191). Dalam konteks pelestarian cagar budaya, aktualisasi diri harus dipandu dengan aspek etika, nilai-nilai penting, autentisitas, keberlanjutan, ketertiban, kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab. Aspek-aspek itu menjadi kerangka pengendalian agar aktualisasi dalam bentuk membangun partisipasi, kesadaran dalam bersikap, dan berperilaku dalam membangun masa depan sesuai dengan prinsip pelestarian cagar budaya. Dengan demikian, akan didapatkan hasil positif sesuai koridor dan ketentuan yang berlaku bahkan dapat berdaya manfaat bagi masyarakat luas.

1. Membangun Sikap, Perilaku, dan Kepedulian

Pada prinsipnya, terlestarikannya cagar budaya berkoherensi dengan keikutsertaan atau partisipasi dan apresiasi masyarakat secara keseluruhan. Terlebih orang-orang yang mau terlibat langsung secara intensif sebagai pelestari aktif, karena merekalah aktor atau pelaku yang dapat menjadi ujung tombak pelestarian cagar budaya. Pelaku pelestari adalah aktor yang mau dan mampu dengan sadar, sukarela, serta mempunyai kepedulian melaksanakan perannya di bidang pelestarian. Dalam konteks pengaturan perundang-undangan mereka dapat diidentifikasi sebagai orang yang telah dan sedang menjalankan

kewajiban secara intensif tanpa adanya paksaan. Oleh karena itu, pelestari aktif yang terdiri atas pemilik cagar budaya, penemu, masyarakat di lingkungan situs cagar budaya, cendekiawan, dan komunitas peduli adalah orang-orang yang menjadi tumpuan serta harapan terlestarikannya cagar budaya secara berkelanjutan.

Pelestari aktif hendaknya diposisikan menjadi bagian kerangka upaya dinamis untuk mempertahankan eksistensi cagar budaya secara komprehensif dan berkelanjutan. Dengan demikian, keberadaan cagar budaya tidak menjadi beban bagi masyarakat, bahkan cenderung dianggap menjadi buah simalakama atau bahkan secara ekstrem dikatakan sebagai malapetaka yang merugikan. Secara umum di wilayah DIY pemangku kepentingan cagar budaya telah mempunyai kebijakan untuk mengelola pelestari aktif sebagai potensi. Berbagai cara telah dilakukan yaitu dengan memberikan kompensasi dan fasilitasi. Beberapa program yang dapat disebut antara lain pemberian penghargaan pelestari cagar budaya di lingkup kabupaten, kota, dan di seluruh DIY, baik yang dilakukan oleh Pemda maupun UPT Pusat BPCB DIY. Program yang lebih menyeluruh adalah pemberdayaan masyarakat di lingkungan kawasan cagar budaya Prambanan DIY, yang meliputi Desa Tirtomartani, Desa Bokoharjo, dan Desa Sambirejo. Substansi kegiatan yang dilakukan adalah melaksanakan forum curah gagasan (FGD) dan internalisasi dengan cara komunikasi dialogis; workshop kerajinan batik (tulisan dan jumpitan), pembuatan souvenir, dan

pemanduan; inisiasi organisasi pengelola desa budaya maupun kelompok desa wisata.

Beberapa hal terkait yang perlu dilaksanakan kepada masyarakat adalah peran konkret atau keterlibatan langsung kelompok-kelompok masyarakat itu dalam tata kelola pemanfaatan yang akan membawa asas manfaat kesejahteraan bagi masyarakat. Hal yang penting dilakukan adalah harus lebih intensif menggalang dukungan dan menyasar ke berbagai sektor potensial pelestari cagar budaya. Hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat di Kompleks Candi Prambanan sebagian besar masih bersifat informal, yaitu sebagai pegawai dan pedagang (kios dan pengasong). Fenomena menyolok yang masih terjadi saat ini adalah keterlibatan publik sebagaimana layaknya pertautan hubungan kelompok masyarakat sebagai anak binaan belum dilaksanakan menyeluruh. Di sisi lain, pemberian kompensasi maupun fasilitas masih bersifat temporer atau belum sistemis. Untuk membangun sikap, perilaku, dan kepedulian, maka dua tahun terakhir ini di kawasan Prambanan dan Kalasan penguatan kualitas masyarakat rutin dilakukan BPCB DIY secara intensif. Terbukti di lingkungan Candi Barong dan Candi Ijo kelompok sadar wisata dan perajin mulai menunjukkan perilaku yang memanfaatkan momentum kunjungan wisatawan. Ke depan substansi keterlibatan ini harus lebih diperkuat, baik organisasi, jangkauan, maupun kualitas perannya.

Menularkan "virus pelestarian" kepada orang lain dan masyarakat luas adalah suatu keniscayaan yang sangat

bermanfaat bagi visi–misi pelestarian. Untuk melembagakan misi itu, institusi pelestarian (UPT pemerintah *an sich*) tentu tidak dapat bekerja secara sektoral. Oleh karena itu, harus membangun kemitraan dengan berbagai sektor kehidupan. Bukanlah hal yang berlebihan bahwa pada dasarnya unsur terpenting dari upaya pelestarian bukan aspek-aspek materi atau fisik pengamanan objek semata, tetapi justru subjek ataupun dimensi peran konkret manusia. Peranan itu harus *inheren* dengan membangun sikap dan perilaku yang menjadi sebuah kebiasaan atau *habitus* untuk selalu mempunyai kepedulian memberikan kontribusi yang konstruktif. Sikap, perilaku, dan kepedulian kepada cagar budaya, komunitas masyarakat di sekitar situs, dan lembaga pelestari pada dasarnya lebih merupakan bagian dari kewajiban moral, membangun kepercayaan (*trust*), dan *habitus* di bidang sosio-budaya daripada hitungan-hitungan rasionalitas mutlak semata (Fukuyama, 2010: 15).

2. Membangun Harapan Masa Depan

Manusia adalah makhluk multidimensi, mempunyai banyak sifat, akal budi, dan mengandung berbagai unsur yang saling bertautan. Tanpa mengesampingkan suatu kemungkinan sikap dan tindakan bertolak belakang atau sikap jahat manusia antara satu dengan lainnya, bahwa para pemikir etika menemukan bahwa dalam hubungan atau relasi di antara manusia ada benih serta sikap hidup yang baik. Sikap dan perilaku baik itu harus dapat membangun kepercayaan serta kebajikan sosial yang menguntungkan bahkan memakmurkan (Fukuyama, 2010: 65). Benih sikap baik

manusia itu disebut *altruisme*, yaitu mempunyai pengertian signifikan suatu pandangan dan sikap hidup yang memberi perhatian kepada aspek kebaikan, kebahagiaan, dan kesejahteraan. Dalam ranah privat, sikap ini dapat membangun semangat pribadi untuk bekerja keras dan dapat bermanfaat untuk membangun kualitas hidupnya. Untuk ranah publik atau masyarakat sikap *altruisme* dapat diekspresikan yakni bagaimana seseorang mempunyai sikap dapat bermanfaat bagi sesama dan mengupayakan kebaikan lingkungannya untuk menuju kesejahteraan dan kemakmuran bersama (Mangunhardjana, 1997: 16-17, Magnis Suseno, 1997).

Masyarakat di lingkungan situs dan kawasan cagar budaya harus dilibatkan, melibatkan diri, serta mau dan mampu berperan aktif berpartisipasi dalam upaya melakukan pelestarian, baik dengan cara perlindungan, pemanfaatan, dan pengembangan. Koherensi dengan peraturan perundang-undangan yang ada masyarakat pada dasarnya mempunyai kewajiban yang dijalankan dan hak-hak yang harus diterima. Keseimbangan antara keduanya menjadikan masyarakat tidak hanya menjadi “objek kebijakan” tetapi juga menjadi “subjek kebijakan”. Dalam konsideran Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, disebutkan bahwa cagar budaya dilestariakan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional dan untuk membangun kesejahteraan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Paradigma pelestarian yang ada saat ini tidak bersifat pasif atau sekedar “mengawetkan benda dan bangunan” saja, tetapi bersifat dinamis

yaitu menyeimbangkan aspek-aspek ideologis, akademis, ekologis, fungsional, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Di dalam masyarakat sampai sekarang selalu muncul beberapa pemahaman yang didasari rasa kekhawatiran yaitu muncul anggapan apabila sebuah rumah yang dikategorikan cagar budaya sudah tidak bisa diapa-apakan atau statis, karena tidak dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan. Persoalan lain yaitu berada di dekat situs dan kawasan cagar budaya akan tidak berkembang serta banyak menemukan kendala beraktivitas dalam pengembangan sebuah potensi. Bahkan masyarakat di lingkungan potensi cagar budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan hanya akan menjadi penonton atau pelengkap objek saja.

Anggapan yang muncul seperti itu merupakan sebuah tantangan yang perlu diupayakan jawabannya. Oleh karena itu, perlu menyosialisasikan tentang aspek pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, baik berupa benda, bangunan, situs, struktur, dan kawasannya. Tentunya keberhasilan pengembangan dan pemanfaatan sebuah kawasan cagar budaya tidak dapat meninggalkan peran masyarakat sekitarnya. Aspek pelestarian dalam arti pengembangan dan pemanfaatan harus berorientasi membangun kebersamaan di antara pemangku kepentingan (*stakeholder*) pada umumnya dan peran masyarakat (*community base conservation*) pada khususnya. Rasa khawatir itu harus dikikis dengan cara mengupayakan model pelestarian cagar budaya yang dapat menyejahterakan secara lahir

dan batin. Artinya, hasil pemanfaatan di samping untuk kelangsungan organisasi pengembang dan yang melakukan pemanfaatan, juga harus mampu berdampak positif terhadap kualitas kelestarian objek cagar budaya; berorientasi membangun kualitas penyelenggaraan proses pengembangan dan pemanfaatan; serta secara signifikan membangun manusia di lingkungan masyarakat. Sejauh mana aspek-aspek tersebut di atas sudah diimplementasikan di dalam tata kelola kawasan cagar budaya, sehingga pemenuhan hak – kewajiban dan orientasi sikap membangun kesejahteraan atau *altruisme* dapat terwujud dan harus menjadi pencerminan serta urgensi kerangka evaluasi.

IV. Catatan Penutup

Memahami dimensi manusia dalam pelestarian cagar budaya merupakan urgensi yang harus dikedepankan. Implementasinya tentu untuk menjadikan objek cagar budaya semakin mempunyai eksistensi dan menjadikan subjek manusianya dalam kondisi lebih baik serta mampu memberikan kontribusi secara partisipatif. Pengalaman bersama dalam tata kelola pelestarian cagar budaya sampai saat ini, bahwa aspek normatif, ideologis, dan fungsional belum didukung secara maksimal implementasi aspek yuridis formal, institusi yang terpadu, dan penganggaran yang memadai. Keberadaan UU RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang telah diundangkan harus maksimal menjadi acuan dasar hukum setiap upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Atas dasar peraturan perundangan itu maka pembangunan bangsa dalam konteks pelestarian cagar budaya dapat menjadikan dimensi manusia sebagai titik sentral implementasi kebijakannya.

Terwujudkannya pelestarian secara baik apabila pertautan antara subjek dan objek cagar budaya dapat terjalin secara sinergis. Manusia sebagai subjek pelestari, baik dalam ranah perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, dengan berbagai aktivitasnya pada dasarnya menjadi kunci yang sangat menentukan terjaminnya kualitas eksistensi, esensi, dan berbagai aspirasi terhadap objek cagar budaya. Kualitas manusia dalam arti kemampuan, sikap, komitmen, integritas, dan akuntabilitas pada dasarnya menentukan terhadap terwujudnya kualitas kebijakan, implementasi program, aktivitas, dan proses terselenggaranya tata kelola cagar budaya yang memadai. Dalam berbagai isu maka pertautan dimensi manusia yang terkait dengan institusi pelestari dan objek cagar budaya, aspek hak–kewajiban, institusi pemangku kepentingan pemanfaatan atau korporasi, aspirasi masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat di sekitar situs cagar budaya harus terus dikembangkan kualitas perannya. Implementasi pelestarian cagar budaya secara komprehensif, baik terkait dengan pelaku pelestari, masyarakat, kelembagaan, dan korporasi dapat membawa manusia sebagai subjek atau pelaku utama. Kondisi itu hasilnya akan memberikan kepercayaan dan menguntungkan, serta menempatkan manusia pada taraf yang manusiawi atau humanis. Pengembangan kualitas peran itu tentu harus mempertimbangkan aspek-aspek berikut ini.

- 1) Memberikan prioritas utama bidang pembelajaran dan pendidikan yang dapat memberikan pemahaman dan kesadaran pentingnya pelestarian cagar budaya. Pembelajaran berbagai aspek di dalam perspektif humaniora dengan demikian sangat penting dikemukakan. Secara umum yakni dengan melakukan pembelajaran kebudayaan dan literasi yang dapat membangun pemahaman masyarakat kepada lingkungan budayanya. Pemahaman

secara khusus yaitu membangun pembelajaran pelestarian secara intensif sejak dini, baik secara formal, nonformal, dan informal. Secara formal dan nonformal harus dilakukan dengan membangun kognisi atau pengetahuan melalui dunia pendidikan; pengembangan afeksi, dan pembelajaran dengan mengerjakan sesuatu (*learn to do*). Secara informal bahwa masyarakat perlu juga diberikan penguatan kemampuan (*capacity building*) agar mempunyai pemahaman dan kualitas partisipasi. Dengan demikian, masyarakat tidak sekedar menjadi penonton dalam proses interaksi sosial, ekonomi, dan budaya yang dinamis di lingkungannya.

- 2) Melakukan internalisasi dan eksternalisasi agar subjek pelestari, baik di lembaga pelestarian, korporasi, dan masyarakat mempunyai sikap, perilaku, kepedulian, dan rasa berkewajiban untuk dapat meningkatkan kualitas pelestarian secara signifikan.
- 3) Aspek-aspek normatif (asas, tujuan, dan etika), ideologis (filosofi kebangsaan, harkat martabat bangsa, dan karakter bangsa), fungsional (implementasi tujuan pelestarian untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat) menjadi kata kunci yang harus diimplementasikan secara konkret di dalam upaya pelestarian cagar budaya secara berkesinambungan. Terkait hal tersebut, maka dimensi manusia mempunyai tanggung jawab moral untuk menempatkan dirinya sebagai “jembatan sosial dan budaya” (*social and cultural bridging*) yang memberi harapan konkret masa depan.
- 4) Memberikan keyakinan kepada masyarakat bahwa pemerintah dan pemerintah daerah tidak hanya menuntut kewajiban yang harus dipenuhi, tetapi juga akan memberikan hak-haknya.

- 5) Kualitas objek cagar budaya dalam bentuk atraksi situs (*site attraction*) yang baik akan meningkatkan kuantitas dan kualitas daya penawaran (*supplay*), akhirnya dapat dinikmati oleh subjek pengunjung sehingga dapat meningkatkan kualitas pemahaman nilai penting dan membangun pengalaman dalam proses pembudayaan.
- 6) Melakukan evaluasi secara berkesinambungan terhadap berbagai kebijakan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan agar kualitas subjek pelestarian, objek cagar budaya, dan kesejahteraan masyarakat terutama yang berada di sekitar situs dapat benar-benar dirasakan. Langkah ini untuk meningkatkan kualitas peranan *stakeholder*, baik pemerintah daerah dan terutama swasta atau korporasi pemanfaatan cagar budaya skala besar, agar dapat memberikan kontribusi secara signifikan. Dengan demikian, seluruh insan dan ekosistem pelestarian dapat berjalan secara terpadu.

*Penulis, Ka. Unit Kerja Dokumentasi dan Publikasi
BPCB D.I. Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2010. Undang-undang RI No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
- _____. 2012. Perda Provinsi DIY, No. 6 tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya.
- Bertens, K. 2007. *Etika*. Cetakan Ke-10. Jakarta: Gramedia.
- Budihardjo, Eko. 1997. *Arsitektur Pembangunan dan Konservasi*. Jakarta: Djambatan.
- Damanik, Jamianton. 2005. *Penanggulangan Kemiskinan melalui Pariwisata*. Yogyakarta: Pusat Studi Pariwisata UGM.
- Fukuyama, Francis. 2010. *Trust: Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran*. Cetakan Ke-2. Yogyakarta: Qalam.
- Hadiyanta, Eka Ign. 2014. "Kawasan Keraton Yogyakarta: Pelestarian dan Altruisme Masyarakat", dalam *Buletin Cagar Budaya*, Jakarta: Direktorat PCBM, Vol. II/2014 .
- _____. et. al. (penyunting). 2013. *100 th Purbakala: Menapak Jejak Peradaban Bangsa*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta.
- Haryatmoko. 2015. *Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Yogyakarta: Kanisius.
- Jones, Tod. 2015. *Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia*. Jakarta: Obor dan KITLV.
- Kartodirdjo, Sartono. 1990. "Fungsi Humaniora dalam Pembangunan Nasional", dalam *Kebudayaan Pembangunan dalam Perspektif Sejarah*. Yogyakarta: UGM Press.
- Magnis Suseno, Franz. 1997. *13 Tokoh Etika: Sejak Zaman Yunani Sampai Abad ke-19*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mangunhardjana. 1997. *Isme-isme dalam Etika dari A – Z*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sartre, Jean Paul. 2002. *Eksistensialisme dan Humanisme*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setyastuti, Ari. 2005. "Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Candi-candi di Kawasan Prambanan". *Tesis S2*, tidak diterbitkan. Program Magister Kajian Pariwisata, UGM.
- Setiawan, Hendro. 2014. *Manusia Utuh: Sebuah Kajian atas Pemikiran Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugono, Dendy. 2014. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi IV. Jakarta: Gramedia.
- Winarno, Budi. 2013. *Etika Pembangunan*. Yogyakarta: Caps.

KONSEP MANDALA PADA CANDI-CANDI BUDDHA DI JAWA ABAD IX - X MASEHI

Oleh:
YosesTanzaq, S.S.*

A. Latar Belakang Sejarah dan Konsep Agama Buddha

Latar belakang keagamaan suatu candi dapat dilihat melalui tiga hal, yaitu pertama pada bentuk dan hiasan arsitektur, terutama pada hiasan kemuncak; pada objek pemujaan pada candi tersebut yang biasanya adalah arca-arca tokoh dewa dari agama yang melatarbelakanginya; dan dari adanya data tertulis yang menyebutkan mengenai latar belakang keagamaan bangunan candi tersebut. Candi Buddha memiliki hiasan arsitektural berupa stupa. Hiasan stupa dapat ditemui pada hiasan kemuncak candi utama, hiasan komponen pada bangunan, dan pada bangunan candi perwara yang berbentuk stupa. Adanya hiasan stupa berindikasi kuat bahwa candi ini memiliki latar belakang agama Buddha. Stupa merupakan lambang universal dari agama Buddha, yang hakikatnya ialah lambang Sang Buddha dan ajarannya (Frédéric, 1995: 72). Menurut legenda, asal mula bentuk stupa berasal dari pesan Sang Buddha untuk membakar tubuhnya setelah beliau wafat, kemudian abu atau relik yang berasal dari jenazahnya disimpan dalam stupa. Sang Buddha kemudian menunjukkan bentuk stupa dengan melipat jubahnya, kemudian menaruh mangkuk terbalik di atasnya, kemudian di atas mangkuk tersebut didirikan tongkat secara tegak (Moertjipto dan Bambang Prasetyo, 1993: 32-34). Data lain yang dapat digunakan sebagai acuan dalam menentukan latar belakang keagamaan suatu candi ialah data ikonografi, yang berupa arca-arca yang masih *insitu*. Selain temuan arca-

arca pada bangunan candi, juga ditemukan arca-arca sebagai temuan lepas. Arca-arca tokoh dari agama Buddha, seperti arca Dhyani Buddha, Bodhisatwa, dan beberapa arca dewi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa suatu candi memiliki latar belakang agama Buddha.

Agama Buddha didirikan oleh seorang tokoh yang bernama Siddhārtha Gautama yang dilahirkan pada tahun 563 SM dan wafat pada tahun 483 SM. Siddhārtha merupakan anak dari seorang raja di Kerajaan Kapilavastu, daerah Kosala yang bernama Çuddhodana dengan istrinya Dewi Māya. Pangeran Siddhārtha dibesarkan dalam lingkungan kerajaan yang mewah, hingga pada suatu saat ia keluar istana dan melihat banyak kejadian yang dialami oleh manusia, seperti: sakit, tua, dan meninggal. Pengalaman tersebut membuat Pangeran Siddhārtha meninggalkan istana untuk mencari arti akan siklus kehidupan dan cara mengakhirinya, melalui latihan meditasi (Wirjosuparto, 1957: 95-97). Pada akhirnya, setelah enam tahun menjalani meditasi, beliau dapat mencapai penerangan sempurna atau mencapai tingkat ke-Buddhaan, sehingga Pangeran Siddhārtha disebut sebagai Buddha. Dalam meditasinya, Sang Buddha telah memahami apa yang dikenal dengan *ārya sātṃyāni* atau empat kebenaran mulia. Empat kebenaran mulia terdiri atas: *dukkha* (penderitaan), *samudaya* (sebab-akibat), *nirodha* (penghilangan keinginan), dan *marga* (delapan jalan). Penderitaan merupakan siklus kehidupan yang segala sesuatunya terdapat sebab-akibat, dan cara mengatasinya ialah

menghilangkan segala keinginan melalui delapan jalan (Hadiwijono, 1979: 31).

Setelah wafatnya Sang Buddha (*Parinirvana*), ajaran Sang Buddha dikembangkan oleh para murid (Biksu) dan pengikut Buddha, yang disebut Saṅgha. Pada tahun 383 SM, diadakan pertemuan Saṅgha di Rajagṛha yang berhasil menghimpun ajaran Buddha dalam Kitab Vinaya dan Sutrā (Sutta). Perpecahan mulai timbul dalam anggota Saṅgha pada pertemuan Saṅgha yang kedua di Vaisali. Perpecahan timbul akibat adanya perbedaan pendapat antara para biksu yang berpegang teguh dengan ajaran lama dengan para biksu yang menginginkan adanya pembaharuan dalam ajaran Buddha (Hadiwijono, 1979: 66). Adanya perbedaan pendapat inilah yang memunculkan dua golongan dalam Saṅgha, yakni: Sthaviravada yang selanjutnya dikenal dengan nama Hinayana atau Theravada, di mana golongan ini terdiri atas orang-orang yang memegang ajaran lama, dan yang kedua adalah golongan Mahasanghika yang dikenal dengan nama Mahayana. Dalam perkembangan selanjutnya, ajaran dari Mahayana lebih berkembang luas hingga ke Cina, Jepang, Korea, bahkan hingga ke Sumatra dan Jawa (Wirjosuparto, 1957:101).

Perbedaan utama antara Hinayana atau Theravada dengan Mahayana, ialah pada keanggotaan Saṅgha dan tujuan akhir. Keanggotaan Saṅgha menurut golongan Hinayana ialah para biksu dan biksuni saja, berbeda dengan Mahayana yang menganggap keanggotaan Saṅgha ialah seluruh penganut agama Buddha. Selain itu, perbedaan lain ialah tujuan akhir dari golongan Hinayana ialah mencapai kesempurnaan atau kesucian tingkat *arahat*, lepas dari *samsara* melalui cara meditasi dan menjalankan disiplin dalam agama Buddha (*vinaya*). Berbeda dengan golongan Mahayana yang menganggap tujuan akhir bukan saja mencapai kesempurnaan secara individu, akan tetapi mencapai kesempurnaan dengan cara menyatukan diri dengan Buddha

melalui proses berbuat kebajikan (dharma) dan dengan bantuan makhluk yang sudah mencapai kesempurnaan terlebih dahulu, yang disebut sebagai bodhisatwa (Wirjosuparto, 1957: 105). Ajaran Mahayana sangat dipengaruhi oleh dua ajaran, yaitu: Bhakti dan Tāntra. Ajaran Bhakti menekankan penyembahan kepada Buddha yang dianggap sebagai dewa (Hadiwijono, 1979: 70). Ajaran Bhakti juga memunculkan konsep adanya bodhisatwa (Suwanto dalam Yogaswara, 2000: 31). Dalam konsep Mahayana, bodhisatwa dianggap makhluk yang sudah mencapai kesempurnaan, namun belum memasuki nirwana karena masih mau membantu para makhluk yang lain untuk mencapai kesempurnaan.

Adanya konsep bodhisatwa, tidak lepas dari adanya konsep dalam Mahayana mengenai tiga bentuk atau lapisan dunia yang disebut dengan *trikaya*. *Trikaya* terdiri atas Dharmakaya, Sambhogakaya, dan Nirmanakaya. Dharmakaya menggambarkan bentuk pelepasan, yakni alam tanpa bentuk atau rupa, sehingga Dharmakaya dianggap sebagai alam dari para dhyāni buddha. Sambhogakaya menggambarkan alam pikiran dari para bodhisatwa, dan Nirmanakaya menggambarkan alam pikiran dari Manusi Buddha. Konsep *trikaya* terjadi akibat dari kekuatan Adibuddha, yang kemudian Adibuddha beremanasi menjadi lima dhyāni buddha atau Pancatathāgatha yang mewakili lima unsur kosmis (*skanda*) yang diwakili oleh empat arah mata angin dan pusat. Ajaran Tāntra muncul akibat pengaruh dari filsafat yang berkembang di India, yaitu, Madyamika dan Yogacara. Filsafat Madyamika mempunyai pemikiran mengenai *sunyata*, di mana dalam dunia ini segala sesuatunya bersifat kosong atau semu. Pada filsafat Yogacara, dipentingkan unsur-unsur kesadaran dalam diri manusia yang perlu dikembangkan melalui latihan meditasi. Kedua filsafat ini mempengaruhi ajaran Tāntra, di mana ajaran Tāntra ini berkembang menjadi sebuah sekte yang disebut dengan Tāntrayana

atau nama lain seperti: Māntrayana, Māntranaya, dan Vajrayana).

Tāntrāyana berasal dari kata *tāntra* dan *ayana*, kata *tāntra* dapat diartikan sebagai benang atau sarang laba-laba, sedangkan *ayana* berarti kendaraan atau dalam hal ini aliran. Jadi Tāntrāyana merupakan suatu aliran yang berkaitan dengan ajaran mistik dan perbuatan gaib yang bersifat rahasia. Ajaran Tāntrāyana menekankan penyatuan jiwa individu dengan jiwa kosmik melalui meditasi dan upacara-upacara ritual, sebagai jalan untuk mencapai kesempurnaan sesingkat-singkatnya (Pott, 1966:1). Hal ini berbeda dengan ajaran Mahayana yang mencapai kesempurnaan melalui proses yang sangat lama. Cara pencapaian kesempurnaan ajaran Tāntrāyana melalui meditasi dan upacara ritual ini menjadikan ajaran Tāntrāyana bersifat rahasia dan mistik (*esoterik*). Ajaran Tāntrāyana yang dikaitkan dengan kerahasiaan dimaksudkan untuk membimbing orang yang sudah siap untuk mencapai kesempurnaan dengan jalan singkat dan bukannya untuk seseorang yang belum siap sehingga dapat menimbulkan akibat buruk (Magetsari, 1997:17).

Kitab keagamaan yang pertama kali memuat ajaran Tāntrāyana yaitu Kitab Guhyasamajātāntra. Kitab ini diperkirakan berasal dari abad III Masehi (Magetsari, 1997: 33), berisikan mengenai ajaran-ajaran Tāntrāyana yang bersifat rahasia, sehingga ajaran Tāntrāyana hanya dapat diajarkan oleh seorang guru yang sudah ahli. Selain ajaran yang bersifat rahasia, kitab ini juga memuat tentang konsep-konsep panteon dalam agama Buddha, khususnya Tāntrāyana (Parjana, 1996: 96). Panteon secara harfiah dapat berarti semua dewa (tuhan). Kata panteon dapat diartikan sebagai keseluruhan dewa-dewa yang dikenal dalam suatu pemeluk agama tertentu (Bhattacharyya 1968, 31).

Pada permulaan agama buddha berkembang, konsep panteon belum terbentuk, namun semenjak berkembangnya aliran Mahayana, tokoh Siddhārtha Gautama mulai dianggap sebagai dewa yang dipuja. Seiring dengan perkembangan agama Buddha, konsep panteon juga berkembang semakin kompleks, dengan ditambahkan sejumlah bodhisatwa dan dewa-dewi (Wirjosuparto, 1957:105-106). Kitab agama Buddha yang paling tua memuat penjelasan mengenai konsep panteon ini ialah kitab Manjuçrimulakālpā. Namun kitab ini belum begitu jelas dalam mendeskripsikan konsep panteon dalam agama Buddha. Kitab yang mendeskripsikan konsep panteon dalam agama Buddha, khususnya aliran Tāntrāyana, secara jelas ditemukan dalam kitab Guhyasamajātāntra. Dalam kitab ini mulai dikenal lima dhyāni buddha beserta *saktinya*, mantra, dan mandala (Bhattacharyya 1968, 32). Lima dhyāni buddha menggambarkan lima *skandha* yang memancarkan lima keluarga dewa (*kula* atau *kuleṣa*), yang terdiri atas: *Dvesa*, *Moha*, *Raga*, *Cintamani*, dan *Samaya*. Keluarga dewa inilah yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pengklasifikasian dewa-dewi dalam agama Buddha, khususnya aliran Tāntrāyana. Setiap dewa atau dewi diberi identitas yang berbeda-beda, seperti: jumlah kepala, jumlah tangan, bentuk mudrā, atribut yang dikenakan dan/atau dibawa, warna, dan sebagainya (Bhattacharyya, 1968: 34; Wirjosuparto, 1957: 105).

Sejarah perkembangan aliran Tāntrāyana terdiri atas empat fase. Fase pertama, yaitu awal kemunculan aliran Tāntrāyana, pada abad IV M, yang memperkenalkan cara baru dalam ritual agama Buddha, seperti penggunaan mantra, mudra, mandala, dewa, dan konsep ketuhanan. Fase kedua ditandai dengan munculnya Vajrayana pada pertengahan abad VIII M, yang memunculkan konsep lima *dhyāni buddha*. Fase ketiga ialah munculnya Kalacakra Tāntra yang memunculkan konsep kesamaan antara roda

waktu (*kalacakra*) dengan *prajna upaya*, yaitu kesatuan antara kebijaksanaan dengan sifat welas asih. Fase keempat yaitu fase Sahajāyana, yang beranggapan bahwa kebenaran tidak diperoleh dari latihan atau ritual saja, tetapi juga diikuti dengan kegiatan yoga.

Ajaran Buddha Mahayana yang terpengaruh aliran Tāntrāyana ini kemudian berkembang hingga ke Nusantara. Berkembangnya Tāntrāyana ke Nusantara, mungkin akibat dari adanya hubungan dengan dinasti Pāla di India. Raja Devapaladeva dari dinasti Pāla pernah memberikan sebidang tanah untuk pendirian bangunan wihara yang dipergunakan bagi pendeta dari Suvarnavipa, yang ditandai dengan adanya prasasti Nalanda yang berangka tahun 860 M (Magetsari, 1997: 10).

Bukti-bukti adanya agama Buddha Mahayana yang terpengaruh aliran Tāntrāyana, atau yang disebut Mahayana-Tāntra di Jawa, yang paling tua ialah Prasasti Kalasan yang berangka tahun 778 M. Prasasti ini menyebutkan adanya pembangunan bangunan suci untuk Dewi Tarā (*Tarābhāwana*). Dewi Tarā merupakan *sakti* dari *dhyāni buddha* atau bodhisatwa, yang hanya dikenal dalam agama Buddha Mahayana-Tāntra. Selain data prasasti, juga ditemukan data tertulis lain yang memuat ajaran agama Buddha Mahayana-Tāntra, yaitu Kitab Sang Hyang Kamāhayānikan. Kitab ini diperkirakan berasal dari abad VIII M hingga abad X M (Magetsari, 1997: 26-34). Kitab ini sangat penting karena satu-satunya kitab lengkap yang berisi konsep-konsep agama Buddha Mahayana-Tāntra di Jawa. Isi pokok dari kitab tersebut berhubungan dengan ajaran Mahayana dan Tāntrāyana yang menitikberatkan pada ritual Tāntrāyana, yang didahului dengan melaksanakan ajaran Mahayana.

Kitab Sang Hyang Kamāhayānikan terdiri atas empat bagian. Bagian pertama disebut dengan Sang Hyang Pamutus, kitab ini merupakan bagian pembuka, yang berisi cara-cara berperilaku baik

sesuai dengan ajaran Buddha. Bagian kedua disebut dengan Sang Hyang Kamāhayānan Mantranaya, yang berisi persiapan yang dilakukan sebelum menerima ajaran yang dirahasiakan (Tāntrāyana). Bagian ketiga disebut dengan Sang Hyang Kamāhayānikan, bagian utama dari kitab ini, berisi konsep-konsep dan panteon agama Buddha. Bagian keempat disebut dengan Savavidhana, di mana isinya merupakan petunjuk tentang perawatan jenazah (Magetsari, 1997: 24-25).

Bagian utama kitab Sang Hyang Kamāhayānikan berisi konsep agama Buddha Mahayana-Tāntra. Konsep ajaran Buddha yang tertuang dalam kitab ini ialah suatu pengetahuan sempurna (*samyakjñāna*) yang dimanifestasikan sebagai suatu zat yang tertinggi. Zat yang tertinggi ini kemudian menjelma dalam tiga tingkatan, yaitu: Sang Hyang Divarupa, Bhatarā Ratnatraya, dan Bhatarā Pancatathāgatha. Sang Hyang Divarupa dapat diartikan sebagai Sang Hyang yang mendua. Dalam Sang Hyang Divarupa terdapat dua anasir yang berbeda namun keduanya memiliki suatu keterkaitan. Sang Hyang Divarupa dapat dipandang sebagai laki-laki dan perempuan, sehingga Sang Hyang Divarupa sering diwujudkan dalam bentuk Adibuddha dengan *sakti*-nya dalam bentuk *yab-yum*. Sang Hyang Divarupa kemudian menjelma menjadi Bhatarā Çri Sākyamuni berwarna putih dengan sikap tangan (*mudra*) *dhvaja*, di mana sisi kanan Bhatarā Çri Sākyamuni melahirkan Bhatarā Çri Lokeshvara berwarna merah dengan *dhyānāmudrā*, sedangkan di sisi kirinya melahirkan Bhatarā Çri Vajrapāni berwarna biru dengan *bhūmisparçāmudrā*. Ketiganya disebut sebagai Ratnatraya, yaitu Buddha, Dharma, dan Saṅgha, yang juga dianggap sebagai *Tattva*, yaitu: *Kaya*, *Vak*, dan *Citta*, atau sebagai *Sila*, yang terdiri atas *Asih*, *Punya*, dan *Bakti* (Magetsari, 1997: 314).

Bhatarā Pancatathāgatha terdiri atas Vairocana, Aksobya, Ratnasambhava, Amitābha,

dan Amoghasiddhi. Bhatarā Vairocana lahir dari wajah Bhatarā Çri Sākyamuni, sedangkan Bhatarā Sri Lokeswara memecah dirinya menjadi Bhatarā Amitabha dan Bhatarā Ratnasambhava. Bhatarā Sri Vajrapāni juga memecah dirinya menjadi Bhatarā Aksobya dan Bhatarā Amoghasiddhi kemudian keluar para dewata yang bertugas mengatur dunia, yakni: Isvara, Brahma, dan Wisnu dari Bhatarā Vairocana. Berdasarkan konsep panteon yang termuat dalam kitab Sang Hyang Kamāhayānikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya perpaduan antara agama Buddha aliran Mahayana-Tāntra dengan agama yang telah ada di Jawa sebelumnya, yaitu agama Hindu Siwa. Hal tersebut memengaruhi perkembangan agama Buddha Mahayana-Tāntra dengan agama Siwa, sehingga menghasilkan aliran Siwa-Buddha pada masa selanjutnya, hingga runtuhnya Kerajaan Majapahit pada awal abad XVI M.



Gambar: Yantra Tibet dengan bahan kain
(Sumber:<http://himalayantraders.com>)

B. Konsep Mandala dan Panteon Agama Buddha

Perkembangan aliran Tāntra dalam agama Buddha telah melahirkan suatu bentuk ritual baru, yaitu berupa penggunaan mandala. Mandala secara harfiah diartikan sebagai lingkaran, di mana dalam konsep agama Buddha, khususnya aliran Mahayana-Tāntra, mandala dapat diartikan sebagai lingkaran gaib atau diagram geometris yang merefleksikan alam semesta, yang berisikan susunan dewa-dewi, baik berupa simbol, atribut, suku kata, maupun figur dari dewa atau dewi itu sendiri (Bhattarcharyya, 1968: 436; Frédéric, 1995: 34; Tucci, 1969: 81). Mandala merupakan proyeksi dari dunia kedewaan yang bersifat ideal, di mana dapat dijadikan sebagai salah satu yantra, yakni alat bantu meditasi yang keberadaannya dapat diciptakan dalam pikiran ataupun digambarkan pada berbagai media, seperti kertas, kain, dan sebagainya.

Pada perkembangannya, mandala juga dipakai dalam perencanaan pembuatan dan penataan bangunan suci, karena di dalamnya terdapat susunan atau konstelasi dari dewa dan dewi pada suatu pemujaan (Liebert, 1976:168). Dalam hal ini, mandala berkaitan dengan ruang, di mana ruang ini dipisahkan dari wilayah yang tadinya bersifat profan menjadi suatu ruang yang sakral melalui bagian-bagian dari suatu ruang yang ditandai secara khusus, sehingga tempat tersebut dianggap mempunyai kekuatan gaib atau ditempati oleh para dewa (Tanudirdjo, 2011:117). Bentuk mandala pada rancangan bangunan suci adalah bentuk geometris yang berupa persegi dan lingkaran. Bentuk persegi dan lingkaran dianggap sebagai bentuk yang paling hakiki yakni sebagai bentuk dasar dari bentuk yang lain, oleh karena itu bentuk inilah yang dipakai sebagai konsep pembangunan bangunan suci terutama pada bangunan suci yang bersifat Buddhis baik di India maupun di Jawa.

Susunan atau konstelasi panteon agama Buddha pada mandala, digambarkan berlapis dengan susunan berjenjang semakin ke pusat semakin tinggi tingkat kedewaannya yang mengarah kepada suatu kebenaran tertinggi. Mandala dalam hal ini hanya berfungsi sebagai sarana meditasi untuk membimbing ke arah yang benar dalam mencapai kebenaran tertinggi itu sehingga siapa pun dewa atau dewi yang menempati pusat mandala pada intinya adalah perwujudan dari kebenaran tertinggi (Sedyawati, 2009: 133). Hal ini membuat variasi mandala menjadi sangat banyak, baik dari segi bentuk maupun tokoh yang terdapat pada pusat mandala. Sebagai contoh, kitab Nispannayogāvali yang memberikan uraian dari 26 varian mandala (Bhattarcaryya 1949, 89), bahkan pada perkembangannya terdapat lebih dari 3.500 varian mandala. Dari banyaknya varian mandala, ada dua mandala besar yang banyak digunakan, yaitu *Garbhadhātu-Mandala* dan *Vajradhātu-Mandala* (Frédéric, 1995: 37-39).

Dua mandala tersebut dikenal dengan mandala kembar, karena keduanya mempunyai tokoh sentral yang sama, yakni Dhyāni Buddha Vairocana, dan keduanya melambangkan dunia. Mandala ini sangat populer digunakan pada pertengahan abad VIII M di Jepang, dan banyak kuil Buddha terutama dari aliran Shingon yang dibangun dengan konsep kedua mandala ini (Frédéric, 1995: 37). Berikut ini adalah uraian tentang kedua mandala tersebut.

Garbhadhātu-Mandala

Garbhadhātu-Mandala atau merupakan mandala yang merepresentasikan dunia, di mana mandala ini digunakan dalam meditasi untuk kebahagiaan dan keselamatan semua makhluk di dunia untuk mencapai penerangan sempurna, sehingga mandala ini juga disebut dengan *Mahākaraṇāgarbha-Mandala*, yaitu mandala yang mengandung rasa welas asih yang besar.

Mandala ini diuraikan dalam kitab Mahāvairocana Sūtra yang ditulis pada abad ke VIII M oleh Vajrabodhi yang membawa mandala ini dari India ke Cina dan Jepang (Moens, 2007: 79; Frédéric, 1995: 37). Pada *Garbhadhātu-Mandala*, tokoh sentral ditempati oleh Dhyāni Buddha Vairocana dalam bentuk Mahāvairocana yang dikelilingi oleh 414 bodhisatwa dan dewa-dewi, yang terbagi menjadi 11 kelompok yang tergabung dalam tiga kelas ditambah satu kelompok Kamadhātu yang berisi dewa-dewa pengiring (Moens, 2007: 85-86; Frédéric, 1995: 37), yaitu:

a. Kelas Buddha

Kelas Buddha merupakan perwujudan dari tingkatan tertinggi, yang diwujudkan dalam tujuh kelompok, yaitu;

1. Kelompok Padma Berkelopak Delapan (Kelas Buddha)
Kelompok ini merupakan kelompok penghuni dari pusat mandala
Kelompok ini terdiri atas Mahāvairocana di tengah, dikelilingi oleh empat dhyāni buddha dan empat bodhisatwa, yaitu:
 - Dhyāni Buddha Amitābha di barat;
 - Avalokiteṣvara di barat laut;
 - Dhyāni Buddha Amoghasiddhi di utara;
 - Maitreya di timur laut;
 - Dhyāni Buddha Aksobhya di timur;
 - Samanthabhadra di tenggara;
 - Dhyāni Buddha Ratnasambhava di selatan;
 - Manjuçri di barat daya.
2. Kelompok Sada-Shiva Vidyaraja
3. Kelompok Maheshvara
4. Kelompok Sākyamuni atau Maitreya
5. Kelompok Manjuçri
6. Kelompok Ākāṣagarbha
7. Kelompok Samanthabhadra

b. Kelas Padma

Kelas Padma merupakan perwujudan dari rasa welas asih yang besar. Kelas Padma diwakili oleh dua kelompok, yaitu:

1. Avalokiteṣvara
2. Kṣitigarbha

c. Kelas Vajra

Kelas Vajra merupakan perwujudan dari kekuatan dan kebijaksanaan agung. Kelas Vajra diwakili oleh dua kelompok, yaitu:

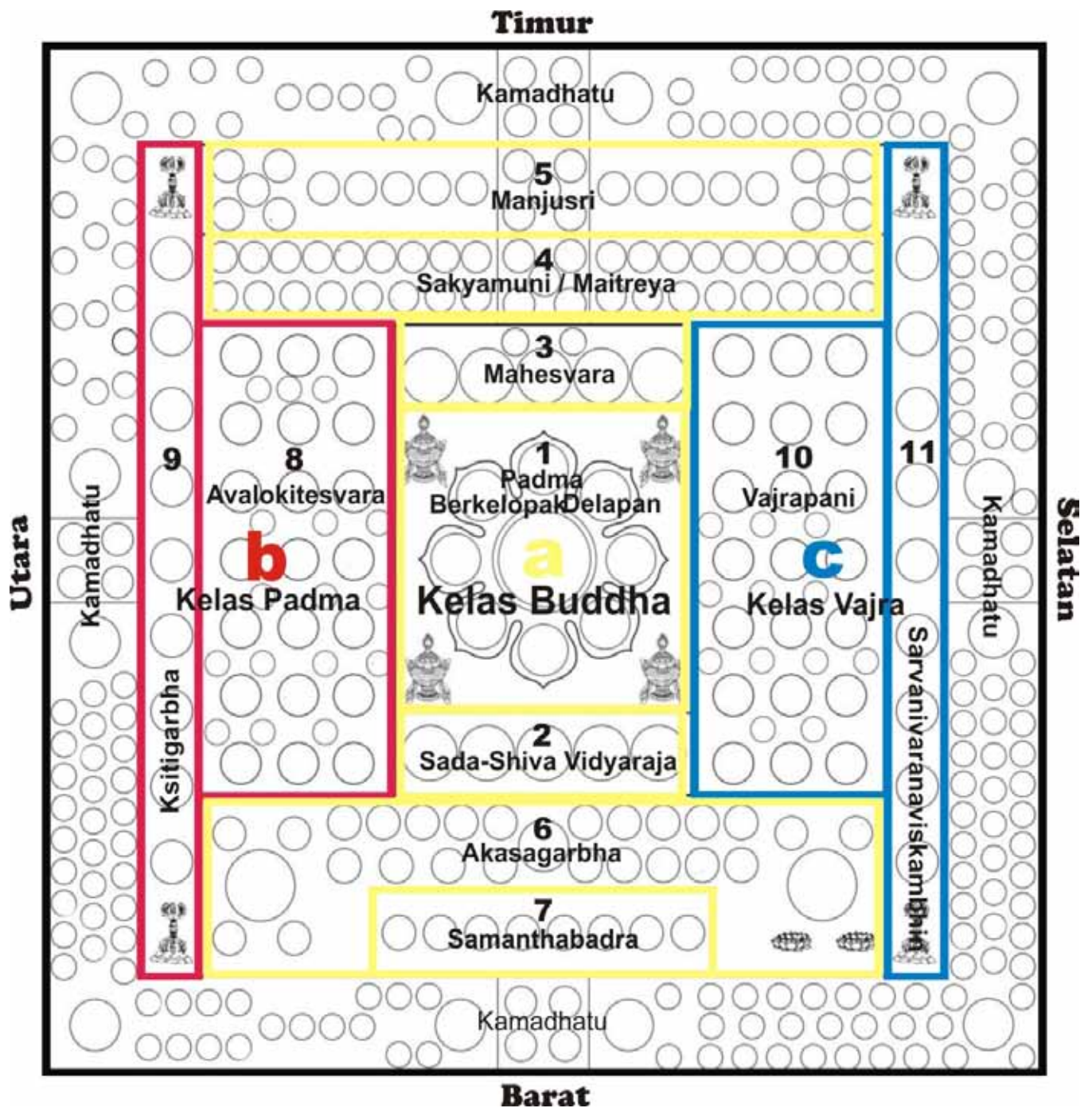
1. Vajrapāṇi
2. Sarvanivaraṇaviskambhin



Gambar *Garbhadhātu-mandala* (Taizōkai Mandara)

Lukisan di atas kain sutra abad IX M, dari Kuil Toji, Kyōto, Jepang

Sumber: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Taizokai.jpg>, diakses tanggal: 25 Maret 2011



Gambar Panteon Buddhis dalam *Garbhadhātu-mandala*

Sumber: Moens 2007, 84; <http://www.thangka.de/Gallery-3/Cosmos/9-6/sketchyards.gif> diakses tanggal: 25 Maret 2011 dengan modifikasi penulis

Vajradhātu-Mandala

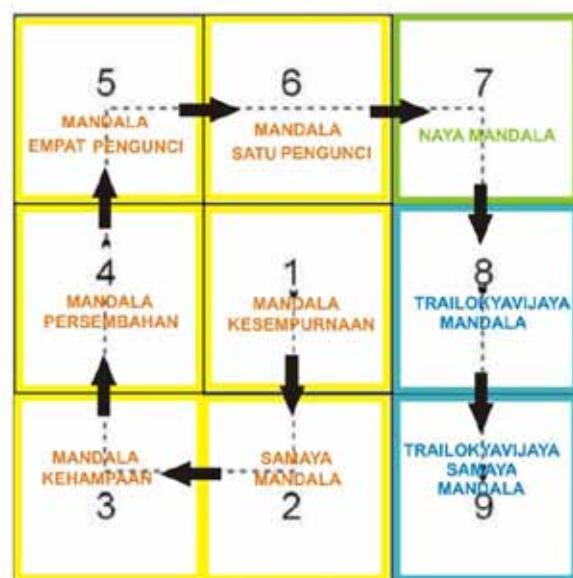
Vajradhātu-Mandala merupakan mandala yang merepresentasikan dunia, dimana mandala ini digunakan dalam meditasi untuk kebahagiaan dan keselamatan diri sendiri hingga mencapai penerangan sempurna. Mandala ini diuraikan dalam kitab *Sarvatathāgathatattvasamgraha* (Frédéric, 1995:38) dan kitab *Nispannayogāvali* (Bhattarcharyya, 1949) dan dibawa ke Cina dan Jepang oleh seorang tokoh bernama Vajrabodhi pada abad VIII M (Frédéric 1995, 37).

Vajradhātu-Mandala terdiri atas sembilan kuil atau submandala, di mana setiap submandala ditempati oleh *dhyāni buddha*, *dhyāni bodhisatwa*, *Tarā*, dan dewa-dewi pengiring lainnya, yang jumlahnya mencapai 1.461 dewa-dewi, di mana semuanya terbagi dalam lima kelas yaitu, Kelas Buddha, Kelas Padma, Kelas Vajra, Kelas Ratna, dan Kelas Karma. *Sub-Mandala* pada *Vajradhātu-Mandala* terdiri dari tiga tingkatan yaitu, *Svasambhogakaya* yang terdiri atas enam submandala, *Parasambhogakaya* yang terdiri dari satu submandala, dan *Nirmanakaya* yang terdiri dari dua submandala. Tingkatan pada *Vajradhātu-Mandala* dapat dilihat dari cara membaca mandala tersebut yang dimulai dari submandala tengah kemudian ke bawah membentuk spiral searah dengan jarum jam (Frédéric, 1995: 38).

Bagian yang paling penting dalam *Vajradhātu-Mandala* ialah bagian tengah dari *Vajradhātu-Mandala*, di mana bagian tengah tersebut ditempati oleh tokoh sentral yakni, Mahāvairocana. Pada bagian tengah *Vajradhātu-Mandala*, Mahāvairocana digambarkan duduk di tengah dikelilingi oleh empat *dhyāni buddha* dan 16 bodhisatwa. *Dhyāni Buddha Amitābha* di barat, *Dhyāni Buddha Amoghasiddhi* di utara, *Dhyāni Buddha Aksobhya* di timur, dan *Dhyāni Buddha Ratnasambhava* di selatan, masing-masing *dhyāni buddha* dikelilingi oleh empat dewa *vajra*.

Pada lingkaran selanjutnya terdapat kelompok dewa pemikat, kelompok dewa wewangian, dan kelompok dewa cahaya (Bhattarcaryya, 1949: 54). Pada lingkaran luar terdapat empat bodhisatwa pada setiap arah mata angin (Bhattarcaryya, 1949: 54-55), bodhisatwa-bodhisatwa tersebut adalah berikut ini.

- Arah timur: Bodhisatwa Maitreya, Bodhisatwa Amoghadarṣi, Bodhisatwa Sarvāpāyanjaha, dan Bodhisatwa Sarvaçokatamonirghātamati.
- Arah selatan: Bodhisatwa Gandhahasti, Bodhisatwa Suraṅgama, Bodhisatwa Gaganaganja, dan Bodhisatwa Jnanāketu.
- Arah barat: Bodhisatwa Amitaprabha, Bodhisatwa Candraprabha, Bodhisatwa Badrapāla, dan Bodhisatwa Jāliniprabha.
- Arah utara: Bodhisatwa Vajragarbha, Bodhisatwa Aksayamati, Bodhisatwa Pratibhānakūta, dan Bodhisatwa Samantabhadra.



Keterangan

- 1 - 6 Svasamboghakaya
- 7 Parasamboghakaya
- 8 - 9 Nirmanakaya

Gambar: Skema pembacaan *Vajradhātu-Mandala*
(Sumber: Moens 2007, 84 dengan modifikasi penulis)



Gambar *Vajradhātu-mandala* (Kōngokai Mandara)
Lukisan di atas kain sutra abad IX M, dari Kuil Toji, Kyōto, Jepang

Sumber: <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kongokai.jpg> diakses tanggal: 25 Maret 2011



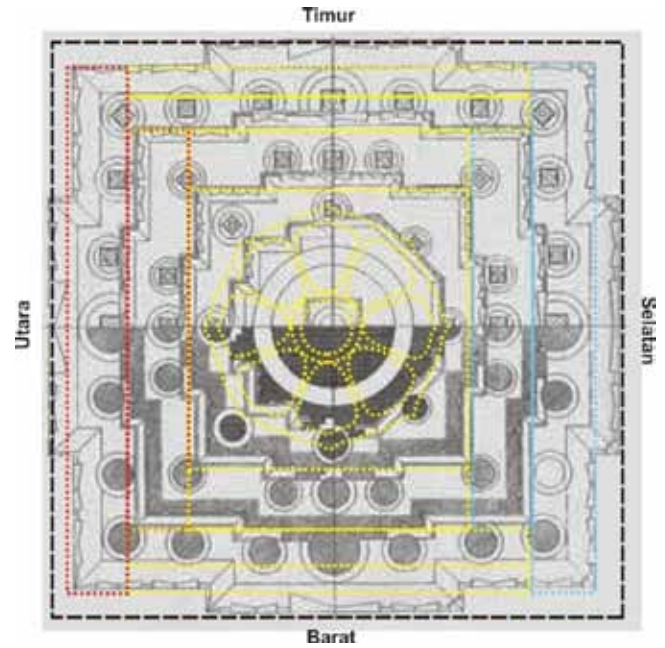
Gambar *Panteon* Buddhis Pada Bagian Tengah *Vajradhātu-mandala*
Berdasarkan Kitab *Nispannayogāvali*

Sumber: Bhattarcaryya 1949, 54-57; <http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kongokai.jpg>
diakses tanggal: 25 Maret 2011 dengan modifikasi penulis

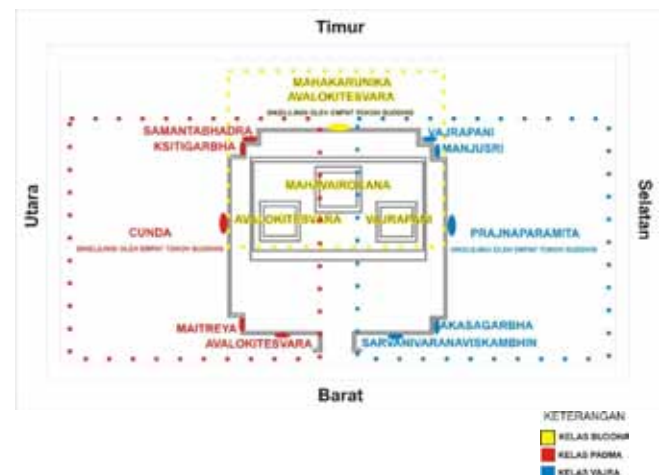
Konsep Mandala pada Candi-candi Buddha di Jawa Abad IX - X Masehi

Konsep keagamaan dalam pembuatan bangunan suci di Jawa pada abad IX-X M, tentunya menggunakan konsep mandala, baik pada bangunan Hindu maupun Buddha. Penggunaan konsep mandala tersebut dapat dilihat dari arsitektur bangunan suci tersebut baik dari segi tata letak seperti adanya candi induk yang dikelilingi oleh candi perwara, maupun dari segi penataan arca-arca yang ada di dalamnya. Berdasarkan tinggalan-tinggalan bangunan suci agama Buddha pada abad IX-X M, setidaknya terdapat dua jenis pemujaan yaitu, jenis pemujaan kepada Ratnatraya (Triratna) dan pemujaan kepada Tathāgatha (Sedyawati, 2009: 134), sebagaimana tercantum dalam kitab Sang Hyang Kamāhayānikan, bahwa pemujaan dapat berupa *sākāra-jñāna*, yakni suatu proses “pembadanan” dari Bhatāra Buddha menjadi Bhatāra Ratnatraya, yang terdiri atas ÇriÇākyamuni, Avalokiteçvara, Vajrapāni, dan Bhatāra Pancatathāgata, yang terdiri atas lima *dhyāni buddha* (Magetsari, 1997: 313).

Bangunan suci yang orientasi pemujaannya kepada Ratnatraya (Triratna), umumnya ditandai dengan adanya tiga arca utama pada bilik candi induk yakni, Buddha yang diapit oleh dua Bodhisatwa. Sebagai contoh bangunan suci jenis ini ialah Candi Mendut. Candi Mendut terletak di Desa Mendut, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Pada Candi Mendut, terdapat tiga buah arca pada bilik utama candi, tiga arca tersebut diidentifikasi sebagai arca Mahāvairocana yang diapit oleh Avalokiteçvara pada bagian kanan dan Vajrapāni pada bagian kiri (Pott 1966, 117; Soekmono 1974, 126; Moens 2007,90). Pada bagian dinding luar Candi Mendut terdapat relief yang menggambarkan tokoh bodhisatwa dalam agama Buddha. Tokoh-tokoh tersebut yaitu, Avalokiteçvara, Maitreya, Cundā, Ksitigarbha, Samantabhadra,



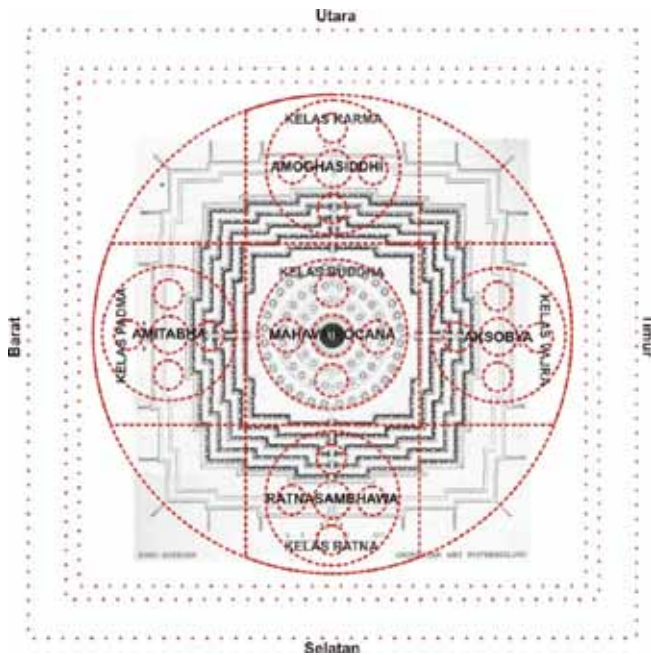
Gambar: Penerapan *Garbhadhātu-Mandala* pada rekonstruksi atap Candi Mendut



Gambar: Panteon pada Candi Mendut menurut aturan *Garbhadhātu-Mandala*

Mahākāraṇika Avalokiteçvara, Vajrapāni, Manjuçri, Prajñāpāramitā, Akāçagarbha, dan Sarvanivaranaviskambhin (Yogaswara, 2000: 115).

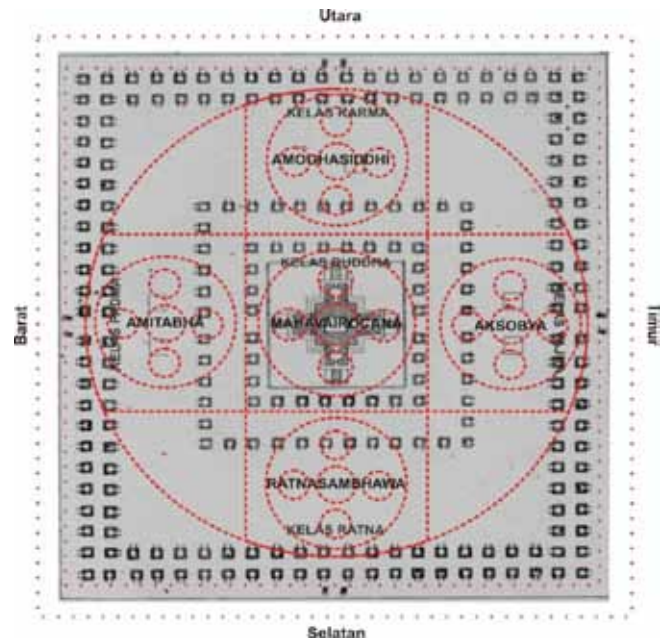
Bangunan suci yang orientasi pemujaannya kepada Tathāgatha, umumnya ditandai dengan adanya lima arca utama pada bilik candi induk atau candi perwaranya yaitu arca tokoh lima dhyāni buddha yakni, Dhyāni Buddha Vairocana, Dhyāni Buddha Amitābha, Dhyāni Buddha Amoghasiddhi, Dhyāni Buddha Aksobhya, dan Dhyāni Buddha



Gambar: Panteon pada Candi Borobudur
Menurut aturan bagian tengah *Vajradhātu-Mandala*

Ratnasambhava. Beberapa contoh bangunan suci jenis ini adalah Candi Borobudur dan Candi Ngawen di Magelang, Jawa Tengah (Roesmanto, 2011: 99, 107), Candi Sewu, di Klaten Jawa Tengah (Dumarçay, 1986: 28), dan Candi Kalasan.

Berkaitan dengan adanya dua konsep pemujaan di Jawa pada Abad IX M sampai Abad X M, tampaknya dilatarbelakangi oleh adanya konsep mandala yang digunakan pada bangunan suci tersebut. Beberapa bangunan suci berupa candi telah diketahui konsep mandalanya seperti Candi Mendut yang dibangun dengan konsep *Garbhadhātu-Mandala* di mana pada Candi Mendut terdapat tiga arca yang melambangkan tiga kelas dalam *Garbhadhātu-Mandala* yakni, Kelas Buddha, Kelas Padma, dan Kelas Vajra, yang diwujudkan dalam tiga arca Çakyamuni, Lokeçvara, dan Vajrapāni (Moens, 2007: 93-96; Yogaswara, 2000: 76). Beberapa ahli juga yakin bahwa Candi Sewu dibangun berdasarkan konsep *Vajradhātu-Mandala* (Anom, 1997: 20, 168-171), karena pada intinya, candi yang dibangun dengan konsep *Vajradhātu-Mandala* ditempati oleh Tathāgatha atau lima dhyāni buddha



Gambar: Panteon pada Candi Sewu
Menurut aturan bagian tengah *Vajradhātu-Mandala*

(Anom, 1997: 239). Berdasarkan hal tersebut, ada kemungkinan bahwa konsep *Vajradhātu-Mandala* juga diterapkan pada Candi Ngawen dan Candi Borobudur

C. Kesimpulan

Konsep keagamaan dalam pembuatan bangunan suci di Jawa pada abad IX-X M, tentunya menggunakan konsep mandala, baik pada bangunan Hindu maupun Buddha. Penggunaan konsep mandala tersebut dapat dilihat dari arsitektur bangunan suci tersebut baik dari segi tata letak, maupun dari segi penataan arca-arca yang ada di dalamnya. Berdasarkan tinggalan-tinggalan bangunan suci agama Buddha pada abad IX-X M, setidaknya terdapat dua jenis pemujaan yaitu, jenis pemujaan kepada Ratnatraya (Triratna) dan pemujaan kepada Tathāgatha sebagaimana tercantum dalam kitab Sang Hyang Kamāhayānikan. Bangunan suci yang orientasi pemujaannya kepada Ratnatraya (Triratna), umumnya ditandai dengan adanya tiga arca utama pada bilik candi induk yakni, Buddha yang diapit oleh dua bodhisatwa. Sebagai contoh bangunan suci jenis ini ialah Candi Mendut, Candi

Plaosan, Candi Sari, Candi Kalasan, Candi Bubrah Prambanan, dan Candi Lumbung Prambanan. Bangunan suci yang orientasi pemujaannya kepada Tathāgatha, umumnya ditandai dengan adanya lima arca utama pada bilik candi induk, yaitu arca tokoh lima dhyāni buddha yakni, Dhyāni Buddha Vairocana, Dhyāni Buddha Amitābha, Dhyāni Buddha Amoghasiddhi, Dhyāni Buddha Aksobhya, dan Dhyāni Buddha Ratnasambhava. Beberapa contoh bangunan suci jenis ini adalah, Candi Borobudur dan Candi Ngawen di Magelang, Jawa Tengah, Candi Sewu, di Klaten Jawa Tengah, dan Candi Kalasan di Kalasan, DIY.

Pada pemujaan terhadap Ratnatraya, bangunan suci atau candi menggunakan konsep *Garbhadhātu-Mandala*, di mana penggunaan konsep ini bertujuan untuk memuliakan *garbha* atau rahim (tempat semua makhluk tercipta). Dengan kata lain penggunaan *Garbhadhātu-Mandala* pada sebuah candi terkait dengan ritual untuk mencapai tingkat spiritual lebih tinggi oleh pemujanya sendiri. Berbeda dengan *Vajradhātu-Mandala*, di mana bangunan suci yang memakai konsep mandala ini, bertujuan untuk memberikan cinta kasih dan kekuatan kepada semua makhluk di empat penjuru mata angin. Kedua konsep mandala ini tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak jarang, bangunan suci yang memakai konsep kedua mandala ini ditemukan berdekatan. Sebagai Contoh Candi Borobudur (Vajradhatu) dengan Candi Mendut (Garbhadhatu), Candi Kalasan dengan Candi Sari, Candi Sewu dengan Candi Lumbung.

DAFTAR PUSTAKA

- Anom, I Gusti Ngurah, 1997. "Keterpaduan Aspek Teknis dan Aspek Keagamaan Dalam Pendirian Candi Periode Jawa Tengah (Studi Kasus Candi Utama Sewu)". *Disertasi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Bhattacharyya, Benoytosh. 1949. *Nispannayogāvalī of Mahāpan#d#ita Abhaykaragupta*. Baroda: Oriental Institute of Baroda.
- Frédéric, Louis. 1995. *Buddhism*. Paris: Flammarion.
- Hadiwijono, Harun. 1975. *Agama Hindu dan Buddha*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- Krom, N.J. 1923. *Inleideing tot de Hindoe-Javaansce Kunst*. Vol.II. The Hague: Martijns Nijhof.
- Liebert, Gösta. 1976. *Iconographic Dictionary of The Indian Religions: Hinduism-Buddhism-Jainism*. Leiden: E.J. Brill.
- Magetsari, Noerhadi. 1997. *Candi Borobudur: Rekonstruksi Agama dan Filsafatnya*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia.
- Moens, J.L. 2007. *Barabudur, Mendut and Pawon and Their Mutual Relationship* (English translation by Mark Long). Situs Web: http://www.borobudur.tv/Barabudur_Mendut_Pawon.pdf.
- Parjana 1996. "Latar Belakang Keagamaan dan Fungsi Candi Plaosan Lor", *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta: Fakultas sastra Universitas Gadjah Mada.
- Pott, P. H. 1966. *Yoga and Yantra: Their Interrelation and Their Significance For Indian Archaeology*. Leiden: E.J. Brill.

* Penulis adalah staff Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Roesmanto, Totok. 2011. "Keletakan Candi Borobudur dan Candi Sekitarnya". *100 Tahun Pasca Pemugaran Candi Borobudur, Trilogi I: Menyelamatkan Kembali Candi Borobudur*. Magelang: Balai Konservasi Borobudur. Hlm. 93-112.
- Sedyawati, Edi. 2007. "Tema Sekitar Pantheisme Pada Tinggalan Arkeologi Hindu-Buddha Abad VIII-X TU", Makalah yang disampaikan dalam Seminar Pantheisme di Perpustakaan Nasional pada tanggal 5-6 September 2007, dalam *Śaiwa dan Bauddha di Masa Jawa Kuno*. Denpasar: Penerbit Widya Dharma dibawah Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimas Hindu. Hlm. 131-136.
- _____. 2007. "Kesatuan Gaya Seni Arca antara Candi Rara Jonggrang dan Plaosan Lor", Laporan Penelitian untuk Konsorsium Sastra dan Filsafat, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tahun 1977, dalam *Śaiwa dan Bauddha di Masa Jawa Kuno*. Denpasar: Penerbit Widya Dharma dibawah Departemen Agama Republik Indonesia Direktorat Jendral Bimas Hindu. Hlm. 145-172.
- Soekmono, R. 1974. "Candi: Fungsi dan Pengertiannya", *Disertasi*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tanudirdjo, Daud Aris. 2011 "Borobudur sebagai Mandala: Masa Lalu dan Masa Kini". *100 Tahun Pasca Pemugaran Candi Borobudur, Trilogi I: Menyelamatkan Kembali Candi Borobudur*. Magelang: Balai Konservasi Borobudur. Hlm. 115-134.
- Tucci, Giuseppe. 1969. *The Theory and Practice of The Mandala*. London: Rider & Co.
- Wirjosuparto, Sutjipto. 1956. *Sedjarah Seni Artja India*. Yogyakarta: Penerbit Kalimosodo Djakarta.
- _____. 1957. *Sedjarah Kebudajaan India*. Jakarta: Penerbit Indira
- Yogaswara, Ariasatya. 2000. "Reinterpretasi Arca-Arca Buddhis di Candi Mendut: Tinjauan Atas Makna Simbolisnya Berdasarkan Kajian Etnoarkeologis". *Skripsi Sarjana*. Yogyakarta: Fakultas sastra Universitas Gadja

BEBERAPA BANGUNAN PERIBADATAN DI KAMPUNG KAUMAN YOGYAKARTA

Oleh:
Muhammad Chawari*

Abstrak

Nama Kauman berkonotasi sebagai tempat berdiamnya sekelompok ahli agama dan keberadaannya berkaitan erat dengan Keraton Kasultanan Yogyakarta. Di dalam Kampung Kauman terdapat beberapa bangunan peribadatan, yaitu masjid, musala, dan langgar dengan Masjid Besar sebagai pusatnya. Bangunan musala dan langgar terletak di sekitar Masjid Besar. Masjid Besar sebagai bangunan sentral merupakan bangunan terbesar dan tertua yang didirikan oleh Keraton Yogyakarta di kampung ini.

Kata kunci: Bangunan Peribadatan, Kampung Kauman, Yogyakarta

Pendahuluan

Sesuai dengan namanya, Kampung Kauman merupakan tempat tinggal abdi dalem Keraton Yogyakarta yang berhubungan dengan bidang keagamaan yaitu agama Islam. Agama ini merupakan

keyakinan resmi yang dipeluk oleh penguasa keraton beserta seluruh abdi dalemnya. Dengan demikian, nama Kauman merupakan salah satu kelompok permukiman berdasarkan profesi keagamaan.

Salah satu ciri fisik Kauman adalah adanya masjid. Pembangunan masjid kerajaan oleh sultan diikuti dengan penetapan organisasi pengelola yang disebut *Kawedanan Pengulon*. Kawedanan ini dipimpin oleh *Pengulu* yang menempati rumahnya di sebelah utara Masjid Besar yang dikenal dengan sebutan "*pengulon*". Penghulu dengan tugas dan wewenangnya dibantu oleh *Ketib*, *Modin*, *Barjamangah*, dan *Merbot*. Tugas *Pengulu* antara lain meliputi: pernikahan, talak, rujuk, juru kunci makam, naib, hukum dalam peradilan agama, dan kemasjidan. *Ketib* berasal dari kata *khatib*, bertugas sebagai *khatib* setiap salat Jum'at. *Modin* berasal dari kata mu'adzin, bertugas mengumandangkan adzan menjelang salat wajib. *Barjamangah* berasal dari kata jemaah, bertugas melaksanakan salat jemaah untuk memenuhi syarat syahnya salat Jumat. *Merbot* berasal dari kata *marbut*, bertugas sebagai juru kebersihan dan mengelola fisik masjid (Darban, 2011: 12 – 15).

Permasalahan

Kauman merupakan tempat bermukimnya masyarakat berdasarkan profesi keagamaan, di dalamnya selain terdapat Masjid Besar juga berdiri beberapa bangunan peribadatan lain yaitu langgar dan musala. Terkait dengan hal tersebut, bagaimana fungsi, peran, dan kronologi masing-masing tempat ibadah tersebut.

Metode Penelitian

Penulisan karya tulis ilmiah ini menerapkan metode deskriptif eksplanatif. Tipe penelitian semacam ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang objeknya yaitu berangkat dari data hasil observasi lapangan. Hal tersebut didasarkan atas pengamatan terhadap objeknya, kemudian pengolahan data, analisis sampai dengan penyimpulan (Tanudirjo, 1988 – 1989: 34, dan Azwar, 1998: 40). Dengan metode yang demikian ini diharapkan tujuan penulisan ini dapat tercapai.

Jenis dan Macam Tempat Ibadah di Kampung Kauman

Kauman sebagai tempat bermukimnya abdi dalem bidang keagamaan, secara fisik di dalamnya berdiri beberapa bangunan peribadatan. Tempat-tempat ibadah tersebut sekarang ini sebagian besar masih ada, namun ada juga yang sudah dibongkar. Secara keseluruhan tempat-tempat ibadah tersebut masih berfungsi, namun ada pula yang sudah tidak berfungsi seperti fungsi semula. Secara administratif, seluruh bangunan peribadatan beralamat di Kampung Kauman, Kelurahan Ngupasan, Kecamatan Gondomanan, Kota Yogyakarta. Berikut ini beberapa tempat ibadah tersebut.

1. Masjid Besar Kauman

Masjid Besar Kauman ini secara administratif beralamat di Kauman, RT. 46, RW. 12. Secara astronomis terletak pada S : 07° 48' 13,2" dan E : 110° 21' 43,9". Bangunan Masjid Besar ini secara arsitektural masih tetap dan tidak mengalami perubahan. Namun ada

sedikit penambahan pada beberapa bagian. Penambahan ini terkait dengan kebutuhan akan fasilitas untuk para jamaah dewasa ini. Secara umum objek ini terdiri atas beberapa bagian. Keberadaan bagian-bagian atau unsur-unsur dari masjid juga dapat dilihat pada prasasti-prasasti yang ada. Di dalam prasasti-prasasti yang ada disebutkan pula tentang pendirian bagian-bagian dari masjid.

Fungsi Bangunan

Secara umum Masjid Besar Kauman masih dimanfaatkan seperti pada awal bangunan ini didirikan. Fungsi utama masjid ini adalah sebagai tempat ibadah. Fungsi lainnya terkait dengan Keraton Yogyakarta yaitu masjid ini



Gambar 1. Foto Masjid Besar Kauman sebagai masjid kerajaan

digunakan sebagai tempat untuk melaksanakan upacara-upacara keagamaan Keraton Yogyakarta pada waktu-waktu tertentu.

2. Musala Aisyiyah

Musala ini secara administratif beralamat di Kauman Gm I No. 281, RT. 48, RW. 13. Secara astronomis terletak pada S : 07° 48' 11,4" dan E : 110° 21' 40,8". Berdasarkan keruangan bangunan musala Aisyiyah ini terdiri atas tiga tingkatan. Tingkat pertama merupakan ruang inti. Ruang inti atau ruang utama merupakan ruang



Gambar 2. Foto Musholla 'Aisyiyah
dari arah tenggara

bagian dalam yang berdenah empat persegi panjang. Atap bangunan berbentuk limasan yang ditutup genteng dan pada ujung bagian utara dan selatan atap terdapat semacam kemuncak. Tingkat kedua merupakan ruang di luar ruang utama yang berupa serambi atau emperan bangunan utama. Serambi ini merupakan bangunan yang mengelilingi ruang utama di ketiga sisinya, kecuali sisi barat. Bangunan serambi atapnya menyatu dengan ruang utama. Terakhir tingkat ketiga merupakan halaman musala dan masih berada di dalam tembok keliling. Halaman musala berukuran lebar 1,5 meter. Untuk masuk ke ruang utama dari arah serambi dapat melalui pintu sebelah timur, selatan, maupun utara. Di sebelah timur terdapat tiga pintu, di sebelah selatan terdapat dua pintu, dan di sebelah utara terdapat dua pintu. Akan tetapi pintu sebelah utara dan selatan selalu tertutup dan jarang dibuka, kecuali ada acara khusus. Selanjutnya di sebelah utara ruang utama terdapat kamar tempat penjaga musala tinggal, juga terdapat sumur, kamar kecil (WC), dan tempat wudlu. Bangunan ini dikelilingi dengan pagar halaman musala.

Fungsi Bangunan

Musala Aisyiyah sampai saat ini masih berfungsi seperti fungsi semula, yaitu sebagai tempat ibadah salat berjemaah. Musala

ini khusus untuk jemaah wanita. Selain sebagai tempat ibadah, musala ini juga difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan pengajian-pengajian, tempat berbuka puasa pada bulan Ramadan. Pada malam harinya diadakan tadarus untuk membaca Alquran yang dilaksanakan setelah salat tarawih. Pengelola bangunan ini adalah takmir musala. Takmir musala Aisyiyah ini pernah mendapatkan penghargaan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta dengan nomor: UM.303/1445.A3/BPCB/KPK/2013 tertanggal 10 Juni 2013. Penghargaan ini diberikan atas peran dan komitmennya dalam melestarikan bangunan cagar budaya, khususnya bangunan Musala Aisyiyah di Kampung Kauman, Yogyakarta.

3. Langgar (Musala) Arrosyad

Langgar ini secara administratif beralamat di Kauman, RT. 40, RW. 11. Secara astronomis terletak pada S : 07° 48' 06,8» dan E : 110° 21' 43,7». Langgar Arrosyad ini secara keruangan merupakan bangunan yang terdiri atas satu ruangan besar. Bangunan ini denahnya berbentuk seperti huruf L dengan ukuran panjang terpanjang 16,60 meter dan lebar terlebar 11,40 meter. Bangunan besar ini atapnya ditutup dengan genteng dan pada bagian puncak menggunakan kubah. Lantai bangunan ditutup dengan tegel berwarna abu-abu berukuran 20 cm x 20 cm. Untuk memasuki langgar ini bisa melalui tiga arah, yaitu utara, timur, dan selatan. Pada sisi timur, bangunan atap ditopang oleh tiang sebanyak dua yang terbuat dari kayu jati. Di atas kedua tiang ini terdapat prasasti dalam bahasa Arab yang ditulis pada sebidang papan. Tulisannya terdiri atas empat baris (diurutkan dari sebelah atas), yaitu:

- *nuurun 'ala nuur*
- *ud'u ilaa sabiili rabbika*
- *arrosyad - 1380 H*
- *balau 'anni walau 'ayah*



Gambar 3. Foto Musholla Arrosyad dari arah timur

Pada sisi sebelah barat terdapat satu jendela permanen yaitu tidak memakai daun jendela. Jendela ini diberi kaca “patri” warna warni dan di bagian luar diberi teralis besi. Pada teralis ini ada tulisan *arrosyad* di bagian atas dan angka tahun 1951 di bagian bawah.

Fungsi Bangunan

Langgar Arrosyad ini pemanfaatannya hampir sama dengan Musala Aisyiyah. Selain sebagai tempat melaksanakan salat berjemaah lima waktu, juga penggunaanya khusus kaum wanita. Selain itu, langgar ini juga difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan pengajian, khususnya pengajian Sabtu sore. Pada bulan puasa juga digunakan sebagai tempat buka bersama atau *ta’jil*. Pada malam harinya juga diadakan tadarus membaca Alquran bersama secara bergantian setelah salat tarawih.

4. Langgar Makmur

Langgar Makmur ini secara administratif beralamat di Kauman, RT. 37, RW. 11. Secara astronomis terletak pada S : 07° 48' 07,9" dan E : 110° 21' 47,6". Langgar ini secara keseluruhan berdiri di atas tanah wakaf seluas 205 meter yang terdiri atas bangunan inti

(langgar), kolam, tempat wudu dan kamar kecil, serta bangunan atau gedung pertemuan. Untuk masuk ke langgar ini bisa melalui dua arah, yaitu selatan dan timur. Dari arah selatan terdapat satu pintu yang diapit dengan dua jendela, demikian pula dari arah timur. Bangunan Langgar Makmur berdiri di atas batur yang lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Bangunan berdenah bujur sangkar dengan ukuran 6,90 meter x 6,90 meter. Terdapat tiga anak tangga untuk bisa sampai ke pintu masuk. Di luar bangunan inti terdapat emperan dengan lebar 1,5 meter. Sekarang ini emperan sebelah selatan dan timur ditambahi atap dengan konstruksi baru hingga sampai ke jalan di depannya.



Gambar 4. Foto Langgar Makmur dari arah tenggara

Fungsi Bangunan

Langgar Makmur hingga saat ini masih berfungsi seperti semula, yaitu sebagai tempat ibadah khususnya dalam menjalankan salat berjemaah. Langgar Makmur ini tidak dipakai untuk salat Jumat. Selain sebagai tempat ibadah, langgar ini juga difungsikan sebagai tempat untuk melaksanakan pengajian-pengajian. Pada setiap malam Jumat dipakai untuk tadarus membaca Alquran, demikian pula bulan Ramadan.

5. **Langgar Al-Faqih**

Langgar Al Faqih secara administratif beralamat di Kauman Gm I No. 25, RT. 34, RW. 10 dan secara astronomis terletak pada S : 07° 48' 06,0» dan E : 110° 21' 43,0». Bangunan Langgar Al-Faqih secara horizontal terdiri atas tiga bagian, yaitu ruang inti, ruang serambi, dan ruang luar. Ruang inti merupakan ruang utama yang berukuran 4,8 x 4,5 meter. Di sebelah utara ruang utama terdapat ruangan tambahan berukuran 4,8 x 2,1 meter. Atap ruang utama berbentuk kerucut yang ditutup dengan genteng. Sementara ruang serambi berukuran 4,5 x 3,3 meter. Di sebelah utara serambi terdapat kamar berukuran 2,1 x 3,3 meter yang berfungsi sebagai gudang. Serambi merupakan bangunan bertingkat dua. Bagian atas merupakan bangunan terbuka tanpa atap dan di keempat sisinya diberi pagar setinggi 1 meter. Pada awalnya, bangunan langgar ini seluruh lantainya dibuat dari kayu jati. Keadaan ini berlangsung hingga sekitar menjelang kedatangan Pendudukan Jepang. Namun setelah itu lantai diganti dengan tegel berwarna abu-abu berukuran 20 cm x 20 cm (Wawancara dengan Ahmad Wahdan). Langgar Al-Faqih berdiri di atas batur setinggi 40 cm. Ruang luar yaitu merupakan halaman depan. Pada sisi selatan halaman ini terdapat kamar kecil dan sumur yang atapnya terpisah dengan atap bangunan utama maupun serambi.

Fungsi Bangunan

Langgar Al-Faqih pada mulanya merupakan langgar keluarga dan dimanfaatkan untuk beribadah pemilik langgar beserta keluarganya. Selain itu digunakan untuk pengajian keluarga yang dilaksanakan setelah salat ashar dan setelah salat subuh. Sebelum kedatangan

Jepang, langgar ini pernah difungsikan sebagai pondokan murid-murid sekolah Al-Falakh (salah satu sekolah lama yang ada di Kauman pada waktu itu). Setelah itu, pernah digunakan sebagai tempat tinggal keluarga salah satu keturunan pendiri langgar (Wawancara dengan Ahmad Wahdan). Pada masa-masa berikutnya objek ini berkembang menjadi langgar umum, yang digunakan juga oleh warga sekitarnya. Hal ini dapat dilihat terutama pada tahun-tahun setelah meletusnya pemberontakan PKI tahun 1965. Pada tahun-tahun tersebut Langgar Al-Faqih digunakan untuk belajar membaca Alquran oleh warga sekitar, terutama bagi anak laki-laki. Kegiatan ini berlangsung hingga tahun 1980-an. Setelah itu, langgar ini sempat tidak dimanfaatkan selama beberapa tahun. Sejak tahun 1990-an, langgar ini dimanfaatkan lagi untuk belajar membaca Alquran, namun tidak hanya anak laki-laki saja tetapi juga untuk anak perempuan. Selain itu, setiap bulan Ramadan digunakan juga untuk membaca Alquran atau tadarus khusus bagi kaum laki-laki (baik anak-anak maupun dewasa).

6. **Langgar KHA. Dahlan**

Langgar KHA Dahlan secara administratif beralamat di Kauman Gm I No. 309, RT. 45, RW. 12. Secara astronomis terletak pada S : 07° 48' 15,3» dan E : 110° 21' 38,6». Langgar ini merupakan bangunan tunggal dan berada di lantai dua, sementara lantai bawah untuk ruang pertemuan. Bangunan ini denahnya bujur sangkar dan berukuran 8,2 meter x 8,2 meter. Langgar ini terletak pada suatu kompleks, sebab ada beberapa bangunan yang menyertainya. Selain langgar, ada bangunan lain yang terdiri atas beberapa ruang. Beberapa waktu yang lalu kompleks ini pernah dipakai untuk sekolah SMEA Muhammadiyah II.



Gambar 5. Foto Langgar
KHA. Dahlan dari arah tenggara

Fungsi Bangunan

Langgar KHA Dahlan ini telah berperan besar dalam sejarah Muhammadiyah, salah satunya terkait dengan pembetulan arah kiblat yang tepat. Sebelumnya, arah kiblat menghadap lurus ke barat, kemudian oleh KHA. Dahlan arahnya dibenarkan dengan serong ke arah utara 24°. Terkait dengan peran, sejarah, dan bentuknya yang unik, maka langgar ini kemudian ditetapkan sebagai bangunan warisan budaya oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui SK Walikota No. 798/KEP/2009.

7. Langgar Adzakirin

Langgar Adzakirin ini beralamat di Kauman Gm I No. 276, RT. 48, RW. 13 dan secara astronomis terletak pada S : 07° 48' 10,3» dan E : 110° 21' 40,5». Secara arsitektural Langgar Adzakirin merupakan bangunan tunggal, karena hanya terdiri atas satu bangunan inti dan tanpa ada bangunan lain yang menyertainya. Bangunan ini terletak di antara bangunan rumah tinggal yang ada di sekelilingnya, kecuali sebelah timur.

Pada sisi sebelah timur merupakan jalan kampung atau gang. Untuk masuk ke langgar ini hanya bisa melalui sisi timur. Pada sisi timur terdapat satu pintu masuk yang diapit dengan dua jendela di kanan dan kiri pintu. Bangunan inti berdenah empat persegi panjang yang memanjang dengan arah timur-barat dengan ukuran 12,60 meter x 4,20 meter. Langgar ini dilengkapi dengan mihrab yang terletak di sisi barat. Mihrab ini arahnya sudah sesuai dengan kiblat yaitu miring ke arah utara sekitar 24°.

Fungsi Bangunan

Langgar ini pada sekitar pertengahan abad XX digunakan untuk belajar membaca Alquran oleh warga sekitar, terutama bagi anak-



Gambar 6. Foto Langgar
Adzakirin dari arah timur

anak. Hal ini berlangsung hingga dekade tahun 1990-an. Saat ini langgar ini tidak lagi untuk belajar membaca Alquran, namun untuk tadarus bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yaitu pada hari Jumat malam. Pada bulan Ramadan dimanfaatkan juga untuk tadarus Alquran khusus bagi kaum laki-laki (baik anak-anak maupun dewasa). Pernah juga digunakan untuk jemaah salat tarawih.

8. Langgar Duwur

Langgar Duwur ini beralamat di Jl. Nyai Ahmad Dahlan No. 55 B, RT. 44, RW. 12. Secara astronomis terletak pada S : $07^{\circ} 48' 12,6''$ dan E : $110^{\circ} 21' 38,5''$. Sesuai dengan namanya, langgar ini terletak di lantai dua (*Jawa: duwur*) dan lokasinya di dekat rumah tinggal Ketib Kulon serta merupakan langgar keluarga. Bagian atas berfungsi sebagai langgar, sedangkan bagian bawah digunakan untuk tempat tinggal yang pada bagian tengah difungsikan sebagai jalan *rukun*. Bangunan bagian atas dilengkapi dengan teras berpagar kayu dengan motif *wajikan* dan garis-garis simetris dari bahan besi. Jalan rukun tersebut awalnya berfungsi sebagai pintu gerbang untuk



Gambar 7. Foto Langgar Duwur dari arah timur



Gambar 8. Foto Mihrab Langgar Duwur dari arah barat

masuk ke halaman depan rumah. Pintu gerbang dilengkapi dengan dua buah tiang bergaya *Doria* yang sekaligus berfungsi sebagai penyangga *balkon* yang terdapat di lantai atas (Chawari, 2008: 88). Langgar ini denahnya berbentuk empat persegi panjang yang membujur dengan arah utara – selatan. Bangunan ini atapnya berbentuk kampung yang ditutup dengan genteng.

Fungsi Bangunan

Dewasa ini Langgar Duwur Ketib Kulon sudah mengalami perubahan fungsi yaitu sudah tidak digunakan lagi sebagai langgar. Objek ini sekarang difungsikan sebagai tempat tinggal oleh salah satu keturunan Ketib Kulon.

Selain kedelapan bangunan tersebut, beberapa waktu yang lalu masih dijumpai dua bangunan langgar lain, yaitu Langgar Ketib Wetan I yang terletak di Kauman Gm I No. 221, RT. 49, RW. 13 dan langgar milik keluarga pengulu Keraton Yogyakarta yang terletak di dalam Kompleks Pengulon. Dewasa ini kedua bangunan tersebut sudah tidak ada lagi, salah satunya telah dibongkar untuk kepentingan perluasan rumah tinggal.



Gambar 9. Peta keletakan beberapa bangunan peribadatan di Kampung Kauman Yogyakarta

Kronologi dan Sejarah Bangunan

Berdasarkan atas data di lapangan diketahui bahwa tidak semua objek (masjid, langgar, maupun musala) dilengkapi dengan data pertanggalan yang jelas. Sebab hanya beberapa bangunan saja yang dilengkapi dengan data tulisan (prasasti). Oleh sebab itu untuk mengetahui kronologi dan sejarah atau pertanggalan objek, jika bangunan tersebut tidak ada data prasastinya maka kronologinya akan ditentukan melalui perbandingan, analogi, maupun “perkiraan” dengan terjadinya peristiwa di masa lampau, khususnya dengan peristiwa muncul dan berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah.

Diawali dengan sejarah berdirinya Masjid Besar Kauman. Masjid Besar Kauman Yogyakarta merupakan masjid kerajaan dan juga berstatus sebagai masjid negara Ngayogyakarta Hadiningrat. Secara umum, masjid kerajaan ini dibangun pada perempat terakhir abad XVIII. Secara nyata seperti tertulis pada prasasti, masjid ini (ruang inti) dibangun pada tahun 1773 M atau 1699 J atau 1187 H, sedangkan ruang serambi dibangun tahun 1775 M atau 1701 J atau 1189 H. Sementara bagian-bagian lain dari masjid ini dibangun setelah tahun-tahun tersebut, yaitu: pawestren (ruangan khusus wanita) dan regol atau gapura dibangun tahun 1839 M atau 1767 J atau 1255 H. Pada

tahun 1867 M atau 1796 J atau 1284 H terjadi gempa bumi yang melanda Yogyakarta. Gempa tersebut mengakibatkan serambi dan regol atau gapura runtuh dan kemudian dibangun kembali. Serambi dibangun lagi satu tahun kemudian, sedangkan regol atau gapura dibangun lagi dua tahun kemudian. Pada tahun 1862 M atau 1791 J atau 1279 H dilakukan kegiatan pemugaran sirap yang berlangsung selama satu tahun lamanya. Selanjutnya pada tahun 1936 lantai ruang inti yang awalnya dari bahan batu hitam diganti dengan marmer Itali (Chawari, 1989: 81 – 85). Bangunan kedua adalah Musala Aisiyyah. Seperti yang tertulis pada papan nama, Musala Aisiyyah didirikan pada tahun 1922 oleh KHA. Dahlan. Terdapat seorang warga sekitar musala yang mempunyai foto lama. Foto tersebut menunjukkan pembangunan Musala Aisiyyah. Diinformasikan bahwa objek tersebut dibangun pada sekitar perempat pertama (1925) abad XX.

Berikutnya adalah sejarah Langgar Arrosyad. Hingga saat ini belum diperoleh informasi tentang pendirian musala ini secara pasti. Berdasarkan data yang ada pada objeknya terdapat dua angka tahun yaitu tahun 1370 H dan tahun 1951 M. Angka tahun pertama (1370 H) setelah dikonversi bertepatan dengan tahun 1882 J atau 1950 M (Pigeaud, tt: XI) dan angka tahun kedua (1951) merupakan tahun masehi. Dengan demikian kedua angka tahun tersebut waktunya hampir bersamaan. Diperkirakan bahwa tahun 1950 merupakan tahun pemugaran bangunan yang diperingati dengan pembuatan prasasti yang terdapat di bagian atas tiang. Sedangkan tahun 1951 merupakan tahun pembuatan teralis besi yang terdapat di sisi barat bangunan Musala Arrosyad. Bangunan berikutnya adalah Langgar Makmur. Disampaikan bahwa keberadaan langgar ini merupakan peran dari warga sekitar khususnya Kauman timur (sekarang menjadi kawasan RW. XI). Kawasan tempat berdirinya Langgar Makmur ini dahulu sering disebut dengan istilah “Ngindungan”. Nama *Ngindungan* berasal dari kata “ngindung” yaitu orang yang bertempat tinggal pada tanah milik orang lain. Dalam kasus ini orang-orang tersebut bertempat tinggal di atas



Gambar 10. Foto Inskripsi yang berfungsi juga sebagai hiasan

tanah Pengulon Yogyakarta (Darban, 2011: 30). Tanah tempat berdirinya langgar merupakan wakaf dari salah seorang warga bernama H. Muhammad Ichsan bin Noto. Setelah tanah diwakafkan kemudian dibangun langgar atas prakarsa dan biaya H. Prawiroyuwono pada sekitar pertengahan abad XX, yaitu setelah perang kemerdekaan tahun 1950-an. Tokoh ini merupakan seorang pengusaha atau juragan batik yang cukup terkenal pada waktu itu. Pembangunan langgar tersebut pada awalnya diniatkan untuk tempat salat para pegawai atau buruh batik miliknya. Sebab antara langgar dengan tempat membatik letaknya berdekatan, hanya dipisahkan jalan rukun. Saat ini langgar tersebut dipergunakan untuk umum. Secara fisik, jika dilihat dari arsitekturnya, bangunan Langgar Makmur mirip dengan bangunan Masjid Margoyuwono di Langenastran, Kecamatan Keraton, Yogyakarta. Menurut informasi Masjid Margoyuwono dibangun dan didirikan oleh keluarga H. Prawiroyuwono.

Berikutnya adalah sejarah dan kronologi Langgar Al-Faqih. Sesuai dengan namanya yaitu Langgar Al-Faqih, maka objek ini dibangun oleh dan atas inisiatif KHA. Faqih. Tokoh ini adalah seorang kiai yang hidup pada pertengahan abad XIX hingga menjelang pertengahan abad XX. Terkait dengan kronologi pendirian Langgar Al-Faqih hingga saat ini belum ada data yang memberikan informasi tentang hal tersebut.



Gambar 11. Foto Papan penetapan sebagai Bangunan Warisan Budaya pada Langgar KHA. Dahlan

Sebagai perkiraan tentunya dapat dilihat masa hidup tokoh utama antara kedua abad tersebut di atas. Perlu disampaikan bahwa tokoh utama ini memiliki tanah pekarang yang cukup luas, yaitu sekitar separo dari luas RT. 34, RW. 10 sekarang ini. Tanah pekarangan seluas itu sekarang telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya.

Urutan berikutnya adalah Langgar KHA. Dahlan. Penamaan langgar ini khusus untuk memberikan penghormatan dan penghargaan kepada KHA. Dahlan selaku pendiri Muhammadiyah. Langgar ini juga sering disebut Langgar Kidul yang didirikan oleh KH. Abu Bakar yaitu ayah KHA. Dahlan. Catatan sejarah yang paling menghebohkan adalah ketika KHA. Dahlan melakukan perbaikan dan perluasan langgar. Kegiatan tersebut diikuti dengan pembetulan arah kiblat yaitu tidak lagi lurus ke barat tetapi serong beberapa derajat ke utara (Harimurti, 2015: 43 – 44). Penyebutan Langgar Kidul ini terkait dengan lokasinya yaitu ada di Kauman sebelah selatan. Atas jasa-

jasanya, KHA. Dahlan telah diangkat oleh Pemerintah RI sebagai pahlawan nasional berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 657 tahun 1961 (Effendi, 2005a: 81). Demikian pula dengan istrinya Nyi Ahmad Dahlan yang juga telah diangkat sebagai pahlawan nasional berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 042/TK/Tahun 1971 tertanggal 22 September 1971. Istri KHA. Dahlan ini diangkat sebagai pahlawan nasional berkat jasanya dalam membina generasi muda, khususnya dalam menegakkan harkat dan martabat kaum wanita (Suratmin, 1990: 41 – 61 dan 141). Atas jasa-jasanya tersebut, nama kedua orang tersebut diabadikan sebagai nama jalan di sekitar Kampung Kauman. Orang Kauman lainnya yang diangkat sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional adalah KH. Fachruddin yaitu berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No. 162 Tahun 1964 tertanggal 26 Juni 1964 (Darban, 2011: 144 - 145).

Objek berikutnya adalah Langgar Adzakirin. Langgar ini terletak di sebelah utara Musala Aisyiyah berselang dua rumah. Terkait dengan waktu pendirian bangunan, sampai saat ini belum ada data maupun informasi tentang hal tersebut. Akan tetapi sebagai perkiraan dan perbandingan dapat dilihat melalui arsitektur objek tersebut, yaitu dengan melihat bentuk dan arah mihrabnya. Seperti telah diuraikan di atas, bahwa mihrab langgar ini arahnya sudah sesuai dengan kiblat yaitu miring atau serong ke arah utara sekitar 24°. Tokoh yang telah membetulkan arah kiblat ini adalah KHA. Dahlan. Dengan demikian langgar ini mestinya yang membangun adalah tokoh tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa langgar ini dibangun oleh KHA. Dahlan setelah beliau mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Lebih khusus lagi kemungkinan langgar ini pendiriannya tidak terpaut jauh dengan pendirian Musala Aisyiyah, yaitu tahun 1922.

Terakhir adalah Langgar Duwur. Langgar ini sering juga disebut dengan istilah Langgar Kulon. Penyebutan ini erat kaitannya dengan pemiliknya yaitu Ketib Kulon. Objek ini berkaitan erat dengan sejarah berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah.

Istilah “Muhammadiyah” pertama kali dilontarkan oleh KHA. Dahlan di rumah Ketib Kulon pada saat mengadakan rapat atau pertemuan. Pada kesempatan tersebut salah satu murid KHA. Dahlan yang bernama Syuja’ mempertanyakan alasan penggunaan istilah tersebut untuk memberi nama organisasi yang dikenal hingga saat ini (Harimurti, 2015: 55 – 56). Seperti telah disinggung di atas, langgar ini merupakan milik keluarga Ketib Kulon. Meskipun demikian sulit untuk mengetahui secara pasti waktu pendirian Langgar Duwur. Jika dilihat kembali struktur birokrasi Keraton Yogyakarta, keberadaan ketib ini mestinya setelah Masjid Besar Kauman didirikan. Sebagai perbandingan adalah Ketib Kulon keberadaannya setelah Masjid Besar berdiri, dan objek ini berkaitan erat dengan saat-saat KHA. Dahlan mendirikan Muhammadiyah. Berdasarkan hal ini, dapat diperkirakan bahwa Langgar Duwur berdiri setelah Masjid Besar Kauman dan sebelum Muhammadiyah berdiri. Dengan demikian, secara kronologis Langgar Duwur didirikan berkisar antara awal abad XIX (1801) sampai dengan akhir abad XIX (1900) atau menjelang lahirnya Persyarikatan Muhammadiyah (awal abad XX).

Aktivitas Keagamaan di Kampung Kauman

Kauman merupakan nama pemukiman lama, sekarang merupakan sebuah kampung yang terletak di sekitar nol kilometer Yogyakarta. Nama Kauman identik sebagai tempat tinggal kelompok keagamaan yang ada di Kasultanan Yogyakarta, dengan Masjid Besar sebagai pusat kegiatan (Nakamura, 1983: 58). Masyarakat Kauman tergolong kelompok orang yang taat melaksanakan syariat agama Islam. Kehidupan keagamaan dimulai dari Masjid Besar sebagai tempat aktivitas masyarakat mulai dari beribadah sampai dengan kegiatan kemasyarakatan (Suratmin: 1990: 15). Kehidupan beragama yang terdapat di Kampung Kauman sudah dimulai sejak keberadaan kampung ini. Hal tersebut dimulai dengan ditempatkannya abdi dalem yang mengurus bidang kemasjidan di kampung ini dan berlangsung hingga dewasa ini. Namun jika dicermati, kehidupan beragama yang

terjadi antara perempat terakhir abad XVIII yaitu 1876 – 1900 (secara umum sebelum abad XX) sampai dengan masa sesudahnya, terutama sejak berdirinya Muhammadiyah, kelihatan sekali terjadi adanya banyak perubahan. Perubahan tersebut terutama berkaitan dengan cara-cara beribadah. Aktivitas yang khusus berhubungan dengan bidang keagamaan yang terjadi di Kampung Kauman sejak munculnya kampung tersebut hingga saat ini terbagi menjadi sebelum lahirnya Muhammadiyah dan setelah lahirnya Muhammadiyah.

1) Sebelum lahirnya Muhammadiyah

Kawasan Yogyakarta sebelum hadirnya pengaruh Islam telah lebih dulu berakar pada kebudayaan Hindu-Buddha. Masyarakat Islam di daerah ini sulit melepaskan diri dari pengaruh lama tersebut. Hal tersebut dapat dilihat pada menjamurnya pengaruh sinkretisme. Hal yang sama terjadi juga pada agama Yahudi di Ethiopia, Kristen di Mesir, Eropa, dan Rumania (Kuntowijoyo, 1985: 12). Keadaan yang demikian ini juga terjadi di Kauman. Hal senada seperti dikatakan oleh K.H.A. Dahlan yang dikutip oleh Ir. Sukarno (Presiden RI pertama) pada waktu penutupan Mukhtar Muhammadiyah di Istora Senayan pada tanggal 25 November 1962, yaitu: umat Islam Indonesia kebanyakan tertutup oleh *jumud*¹, tertutup sama sekali oleh *khurofat*², tertutup oleh *bid'ah*³, dan tertutup oleh *takhayul-takhayul*⁴ (Anonim, 1963: 17).

¹ *Jumud* adalah sikap seseorang yang bersifat sombong (Munawwir, 1984: 223).

² *Khurofat* adalah percaya kepada *takhayul* dan benda-benda keramat (Darban, 2011: 138.)

³ *Bid'ah* adalah perbuatan yang dikerjakan tidak menurut ketetapan Allah dan contoh-contoh yang sudah dilakukan Rasul melalui Alquran dan Hadist, termasuk menambah atau mengurangi ketetapan yang ada (Ali, 1997: 130 dan Darban, 2011: 137).

⁴ *Takhayul* adalah kepercayaan kepada sesuatu yang dianggap ada, namun sebenarnya tidak ada (Poerwadarminta, 1976: 996).

Pelaksanaan dan kehidupan keagamaan di Kampung Kauman sebelum lahirnya Muhammadiyah dilaksanakan berdasarkan pada hal-hal berikut ini.

- a. Kitab-kitab fiqh melalui perantaraan para kiai, tanpa berpegang pada sumber aslinya yaitu Alquran dan as-Sunnah.
- b. Pengaruh adat istiadat tradisional dan sisa-sisa berbagai paham seperti animisme, dinamisme, Hinduisme, dan Buddhisme yang masih sangat kuat.

Kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perilaku keseharian seluruh warga Kauman pada waktu itu, misalnya: meminta berkah kepada orang-orang yang dianggap keramat dengan cara mendatangi kuburannya; datang kepada dukun untuk meminta diramalkan nasibnya; memberi sesaji yang ditujukan kepada arwah leluhur dan roh halus; melakukan upacara selamatan tentang kematian yang dilakukan menurut jumlah hari tertentu (tujuh hari, empat puluh hari, seratus hari, seribu hari dst) dengan membacakan bacaan tertentu seperti bacaan tahlil, Surat Yasin, Ayat Kursi, dan lain-lain; percaya kepada kekuatan gaib yang terdapat pada benda-benda (misal: keris, tombak, batu cincin atau *akik* dan lain-lain) yang dianggap dapat menolong kehidupannya; percaya kepada makhluk halus (misal: jin dan tuyul) untuk dijadikan pembantu dan lain-lain. Hal-hal seperti itu sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam agama Islam (Pasha dan Jusuf, 2003: 22 serta Pasha dan Darban, 2000: 72 - 73). Secara nyata kehidupan beragama warga Kauman pada waktu itu sangat memprihatinkan karena kepercayaannya bercampur dengan *khurafat*. Sementara itu, kualitas pemahaman agamanya sempit, yang berpengaruh pada pola pemikiran yang berbau *taklid*⁵. Pada umumnya, mereka mempunyai pendidikan yang dapat digolongkan terbelakang. Penyebabnya adalah anak-anak yang dapat bersekolah hanyalah anak-anak

para bangsawan, anak-anak orang berpangkat, dan anak-anak orang kaya (khususnya anak juragan batik), itupun tidak semuanya diperbolehkan bersekolah di sekolahan umum. Keadaan tersebut berlangsung hingga menjelang kemerdekaan.

Namun demikian, masyarakat Kauman pada waktu itu tetap menjalankan rukun Islam, hanya saja kualitas pelaksanaannya belum sesuai dengan yang dituntunkan oleh agama Islam. Hal itu seperti yang dikemukakan oleh H. Suja', salah satu murid K.H.A. Dahlan (1989: 22), yaitu: masyarakat dalam menjalankan ibadah salat sering terlalu cepat hingga meninggalkan rukun *tumakninah*⁶. Hal yang demikian ini seolah-olah hanya merupakan rutinitas belaka dan tidak meninggalkan bekas, serta tidak terlihat manfaatnya. Selain itu, dalam melaksanakan puasa, seolah-olah hanya membalikkan waktu saja, yaitu waktu siang dijadikan malam dan waktu malam dijadikan siang. Artinya kalau siang tidur sampai sore dan kalau malam ngobrol sampai waktu menjelang pagi. Setelah melaksanakan salat Subuh tidur hingga lepas tengah hari, bahkan sampai sore hari. Sementara itu, bagi mereka yang mampu (baca: kaya) melaksanakan ibadah haji ke Makkah dan ziarah ke makam nabi (Muhammad) di Madinah. Namun pelaksanaannya belum sesuai dengan syarat dan rukunnya ibadah, sehingga kebanyakan tidak mengetahui hal-hal yang harus dilakukan dan yang harus ditinggalkan. Pada waktu itu umumnya para jemaah haji sesampainya di Jeddah yang pertama-tama dilakukan adalah belanja oleh-oleh. Kewajiban ibadahnya kurang bahkan tidak diperhatikan (Suja', 1989: 22). Berdasarkan kondisi tersebut, maka K.H.A. Dahlan bertekad mengadakan gerakan pembaharuan (*tajdid*) dalam kehidupan beragama Islam di Indonesia (khususnya Yogyakarta) agar kembali berpedoman kepada Alquran dan As-Sunnah secara benar. Pembaharuan tersebut diterapkan dalam bidang tauhid, fiqh, ibadah, serta

⁵ *Taklid* adalah menerima segala hukum dari seorang imam dan memandang segala fatwanya seakan-akan terbit dari syari'ah yang harus dipatuhi tanpa penyelidikan lagi sumber asli ajaran agama Islam (Pringgogidgo, 1973: 1074 - 1075 dan Darban, 2011: 139).

⁶ *Tumakninah* adalah berhenti sebentar di antara gerakan-gerakan dalam melakukan salat.

pola berpikir dan amalan kehidupan di dunia ini seperti dalam kehidupan sosial, politik, ekonomi, kebudayaan dan sebagainya. Pada mulanya K.H.A. Dahlan dalam melaksanakan cita-citanya belum melalui bentuk yang terkoordinir secara rapi. Pada waktu itu di kalangan masyarakat Islam belum ada suatu wadah organisasi yang kuat. Atas dorongan kawan-kawan guru di *Kweekschool* dan sekitar 12 siswa, K.H.A. Dahlan memutuskan untuk membentuk suatu organisasi yang diberi nama Muhammadiyah, yang berarti pengikut Nabi Muhammad saw. (Darban, tt: 16 – 17 dan Salam, 1968: 11).

2) Sesudah lahirnya Muhammadiyah

Perserikatan Muhammadiyah lahir pada tanggal 18 November 1912 M (8 Dzulhijjah 1330 H) di Kampung Kauman Yogyakarta. Pengurus perserikatan yang pertama kali dibentuk terdiri atas K.H.A. Dahlan, Abdullah Sirad, H. Ahmad, H. Abdurahman, R.H. Sarkawi, H. Muhammad, R.H. Djaelani, H. Anis, dan H.M. Fakih (Stoddard, 1966: 307 - 308). Maksud dan tujuan didirikannya Muhammadiyah pada awalnya adalah agar organisasi ini dapat memberi manfaat yang sebesar-besarnya sepanjang masa kepada umat Islam khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Namun maksud dan tujuan tersebut mengalami perubahan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Sesuai dengan keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-41 yang berlangsung pada tahun 1985 di Surakarta diputuskan bahwa maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah “Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridai Allah Swt.” (Pasha dan Jusuf, 2003: 29).

Dalam praktiknya, gerakan Muhammadiyah berusaha memberantas TBC (takhayul, bid'ah, dan khurofat) yang dikaitkan dengan upacara Grebeg Keraton Yogyakarta yang penuh dengan ritual tradisional dan berbau mistik. Ahmad Dahlan (*Ketib Amin*) sebagai salah satu abdi dalem *pamethakan* selalu berpartisipasi dalam ritual Grebeg (maupun Sekaten). Upacara Grebeg dan Sekaten sangat mungkin

berisi beberapa unsur takhayul. Sudah barang tentu Muhammadiyah tidak setuju dengan beberapa praktik yang dilakukan pada upacara Grebeg dan Sekaten. Mengingat bahwa dalam pelaksanaan upacara Grebeg dan Sekaten memakai sesajian berupa ayam dan pisang disertai dengan membakar kemenyan. Sementara itu, dalam bidang kebudayaan Muhammadiyah memperhatikan pada wayang. Seperti dilaporkan oleh seorang orientalis yaitu R. Kern sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada Kongres Muhammadiyah di Yogyakarta tahun 1925, gerakan ini mengadakan pagelaran wayang Jawa yang menurut Kern sangat berisi sinkretis. Pada suatu waktu Muhammadiyah tidak keberatan cara seperti ini dalam produk atau hasil kebudayaan. Falsafah sinkretis dan interpretasi (tafsiran) Quran pada pendirian sumbuhan kosmologi Jawa dalam pertunjukan yang dirasa dan dihargai dengan sambutan antusias (Burhani, 2005: 100).

Kesimpulan

Berdasarkan atas paparan tersebut di atas, di bawah ini akan diuraikan beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Tempat-tempat ibadah yang ada di Kampung Kauman (masjid, musala, maupun langgar) letaknya menyebar. Masing-masing Rukun Warga (RW) memiliki tempat ibadah sendiri-sendiri, meskipun yang melaksanakan ibadah di dalamnya tidak hanya warga RW setempat di mana objek berada.
2. Secara kronologis, bangunan-bangunan ibadah yang ada dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang dibangun sebelum Muhammadiyah berdiri dan yang dibangun setelah Muhammadiyah berdiri.
3. Secara fisik, salah satu ciri bangunan ibadah yang dibangun setelah berdirinya Muhammadiyah adalah arah mihrab sudah disesuaikan dengan arah kiblat yang benar yaitu serong ke arah utara sekitar 24°. Sementara bangunan ibadah yang didirikan sebelum Muhammadiyah berdiri arahnya ke barat lurus.

4. Dari 8 objek bangunan ibadah yang ada di Kampung Kauman pusatnya adalah Masjid Besar, sedangkan yang tujuh bangunan lainnya berada di sekitarnya. Hal ini didasarkan atas dua alasan yaitu secara fisik Masjid Besar bentuknya paling besar dan sangat monumental, selanjutnya masjid ini merupakan cikal bakal dari komunitas dan masyarakat Kauman Yogyakarta.

*Penulis adalah staff Kantor Balai Arkeologi Yogyakarta

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman. 1997. **Kamus Besar Bahasa Indonesia**. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Anonim. 1963. **Muhammadiyah Setengah Abad 1912 – 1962**. Jakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia.
- Azwar, Saifuddin. 1998. **Metode Penelitian**. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Burhani, Ahmad Najib. 2005. *The Muhammadiyah's Attitude To Javanese Culture In 1912 – 1930: Appreciation And Tension* dalam **Jurnal Ilmu dan Keamanusiaan INOVASI: Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah**. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengembangan Pendidikan (LP3) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, halaman: 97 – 105.
- Chawari, Muhammad. 1989. **Pasang Surut Masa Perkembangan Pembangunan Masjid Besar Kauman Yogyakarta: Studi Berdasarkan Sumber Prasasti**. Yogyakarta: Skripsi Sarjana pada Jurusan Arkeologi, Fakultas Sastra, Universitas Gadjah Mada.
- , 2008. **Bangunan Rumah Tradisional Jawa Di Kampung Kauman Yogyakarta, Sebuah Model Pengelolaan**. Yogyakarta: Tesis Magister pada Program Studi Arkeologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada.
- Darban, Ahmad Adaby. 2011. **Sejarah Kauman, Mengungkap Identitas Kampung Muhammadiyah**. Yogyakarta: Penerbit Suara Muhammadiyah.
- , Tt. **Pendidikan Muhammadiyah di Yogyakarta**. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada, Jurusan Sejarah.
- Effendi. 2005. *"Muhammadiyah Ijtihad Terbesar KHA. Dahlan"* dalam **Majalah Suara Muhammadiyah No. 13/Th Ke-90 Juli 2005**. Yogyakarta: Penerbit Yayasan Badan Penerbit Pers Suara Muhammadiyah, halaman: 81 – 82.
- Harimurti, Shubhi Mahmashony. 2015. **Bangunan Bersejarah Muhammadiyah Di Yogyakarta**. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah. Cetakan I.
- Kuntowijoyo. 1985. **Dinamika Sejarah Umat Islam Indonesia**. Yogyakarta: Shalahudin Press.
- Nakamura, Mitsuo. 1983. **Bulan Sabit Muncul dari Balik Pohon Beringin** (Terjemahan). Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Munawwir, Ahmad Warson. 1984. **Kamus Arab-Indonesia**. Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-Munawwir.

-
- Pasha, H. Musthafa Kamal dan Ahmad Adaby Darban. 2000. **Muhammadiyah sebagai Gerakan Islam: dalam Perspektif Historis dan Ideologis**. Yogyakarta: Penerbit Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Islam.
- Pasha, H. Musthafa Kamal dan H. Chusnan Jusuf. 2003. **Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islamiyah**. Yogyakarta: Penerbit Citra Karsa Mandiri.
- Pigeaud, Dr. TH. Tt. **Javaans=Nederlands Handwoordenboek**. Groningen-Batavia : Bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschppij N.N.
- Poerwadarminta. W.J.S. 1976. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**. Jakarta: PN. Balai Pustaka.
- Pringgodigdo. AG. 1973. **Ensiklopedi Umum**. Yogyakarta: Percetakan Offset Kanisius.
- Salam, Junus. 1968. **K.H.A. Dahlan: Amal dan Perdjooangannja**. Djakarta: Penerbit Depot Pengadjaran Muhammadiyah.
- Stoddard, Lothrop. 1966. **Dunia Baru Islam** (Terjemahan). Djakarta: Panitia Penerbit.
- Suja', H. 1989. **Muhammadiyah dan Pendirinya**. Yogyakarta: Pimpinan Pusat Majelis Pustaka.
- Suratmin. SF. 1990. **Nyai Ahmad Dahlan: Amal dan Perjuangannya**. Yogyakarta: Percetakan PT. Bayu Indra Grafika. Cetakan Pertama.
- Tanudirjo, Daud Aris. 1988 – 1989. **Laporan Penelitian Ragam Metode Penelitian Arkeologi dalam Skripsi Karya Mahasiswa Arkeologi Universitas Gadjah Mada**. Yogyakarta: Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada.

DAFTAR INFORMAN

No.	Nama	Umur	Alamat	Keterangan
1.	Ahmad Wahdan	81 th	Kauman Gm I / 25 Yogyakarta	Salah satu keluarga besar Bani Faqih
2.	Syaifudin Prawirodawam	74 th	Kauman Gm I / --- Yogyakarta	Mantan ketua takmir Langgar Makmur



JURNAL WIDYA PRABHA

Penerbit :

Balai Pelestarian Cagar Budaya

Jl. Raya Jogja - Solo Km 15, Bogem, Kalasan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta

Tlp. (0274) 496019; Email: bp3diy@yahoo.com

www.purbakalayogya.com